

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA DENPASAR



BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR
2022





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 Kota Denpasar dapat diselesaikan penyusunannya dengan tepat waktu ditengah Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia, guna disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 70 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Evaluasi tahun 2019 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan yang terjadi,



pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Kota Denpasar.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yalg telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, serta tercipta timbal-balik (feedback) sebagai masukan untuk alternatif perbaikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan di Kota Denpasar pada masa yang akan datang.

Denpasar, 21 Maret 2022

WALIKOTA DENPASAR,

GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	31
1.1.3 Penerapan Standar Minimal	80
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	91
21 Capaian Kinerja Makro	91
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	102
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	102
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	215
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang	
Urusan Pemerintahan	258
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	266
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	290
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL	294
4.1 Urusan Pendidikan	295
4.2 Urusan Kesehatan	300
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	309
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	315
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyara	kat318
4.6 Urusan Sosial	324
BAB V PENUTUP	329



DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1	Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 - 2021	8
Tabel	1.2	Trend Indikator Kependudukan Kota Denpasar Tahun 2020 - 2021	10
Tabel	1.3	Jumlah Penduduk Kota Denpasar yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2020 - 2021	10
Tabel	1.4	Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan (Hektar) Tahun 2021	13
Tabel	1.5	Luas Wilayah, Ketinggian Dari Permukaan Laut dan Jumlah Kelurahan/Desa dimasing-masing Kecamatan di Kota Denpasar	16
Tabel	1.6	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan Struktural	19
Tabel	1.7	Rekapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan Struktural	20
Tabel	1.8	Aparatur Pemerintah berdasarkan Pendidikan	21
Tabel	1.9	Aparatur Pemerintah berdasarkan Jenis Jabatan	21
Tabel	1.10	Aparatur Pemerintah berdasarkan Golongan	22
Tabel	1.11	Aparatur Pemerintah berdasarkan Diklat PIM	22
Tabel	1.12	Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2021	27
Tabel	1.13	Pendapatan Daerah Kota Denpasar Menurut Sumbernya Tahun 2020-2021	28
Tabel	1.14	Dana Perimbangan Tahun 2020-2021	29
Tabel	1.15	Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah Tahun 2020-2021	30
Tabel	1.16	Target dan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Kota Denpasar Tahun 2020-2021	31
Tabel	1.17	Program Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021	63
Tabel	1.18	Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	68
Tabel	1.19	Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2021- 2026	86
Tabel	1.20	Integrasi SPM Bidang Pendidikan ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2021	87
Tabel	1.21	Integrasi SPM Bidang Kesehatan ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2021	87
Tabel	1.22		88

Tabel	1.23	Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	88
		Tahun 2021-2026	
Tabel	1.24	Integrasi SPM Bidang Pekerjaan Umum ke Dalam	
		Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan	89
		Rekerjaan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021	
Tabel	1.25	Integrasi SPM Bidang Perumahan Rakyat ke	
		Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan	90
		Permukiman Kumuh Kota Denpasar Tahun 2021	
Tabel	1.26	_	
		Kebijakan Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun	90
		2021	
Tabel	2.1	Capaian Kinerja Makro Kota Denpasar	91
Tabel	2.2	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskindan	
		Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar	95
		Tahun 2020-2021	
Tabel	2.3	Pendapatan Perkapita	100
Tabel	2.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	268
		Pemerintah Kota Denpasar	208
Tabel	2.5	Tujuan dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota	270
		Denpasar Tahun 2021	270
Tabel	2.6	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar	271
		Tahun 2021	2/1
Tabel	2.7	Formula Perhitungan dan Sumber Data	
		Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah	273
		Kota Denpasar	
Tabel	2.8	Pengukuran Capaian Kinerja Berbanding tahun	275
		sebelumnya	213
Tabel	2.9	Pengukuran Capaian Kinerja Berbanding dengan	278
		Target Perbandingan Jangka Menengah	210
Tabel	2.10	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang	
		Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja yang Telah Di	281
		Capai	
Tabel	2.11	Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung	283
		Percapaian Target Kineria	403



DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1.1	Peta Wilayah Kota Denpasar	15
Gambar	1.2	Perangkat Daerah dan Unit Kerja Kota Denpasar	18
Gambar	2.1	Perkembangan IPM di Kota Denpasar Tahun 2020-2021	93
Gambar	2.2	Angka Pengangguran di Kota Denpasar Tahun 2020-2021	97
Gambar	2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Denpasar Tahun 2019-2021	97
Gambar	2.4	Perkembangan inflasi Kota Denpasar Tahun 2020-2021	99
Gambar	2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Denpasar Tahun 2019-2021	100
Gambar	2.6	Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2019-2021	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Secara historis semua daerah kabupaten dan kota yang ada di Bali berasal dari wilayah kerajaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan tim Sejarah Kota Denpasar, nama Denpasar telah ada sejak tahun 1788, hal ini ditandai dengan berdirinya Puri Denpasar. Denpasar berarti sebelah Utara Pasar. Puri Denpasar adalah sebuah Puri yang berada di Utara Pasar. Puri Denpasar adalah pusat kerajaan Badung dibawah pemerintahan Raja I Gusti Made Ngurah. Fakta ini memberi petunjuk bahwa telah lahir sebuah komunitas masyarakat yang berpusat di Puri Denpasar.



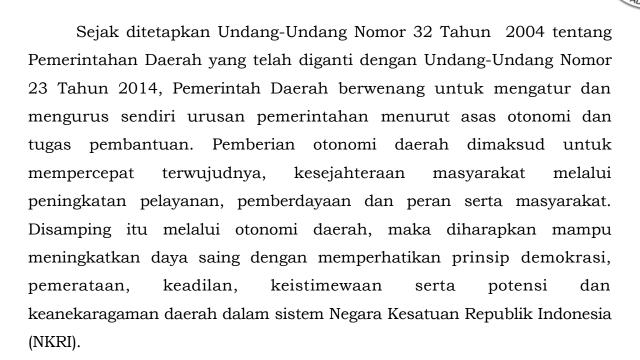
Puri Denpasar yang dahulu hancur karena serangan penjajah Belanda bergeser ke belakang dan kini Puri Denpasar yang telah hancur tersebut berubah menjadi Gedung Jaya Sabha, dan Utara Pasar itu sekarang berubah menjadi Kantor Pusat.



A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

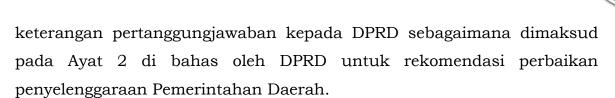
Pemerintahan Kota Denpasar dalam perkembangan yang demikian pesat dimana Puri Denpasar yang mulanya merupakan pusat kerajaan Badung berkembang menjadi Kota dan selanjutnya berkembang menjadi Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Perkembangan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung waktu itu menganggap perlu dan mendesak untuk mengusulkan Kota Denpasar dijadikan Kota Administratif, sehingga proses pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan. Maka pada tahun 1978 Kota Denpasar menjadi Kota Administratif.

Melihat perkembangan Kota Denpasar yang sangat pesat, maka sejak tahun 1980 mulai dirintis untuk mengusulkan pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi "Kota Administratif Denpasar", dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, dan Kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi "kotamadya", yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992.



Sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengoptimalisasikan potensi terbaik yang dimilikinya serta mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budayanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah senantiasa diorientasikan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan lainnya serta menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah Pusat, demi menjaga tegak NKRI.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerahuntuk mewujudkan *Good Govermance*, Pemerintah Kota Denpasar senantiasa mendasarkan prinsip-prinsip demokrasi, trasparansi dan akuntabel, partisipatif, pemerataan serta keadilan. Di samping itu, dibangun hubungan dan koordinasi yang intensif dengan DPRD Kota Denpasar sebagai mitra kerja dalam pembuatan kebijakan daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan Laporan



Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan: Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan 2016-2021 Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi masih menggunakan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) lama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan IKK yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengganti Peraturan Menteri 2009. Laporan Penyelenggaraan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun Pemerintahan Daerah memuat Capaian Kinerja Makro, Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang termuat dalam kesesuaian materi serta Capaian kinerja pelaksanaan tugas



pembantuan.

Dalam rangka penyediaan data informasi kinerja yang handal, dan akuntabel, maka secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (pasal 11 ayat 2 dan pasal 25 ayat 2;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar;
- 13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembar Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- 16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021;
- 17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- 19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun



- 20. Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 (Ranperda);
- 21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
- 22. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/154/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Data Geografis Wilayah

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, selain merupakan Ibukota Daerah Tingkat II, juga merupakan Ibukota Propinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan pusat kegiatan lainnya.

Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar berada pada ketinggian 0-75 meter dari permukaan laut, morfologi landai dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar antara 0-5% namun dibagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15%, terletak pada posisi 8°35'31" sampai 8°44'49" Lintang Selatan dan 115°00'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur, yang berbatasan dengan: di sebelah Utara Kabupaten Badung, di sebelah Timur Kabupaten Gianyar, di sebelah Selatan Selat Badung dan di sebelah Barat Kabupaten Badung.

Sementara luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km² atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan tanahnya, 2.768 Ha merupakan tanah sawah, 10.001 Ha merupakan tanah kering dan sisanya seluas 9 Ha adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata-rata



sebesar 244 mm per bulan, dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan suhu udara rata-rata sekitar 29.8 °C dengan rata-rata terendah sekitar 24.3 °C. Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah Kota Denpasar, sungai ini bermuara di Teluk Benoa.

C. Jumlah Penduduk

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat penduduk suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin tinggi tingkat kepadatan, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai 651.601 jiwa dan tahun 2021 mencapai 652.728 jiwa. Angka ini sangat jauh diatas tingkat kepadatan Provinsi Bali yang hanya sebesar 750 jiwa per Km². Jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2021 menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.1 Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2021

Kelompok	20	2020 20		021	
Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	18.688	17.377	18.604	17.391	
5-9	25.741	24.127	25.114	23.678	
10-14	28.463	26.628	28.042	26.095	
15-19	28.695	26.951	29.093	27.400	
20-24	28.191	26.963	28.698	27.389	
25-29	23.556	23.206	24.546	24.147	
30-34	19.968	20.932	20.215	21.206	

35-39	22.221	24.991	21.370	23.940
40-44	25.445	27.853	24.496	27.119
45-49	27.669	29.346	26.986	29.026
50-54	25.740	25.074	26.354	26.133
55-59	18.724	18.252	19.606	19.365
60-64	13.036	12.924	12.865	12.768
65-69	9.098	8.744	9.363	9.348
70-74	5.343	5.694	5.301	5.594
75+	5.398	6.563	5.191	6.285
Total	325.976	325.625	325.844	326.884

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar 2022

Proyeksi jumlah penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2021 berjumlah 962.900 yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 491.500 jiwa dan jumah penduduk perempuan sebanyak 471.400 jiwa. Dimana proyeksi jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021 terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan dengan jumlah penduduk 311.590 jiwa. Penduduk dengan jumlah terendah Kecamatan Denpasar Timur yaitu berjumlah 162.220 jiwa.

Ditinjau menurut kelompok umur pada tahun 2020, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) masih tergolong ideal yaitu mencapai 72,42% dengan rasio beban tanggungan sebesar 0,381%. Artinya setiap 100 orang penduduk Kota Denpasar usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 38 orang penduduk yang tidak/belum produktif.

2022 RAWADALAH KEMPA

Tabel 1.2
Trend Indikator Kependudukan Kota Denpasar Tahun 2020-2021

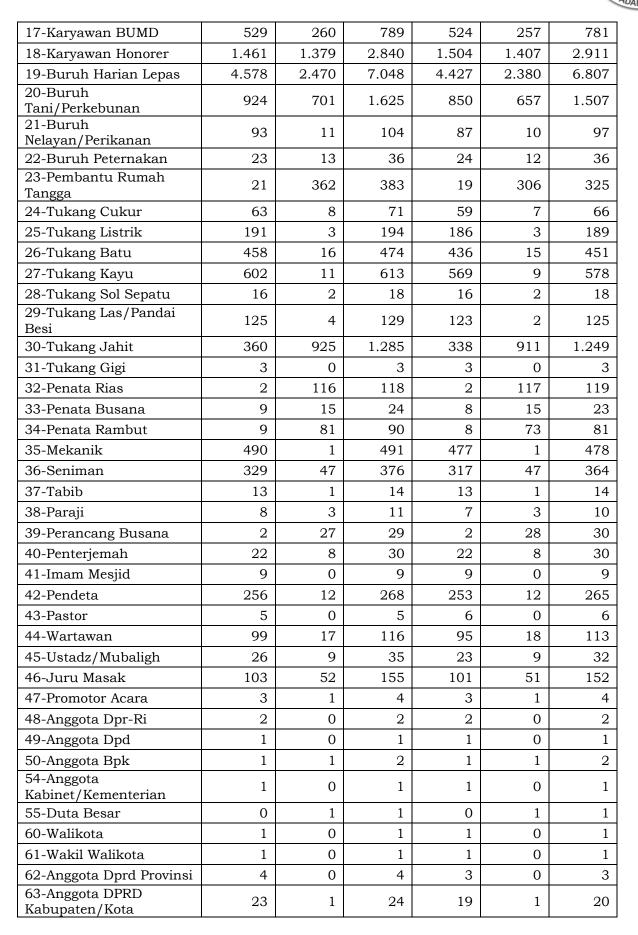
Uraian	2020	2021
Jumlah Penduduk	651.601	652.728
Pertumbuhan Penduduk	0,003616464	0,001729586
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	5.099,40	5.108,22
Ratio jenis kelamin (%)	0,500:0,500	0,499:0,501
0-14 Tahun	141.024	138.924
15-64 Tahun	469.737	472.722
>65 Tahun	40.840	41.082
Rasio Beban Tanggungan (%)	0,387	0,381

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar 2022

Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kota Denpasar yang Bekerja menurut Jenis
Pekerjaan, Tahun 2020-2021

Jenis Pekerjaan		2020			2021	
	L	P	JML	L	P	JML
1-Belum/Tidak Bekerja	60.566	58.141	118.707	63.054	60.406	123.460
2-Mengurus Rumah Tangga	8	67.967	67.975	0	66.891	66.891
3-Pelajar/Mahasiswa	83.093	75.334	158.427	81.540	74.365	155.905
4-Pensiunan	6.157	2.418	8.575	5.889	2.398	8.287
5-Pegawai Negeri Sipil	9.780	8.813	18.593	9.453	8.691	18.144
6-Tentara Nasional Indonesia	1.685	94	1.779	1.649	95	1.744
7-Kepolisian RI	2.362	250	2.612	2.335	253	2.588
8-Perdagangan	2.296	3.298	5.594	2.190	3.171	5.361
9-Petani/Pekebun	2.039	1.428	3.467	1.925	1.383	3.308
10-Peternak	123	36	159	118	36	154
11-Nelayan/Perikanan	561	167	728	546	158	704
12-Industri	210	125	335	191	119	310
13-Konstruksi	374	85	459	351	77	428
14-Transportasi	530	38	568	506	35	541
15-Karyawan Swasta	88.585	61.042	149.627	88.845	62.260	151.105
16-Karyawan BUMN	2.368	1.258	3.626	2.313	1.245	3.558



66-Pilot 12 0 12 12 0 67-Pengacara 181 54 235 182 55 68-Notaris 105 99 204 105 99 69-Arsitek 415 60 475 416 59 70-Akuntan 23 26 49 21 24 71-Konsultan 131 44 175 132 43 72-Dokter 1.061 1.109 2.170 1.116 1.189 2 73-Bidan 0 421 421 0 432 43 74-Perawat 100 707 807 110 740 75-Apoteker 47 125 172 49 123 76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258	4.041 12 237 204 475 45 175 2.305 432 850
67-Pengacara 181 54 235 182 55 68-Notaris 105 99 204 105 99 69-Arsitek 415 60 475 416 59 70-Akuntan 23 26 49 21 24 71-Konsultan 131 44 175 132 43 72-Dokter 1.061 1.109 2.170 1.116 1.189 2 73-Bidan 0 421 421 0 432 43 74-Perawat 100 707 807 110 740 740 75-Apoteker 47 125 172 49 123 76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18	237 204 475 45 175 2.305 432 850
68-Notaris 105 99 204 105 99 69-Arsitek 415 60 475 416 59 70-Akuntan 23 26 49 21 24 71-Konsultan 131 44 175 132 43 72-Dokter 1.061 1.109 2.170 1.116 1.189 2 73-Bidan 0 421 421 0 432 74-Perawat 100 707 807 110 740 75-Apoteker 47 125 172 49 123 76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546	204 475 45 175 2.305 432 850
69-Arsitek 415 60 475 416 59 70-Akuntan 23 26 49 21 24 71-Konsultan 131 44 175 132 43 72-Dokter 1.061 1.109 2.170 1.116 1.189 2 73-Bidan 0 421 421 0 432 74-Perawat 100 707 807 110 740 75-Apoteker 47 125 172 49 123 76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	475 45 175 2.305 432 850
70-Akuntan 23 26 49 21 24 71-Konsultan 131 44 175 132 43 72-Dokter 1.061 1.109 2.170 1.116 1.189 2 73-Bidan 0 421 421 0 432 43 74-Perawat 100 707 807 110 740 <td>45 175 2.305 432 850</td>	45 175 2.305 432 850
71-Konsultan 131 44 175 132 43 72-Dokter 1.061 1.109 2.170 1.116 1.189 2 73-Bidan 0 421 421 0 432 74-Perawat 100 707 807 110 740 75-Apoteker 47 125 172 49 123 76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	175 2.305 432 850
72-Dokter 1.061 1.109 2.170 1.116 1.189 2 73-Bidan 0 421 421 0 432 432 74-Perawat 100 707 807 110 740 75-Apoteker 47 125 172 49 123 76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	2.305 432 850
73-Bidan 0 421 421 0 432 74-Perawat 100 707 807 110 740 75-Apoteker 47 125 172 49 123 76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	432 850
74-Perawat 100 707 807 110 740 75-Apoteker 47 125 172 49 123 76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	850
75-Apoteker 47 125 172 49 123 76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	
76-Psikiater/Psikolog 9 22 31 10 26 77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	
77-Penyiar Televisi 0 3 3 0 3 78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	172
78-Penyiar Radio 11 4 15 11 5 79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	36
79-Pelaut 258 10 268 254 9 80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	3
80-Peneliti 17 14 31 18 15 81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	16
81-Sopir 1.546 6 1.552 1.485 6	263
	33
	1.491
82-Pialang 6 5 11 5 4	9
83-Paranormal 10 6 16 9 6	15
84-Pedagang 3.245 6.919 10.164 3.065 6.712 9	9.777
85-Perangkat Desa 99 63 162 97 60	157
86-Kepala Desa 14 1 15 13 1	14
87-Biarawati 0 5 5 0 6	6
88-Wiraswasta 45.004 25.043 70.047 44.705 25.170 69	9.875
89-Lainnya 53 64 117 560 362	922
Total 325.976 325.625 651.601 325.844 326.884 652	2.728

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar 2022

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km2 (2,21 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km2 (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km2 (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km2 (18,88 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km2 (17,64 persen). Selengkapnya disajikan dalam tabel 1.4



Tabel 1.4 Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan (Hektar) Tahun 2021

No]	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecar	natan Denpasar Utara	3142	24.59
	1.1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142	4.52
	1.2	Desa Dangin Puri Kangin	75	2.39
	1.3	Kelurahan Tonja	230	7.32
	1.4	Desa Dangin Puri Kauh	72	2.29
	1.5	Desa Pemecutan Kaja	385	12.25
	1.6	Desa Ubung	103	3.28
	1.7	Desa Ubung Kaja	430	13.69
	1.8	Desa Dauh Puri Kaja	109	3.47
	1.9	Kelurahan Peguyangan	644	20.50
	1.10	Desa Peguyangan Kaja	536	17.06
	1.11	Desa Peguyangan Kangin	416	13.24
2	Kecar	natan Denpasar Barat	2406	18.83
	2.1	Desa Padang Sambian Klod	412	17.12
	2.2	Desa Pemecutan Klod	442	18.37
	2.3	Desa Kauh Puri Kauh	183	7.61
	2.4	Desa Kauh Puri Klod	188	7.81
	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60	2.49
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59	2.45
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186	7.73
	2.8	Desa Tegal Harum	62	2.58
	2.9	Desa Tegal Kertha	35	1.45
	2.10	Kelurahan Padang Sambian	370	15.38
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409	17.00
3	Kecar	natan Denpasar Timur	2231	17.46
	3.1	Desa Dangin Puri Klod 209	209	9.37
	3.2	Desa Sumerta Klod	268	12.01
	3.3	Kelurahan Kesiman	239	10.71
	3.4	Desa Kesiman Petilan	281	12.60
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	380	17.03
	3.6	Kelurahan Sumerta	50	2.24
	3.7	Desa Sumerta Kaja	52	2.33
	3.8	Desa Sumerta Kauh	87	3.90

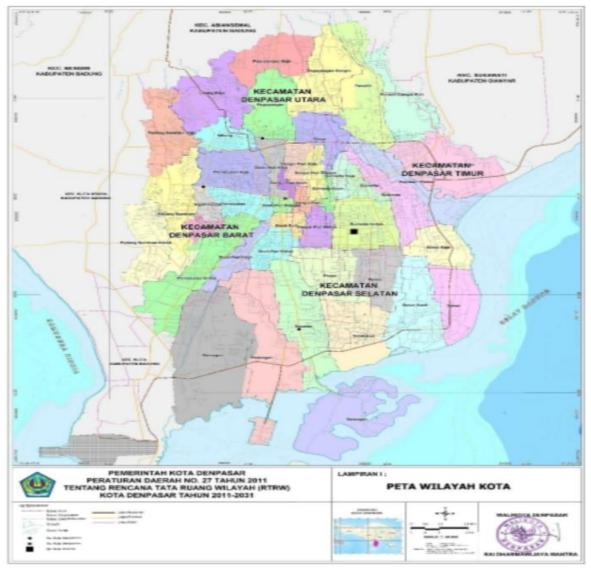
	3.9	Kelurahahn Dangin Puri	62	2.78
	3.10	Kelurahan Penatih	291	13.04
	3.11	Desa Penatih Dangin Puri	312	13.98
4	Kecar	natan Denpasar Selatan	4999	39.12
	4.1	Desa Pemogan	971	19.42
	4.2	Kelurahan Pedungan	749	14.98
	4.3	Kelurahan Sesetan	739	14.78
	4.4	Kelurahan Serangan	481	9.62
	4.5	Desa Sidakarya	389	7.78
	4.6	Kelurahan Panjer	359	7.18
	4.7	Kelurahan Renon	254	5.08
	4.8	Desa Sanur Kauh	386	7.72
	4.9	Kelurahan Sanur	402	8.04
	4.10	Desa Sanur Kaja	269	5.38
	Kota 1	Denpasar	12778	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar 2022

Berdasarkan Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung).
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung

Gambar 1.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar



Sumber: Peta Kota Denpasar

Kota Denpasar terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 dan diresmikan tanggal 27 Pebruari 1992 merupakan status dari Kota Administrasi Denpasar. Secara Administrasi dibagi menjadi 4 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 27 Desa meliputi Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar Utara. Dilihat dari luas wilayah, presentase dibandingkan dengan luas wilayah Kota Denpasar dan ketinggian dari permukaan laut masing-masing kecamatan di Kota Denpasar, maka dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 1.5
Luas Wilayah, Ketinggian Dari Permukaan Laut dan Jumlah Kelurahan/Desa dimasing-masing Kecamatan di Kota Denpasar

KECAMATAN	LUAS WILAYAH	PROSENTASE	KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT	JUMLAH KELURAHAN
Denpasar	49.99	39.12 %	00-12	6 Kelurahan dan 4
Selatan				Desa
Denpasar Timur	22.31	17.49 %	00-75	4 Kelurahan dan 7
				Desa
Denpasar Barat	24.06	18.83 %	00-75	3 Kelurahan dan 8
				Desa
Denpasar Utara	31.41	24.59 %	00-75	3 Kelurahan dan 8
				Desa
Jumlah /Total	127.78	100.00 %	00-75	16 Kelurahan dan 27
				Desa

Sumber: BPS Kota Denpasar, Denpasar Dalam Angka

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat 36 Perangkat Daerah. Adapun 36 Perangkat Daerah di Kota Denpasar diantaranya adalah:

- 1. Inspektorat Kota Denpasar
- 2. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
- 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
- 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
- 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
- 8. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar
- 9. Sekretariat DPRD Kota Denpasar
- 10. Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- 11. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar



- 12. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar
- 13. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
- 14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
- 15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
- 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- 17. Dinas Perhubungan Kota Denpasar
- 18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- 19. Dinas Sosial Kota Denpasar
- 20. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
- 21. Dinas Pertanian Kota Denpasar
- 22. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
- 23. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
- 24. Dinas Pariwisata Kota Denpasar
- 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
- 26. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
- 27. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
- 28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
- 29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
- 30. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
- 31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
- 32. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
- 33. Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar
- 34. Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar
- 35. Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
- 36. Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar

Maka struktur Pemerintah Kota Denpasar dapat sajikan pada Gambar berikut:

Gambar 1.2 Perangkat Daerah dan Unit Kerja Kota Denpasar

Aparatur Pemerintah

Keadaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat per Desember Tahun 2021 sebanyak 5.235 orang, terdiri dari:

1. Berdasarkan Eselonisasi

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota



Denpasar berdasarkan pada tahun 2021 adalah:

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan Struktural

			2021				
No	Eselon	Jabatan			Teri	si	_
			Formasi	L	P	Jumlah	Lowong
1	II A	Sekretaris Daerah	1	1	0	1	0
2	II B	Asisten	3	3	0	3	0
		Staf Ahli	3	1	0	1	2
		Kepala Badan	7	6	0	6	1
		Kepala Dinas	21	10	4	14	7
		Sekretariat DPRD	1	0	0	0	1
		Direktur RSUD	1	1	0	1	0
		Inspektur	1	0	1	1	0
		Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0	1	0
		Jumlah	39	23	5	28	11
3	III A	Kabag pada Setda	10	8	1	9	1
		Camat	4	3	0	3	1
		Sekretaris Badan	7	2	1	3	4
		Sekretaris Dinas	21	7	1	8	13
		Sekretaris pada Inspektorat	1	1	0	1	0
		Irban pada Inspektorat	5	2	0	2	3
		Kabag Pada Set DPRD	4	1	0	1	3
		Wakil Direktur RSUD	3	1	1	2	1
		Jumlah	55	25	4	29	26
				- 10			
4	III B	Kepala Bid Badan	29	12	6	18	11
		Kepala Bidang Dinas	82	32	32	64	18
		Kepala Bidang RSUD	6	4	2	6	0
		Satuan Polisi Pamong Praja	4	3	0	3	1
		Sekretaris Kecamatan	4	4	0	4	0
		Jumlah	125	55	40	95	30
5	IV A	Lurah	16	11	4	15	1
		Kasub.Bag & Kasub. Bid pada Badan	23	7	11	18	5
		Kasub. Bag & Kasi pada Dinas	68	28	23	51	17
		Kasub.Bag pada Setda	2	1	1	2	0
		Kasub. Bag. Set DPRD	1	0	1	1	0
		Kasub. Bag & Kasi pada RSUD	0	0	0	0	0

		Kasub. Bag pada Komisi Pemilihan Umum	1	1	0	1	0
		Kasub. Bag & Kasi Inspektorat	2	0	0	0	2
		Kasub.Bag & Kasi Satuan Polisi Pamong Praja	11	7	3	10	1
		Kasie Kecamatan	20	6	6	12	8
		Kepala UPTD	16	5	1	6	10
		Jumlah	160	66	50	116	44
6	IV B	Kasub. Bag Kecamatan	8	1	3	4	4
		Sekretaris & Kasi pada Kelurahan	64	28	26	54	10
		Kasub.Bag UPTD	29	10	5	15	14
		Jumlah	101	39	34	73	28
		TOTAL	481	208	133	341	140

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2022

Berdasarkan jumlah formasi pegawai Eselon Jabatan Struktural yang dibutuhkan di Kota Denpasar untuk jabatan Eselon II b masih ada yang tidak terisi sebanyak 11 orang, Eselon III a sebanyak 26 orang, Eselon III b sebanyak 30 orang, Eselon IV a sebanyak 44 orang, Eselon IV b sebanyak 140 orang. Adapun rekapan jumlah pegawai Eselon Jabatan Struktural di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7 Rekapan Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan Struktural

NO	ESELON	JUMLAH
1	II.a	1
2	II.b	28
3	III.a	29
4	III.b	95
5	IV.a	116
6	IV.b	73
7	Non Eselon	4.893
	5.235	

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2022

2. Berdasarkan Pendidikan

Adapun jumlah pegawai berdasarkan pendidikannya untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Denpasar berdasarkan pada tahun 2021 adalah:

Tabel 1.8

Aparatur Pemerintah berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	APDN	1
2	D.I	13
3	D.II	78
4	D.III	446
5	D.IV	46
6	D-I / A-I	1
7	D-II / A-II	28
8	D-III / A-III	12
9	S 1 / A IV	407
10	S1	2.603
11	S1.IIP	5
12	S2	435
13	S3	7
14	Sarmud	2
15	SD	83
16	SLTA	948
17	SLTP	119
18	STPDN	1
	JUMLAH	5.235

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2022

3. Berdasarkan Jenis Jabatan

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Denpasar berdasarkan pada tahun 2021 adalah:

Tabel 1.9
Aparatur Pemerintah berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Guru	1.895
2	Medis dan Paramedis	706
3	JFT lainnya	425
4	Pelaksana	1.868
5	Struktural	341
	JUMLAH	5.235

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2022



4. Berdasarkan Golongan

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan di Kota Denpasar berdasarkan pada tahun 2021 adalah:

Tabel 1.10 Aparatur Pemerintah berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	99
2	II	888
3	III	2.846
4	IV	1.402
	JUMLAH	5.235

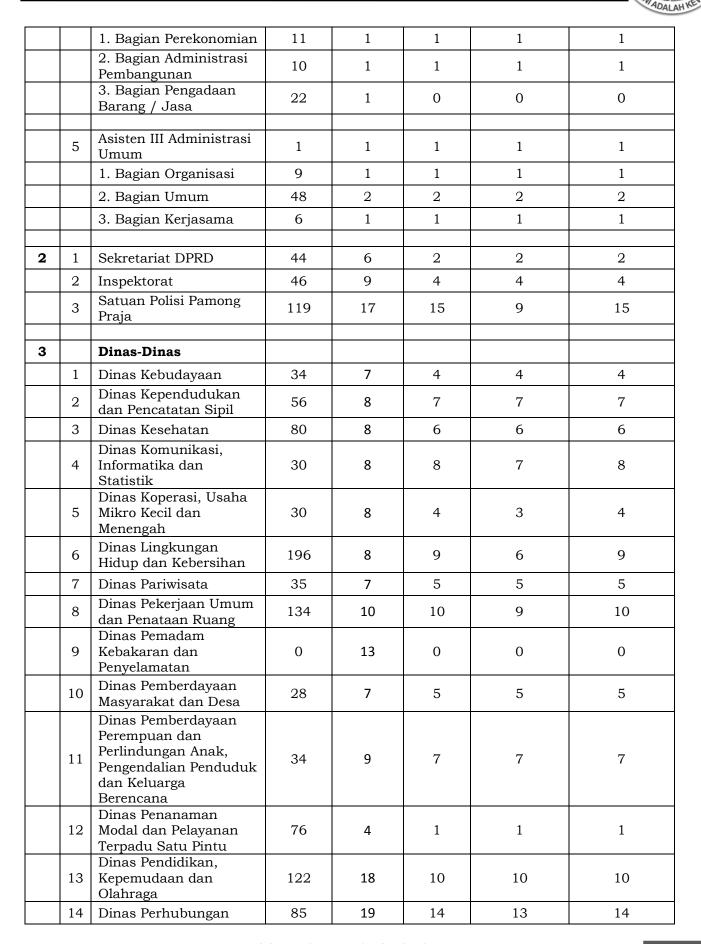
Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2022

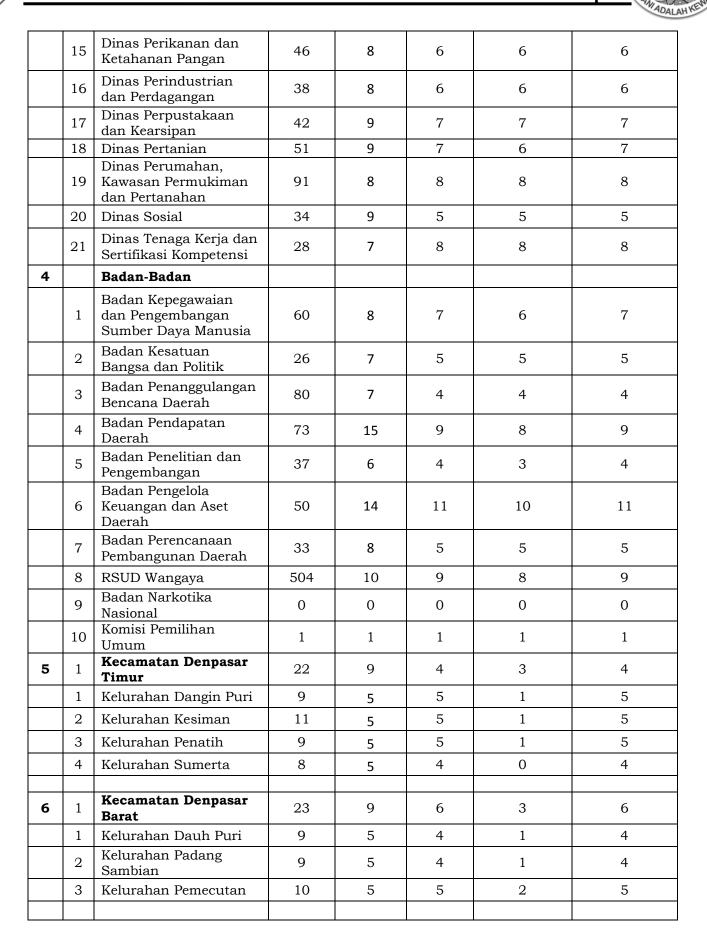
5. Berdasarkan Diklat PIM

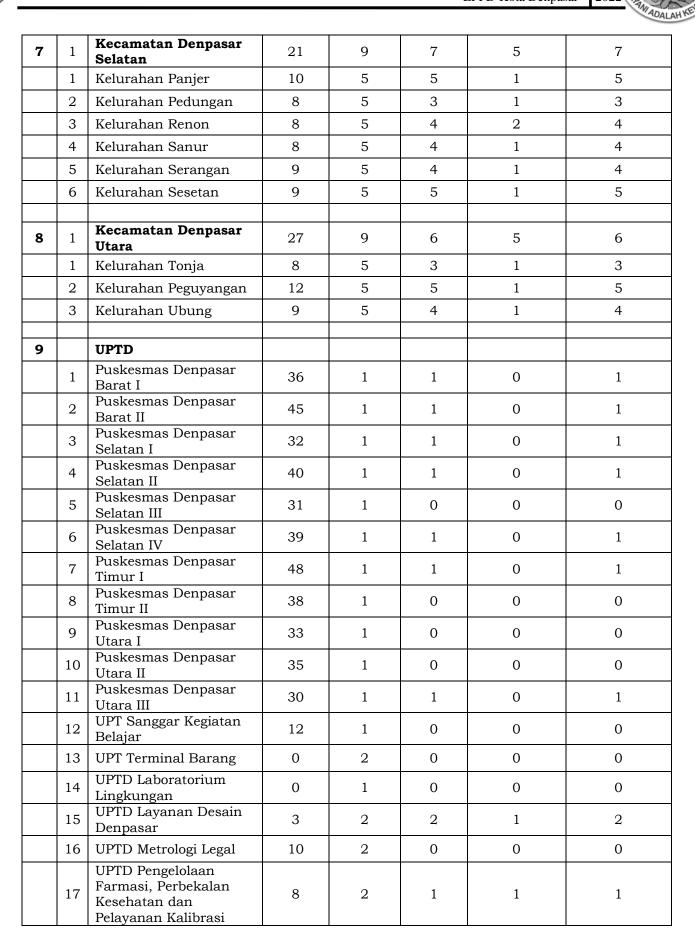
Adapun jumlah pegawai berdasarkan diklat PIM untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Denpasar berdasarkan pada tahun 2021 adalah:

Tabel 1.11 Aparatur Pemerintah berdasarkan Diklat PIM

NO		Nama Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Jabatan Yang Ada	Pejabat Yang Ada	Pejabat yang memenuhi Persyaratan Diklat PIM	Pejabat yang Telah Memenuhi Persyaratan Kepangkatan
1		Sekretariat Daerah					
	1	Sekretaris Daerah	1	1	1	1	1
	2	Staf Ahli	1	3	1	1	1
	3	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	1	1
		1. Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	1	1	1	1
		2. Bagian Tata Pemerintahan	8	1	1	1	1
		3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	14	2	2	2	2
		4. Bagian Hukum	9	1	0	0	0
	4	Asisten II Perekonomian dan Pembangunan	1	1	1	1	1







	18	UPTD Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	2	1	2
	19	UPTD Pengelolaan Sampah	1	2	1	1	1
	20	UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar	2	2	2	1	2
	21	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	6	1	1	0	1
	22	UPTD Rumah Potong Hewan	8	1	1	0	1
	23	UPTD Terminal Penumpang	21	2	1	1	1
	24	UPTD Pelayanan Transportasi Darat	7	2	2	1	2
	25	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	21	2	1	0	1
	26	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A)	0	2	0	0	0
	27	UPTD Pusat Layanan Disabilitas	0	2	0	0	0
	28	UPTD Pusat Pelayanan Ekonomi Kreatif	0	2	0	0	0
	29	UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	0	2	0	0	0
10		SMP	483	0	0	0	0
11		SD	1.455	0	0	0	0
12		TK	53	0	0	0	0
		TOTAL	5.235	475	341	249	341

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar

F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.



1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengelola 9 (sembilan) jenis pajak daerah, yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Air Tanah
- g. Pajak Parkir
- h. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
- i. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Berikut ini akan ditampilkan target dan realisasi pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam kurun waktu tahun 2016-2020 :

Tabel 1.12
Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2021

		Pendapatan Daerah Kota Denpasar					
1	Sahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)			
	2020	1.947.478.202.444,12	1.964.054.093.227,60	100,85%			
	2021	1.900.322.351.666,00	1.999.840.706.341,59	105,24%			

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Dari data diatas, menunjukkan bahwa persentase Realisasi Pendapatan Daerah di tahun 2020 mencapai 100,85% dan tahun 2021 sebesar 105,24%.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut.



Tabel 1.13 Pendapatan Daerah Kota Denpasar Berdasarkan Sumbernya Tahun 2020-2021

	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
TAHUN	Pajak Daerah (Rp.)	Retribusi Daerah (Rp.)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp.)	Lain-lain PAD Yang Sah (Rp.)			
2020							
Target	448.400.000.000,00	28.775.868.000,00	56.725.345.449,58	121.019.000.000,00			
Realisasi	489.692.369.902,61	29.183.790.708,00	56.572.597.030,60	155.812.523.264,32			
Persentase	109,21%	101,42%	99,73%	128,75%			
2021							
Target	457.900.000.000,00	21.125.965.000,00	53.942.954.299,00	136.985.219.336,00			
Realisasi	521.849.341.929,64	23.367.792.074,00	53.948.291.794,20	196.596.553.037,08			
Persentase	113,97%	110,61%	100,01%	143,52%			

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar menunjukkan ada peningkatan disetiap sumber dari pajak tersebut. Persentase untuk Pajak Daerah di tahun 2020 mencapai 109,21% meningkat mencapai 113,97% di tahun 2021. Persentase untuk Retribusi Daerah di tahun 2020 mencapai 101,42% meningkat mencapai 110,61% di tahun 2021. Persentase untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di tahun 2020 meningkat mencapai 100,01% di tahun 2021. mencapai 99,73% Sedangkan untuk persentase Lain-lain PAD yang Sah di tahun 2020 mencapai 128,75% meningkat mencapai 143,52% di tahun 2021.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut.



Tabel 1.14
Dana Perimbangan Tahun 2020-2021

	DANA PERIMBANGAN					
TAHUN	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Rp.)	DAU (Rp.)	DAK (Rp.)			
2020						
Target	100.885.573.254,00	623.672.157.000,00	123.339.281.198,00			
Realisasi	86.500.415.123,00	619.582.547.000,00	117.716.253.494,00			
Persentase	85,74%	99,34%	95,44%			
2021						
Target	165.209.402.620,00	683.945.543.000,00	164.094.577.000,00			
Realisasi	125.692.795.971,50	717.796.023.971,00	144.686.406.818,00			
Persentase	76,08%	104,95%	88,17%			

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan Kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD. Dana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil di tahun 2021 persentase mencapai 76,08% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan di tahun 2021 dari tahun sebelumnya dengan persentase 104,95%. Dan persentase Dana Alokasi Khusus di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian mencapai 88,17%.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 – 2021 diuraikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 1.15 Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah Tahun 2020-2021

	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)	
2020	151.008.271.000,00	148.953.387.553,91	98,64%	
2021	89.189.854.000,00	89.004.111.501,80	99,79%	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Dari data di atas menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase lain-lain pendapatan daerah yang sah di tahun 2021 mencapai 99,79% yang ada kenaikan dari tahun 2020 dengan persentase 98,64%.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.



Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Pada APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 - Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.16 Target dan Realisasi Belanja Daerah Pada APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020-2021

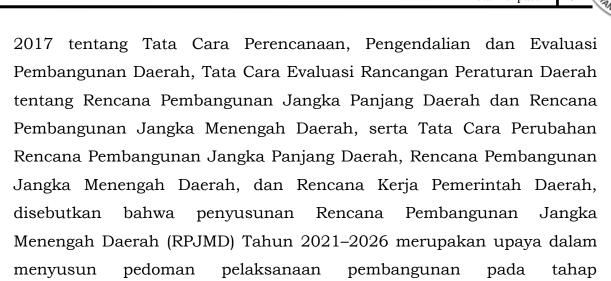
No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	2020	2.180.779.275.573,13	1.884.553.111.846,61	86,42
2	2021	2.204.424.453.487,00	2.204.424.453.487,00	87,36

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Dari data diatas, menunjukkan bahwa persentase belanja daerah pada APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan persentase sebesar 87,36%. Dengan target di tahun 2021 sebesar Rp. 2.204.424.453.487,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.204.424.453.487,00.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun



pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kota

Denpasar Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai dokumen perencanaan, sesuai Pasal 263 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sementara itu, dalam Pasal 264 Ayat (4) Perda Tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Seiring dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Denpasar pada tanggal 26 Februari 2021, maka Pemerintah Kota Denpasar wajib menyusun RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021–2026. Penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus selaras juga dengan sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024 serta arah kebijakan pembangunan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemi *Covid-19* belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya terkait pada permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan sebagainya. Salah satu indikator yang dapat dilihat yaitu pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 9,42%. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi terhadap semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapat tantangan cukup besar untuk membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kota Denpasar.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Oleh karenanya, RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di Kota Denpasar yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan visi yang diharapkan.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan RKPD melalui 6 (enam) tahapan penyusunan yaitu:



- 1. Persiapan penyusunan RKPD Pada tahapan Persiapan penyusunan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:
 - b. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim Penyusun RKPD.
 - c. Orieontasi mengenai RKPD.
 - d. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.
 - e. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- 3. Penyusunan Rancangan RKPD;
- 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- 6. Penetapan RKPD.

Sesuai amanat Pasal 12 Ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD berpedoman pada RPJMD dengan maksud untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai



- 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
- 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan (RAPBD) Belanja Daerah serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
- 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan maupun tantangan yang dihadapi Kota Denpasar meliputi permasalahan dan tantangan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat; pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, pemerintahan; keamanan wilayah; lingkungan hidup yang berkelanjutan; serta daya saing ekonomi daerah, sehingga



diperlukan skala prioritas penanganan permasalahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah. Berikut mempertimbangkan masukan dari permasalahan pembangunan Kota Denpasar yang dikelompokkan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Salah satu tujuan dimensi pembangunan adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Aspek ketiga berupa keberlanjutan lingkungan berkaitan erat dengan kondisi geografis suatu wilayah. Berdasarkan aspek geografinya, berikut dapat diketahui beberapa permasalahan yang perlu menjadi fokus dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Denpasar:

1) Keterbatasan ketersediaan lahan

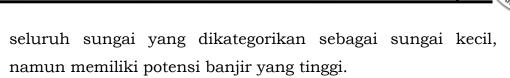
Perkembangan jumlah penduduk sangat mempengaruhi gerak laju pembangunan di suatu wilayah. Meningkatnya jumlah penduduk juga mempengaruhi besarnya kebutuhan lahan pemukiman. Dengan luas wilayah daratan sebesar 12.778 ha, Kota Denpasar memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan lahan yang tersedia. Selain itu besarnya potensi alih fungsi lahan sawah irigasi, akibat tuntutan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang membutuhkan ruang, namun di sisi lain banyak terdapat lahan tidur yang belum termanfaatkan.

2) Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Denpasar Tahun 2011-2031, Kota Denpasar ditetapkan sebagai beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

a) Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kota Denpasar ditetapkan di



- b) Kawasan Rawan Tsunami
 - Kota Denpasar memiliki wilayah kawasan pesisir di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Area tersebut meliputi wilayah pesisir Pantai Sanur dan Serangan. Oleh karena itu, selain abrasi pantai, potensi bencana tsunami juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.
- c) Kawasan Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai Kawasan rawan gelombang dan abrasi pantai meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pantai yang berbentuk hutan bakau. Terdapat sepuluh desa yang rawan gelombang ekstrim dan abrasi yaitu: Desa Pemogan, Desa Pedungan, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar meliputi Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu.
- d) Kawasan Rawan Instrusi Air Laut

 Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut
 sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke
 arah darat.
- e) Kawasan Rawan Kebakaran

 Kawasan rawan kebakaran meliputi seluruh wilayah Kota

 Denpasar dengan pemukiman penduduk yang padat.
- f) Gempa Bumi
 - Wilayah Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya sedang yaitu mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah yang rawan gempa bumi adalah 12.862,08 ha atau 99,98% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.



g) Cuaca Ekstrem

Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrim. Jumlah desa/kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah rawan cuaca ekstrim seluas 12.791,07 ha atau 99,43% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.

b. Aspek Demografi

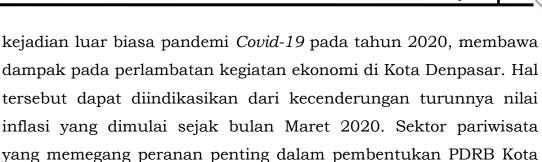
Salah satu tujuan dimensi pembangunan adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Aspek keberlanjutan sosial berkaitan erat dengan kondisi kependudukan, dimana dari aspek demografi ini permasalahan terkait migrasi penduduk perlu menjadi fokus dimana terjadinya jumlah migrasi masuk lebih besar dari pertumbuhan alami penduduk. Namun di masa pandemi yang menyebabkan sebagian penduduk dari luar Kota Denpasar memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar terutama dalam keseimbangan pembangunan dan penyediaan pelayanan infrastruktur.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan akhir dari pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketika capaian indikator tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka hal tersebut menjadi tanda bahwa ada permasalahan kesejahteraan yang sedang dihadapi. Permasalahan kesejahteraan merupakan permasalahan yang kompleks yang diakibatkan oleh lebih dari satu penyebab sehingga ketika masalah kesejahteraan dapat tertangani maka dapat berpengaruh juga terhadap tertanganinya masalah-masalah yang lain. Berikut ini permasalahan yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar:

a. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun, dengan adanya



Denpasar juga mengalami perlambatan sepanjang tahun 2020.

b. Distribusi Pendapatan Masyarakat

Permasalahan distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima setiap masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi karena kondisi pandemi Covid-19 juga berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan masyarakat Kota Denpasar. Banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan untuk sementara waktu maupun tetap karena kejadian luar biasa ini, secara langsung berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Dampak pengurangan tenaga kerja karena dampak pandemi Covid-19 ini juga dapat menjadi penyebab naiknya kembali angka kemiskinan Kota Denpasar.

c. Penanggulangan Kemiskinan

Adanya permukiman kumuh dengan keterbatasan sarana prasarana pendukung menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan (slum area) di perkotaan. Situasi saat ini dimaknai dengan adanya tekanan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga menyebabkan sekelompok orang yang mungkin sebelum pandemi tidak tergolong penduduk miskin, namun karena kehilangan mata pencaharian menjadi masuk dalam kelompok miskin. Adapun langkah kebijakan yang sudah dilakukan



Pemerintah Kota Denpasar adalah melakukan refocusing anggaran untuk dialokasikan menjadi anggaran bantuan sosial.

d. Menurunnya Kontribusi

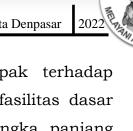
Beberapa Sektor terhadap PDRB Keuangan daerah Kota Denpasar yang belum optimal salah satunya terjadi karena pertumbuhan antar sektor ekonomi pembentuk PDRB mengalami peningkatan yang tidak seimbang. Kontribusi terbesar salah satunya berasal dari penerimaan pajak hotel dan restoran. Namun kondisi pandemi *Covid-19* tentunya memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah terutama dari sektor pariwisata. Diharapkan lima tahun ke depan, kinerja beberapa sektor pendukung PDRB dan PAD perlahan meningkat seiring dengan mulainya aktivitas ekonomi masyarakat.

e. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan indeks komposit aspek pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. Sementara itu, pandemi Covid-19 juga memicu krisis pembangunan sumber daya manusia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di Kota Denpasar dinilai masih kurang, ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah yang belum optimal. Kebijakan social distancing yang diterapkan melalui study/work from home membawa dampak pada perubahan pembelajaran pada dunia pendidikan. Selain itu proses digitalisasi di berbagai lini akan berjalan semakin cepat, sehingga perlu disiapkan SDM Kota Denpasar yang memiliki keterampilan digital (digital talent) untuk menghadapi perubahan ini.

f. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan yang berkaitan dengan pengangguran merupakan permasalahan strategis yang perlu segera ditangani



karena memiliki banyak dampak misalnya dampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat maupun akses fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Dilihat dari capaian ketiga indikator yaitu

- 1) tingkat pengangguran terbuka
- 2) rasio penduduk yang bekerja
- 3) tingkat partisipasi angkatan kerja

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kondisi terkini akibat Covid-19, sumbangan ekonomi pandemi sektor pariwisata diprediksi mengalami penurunan yang signifikan sehingga tingkat pengangguran terbuka memiliki kemungkinan untuk kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

3. Aspek Daya Saing

Permasalahan belum optimalnya daya saing daerah salah satunya adalah masih tingginya angka kriminalitas di Kota Denpasar yang akan berpengaruh terhadap daya saing suatu wilayah karena semakin tinggi tindak kriminal maka iklim investasi pun semakin tidak kondusif.

4. Aspek Pelayanan Umum

- 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - a. Urusan Pendidikan

Kualitas pelayanan umum pendidikan di Kota Denpasar secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas pendukung pendidikan. Secara lebih spesifik, permasalahan yang mencakup urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Belum Optimalnya Angka Partisipasi Setiap Jenjang Pendidikan.

Belum optimalnya angka partisipasi pada setiap jenjang pendidikan tersebut disebabkan oleh minat masyarakat untuk bersekolah masih rendah dan memilih bekerja utamanya di sektor pariwisata yang lebih menjanjikan dan



juga disebabkan karena sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai serta kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang kurang memadai sehingga masyarakat tidak memiliki minat lebih untuk mengenyam bangku pendidikan.

- 2) Masih Terdapatnya Angka Putus Sekolah
 Angka putus sekolah menjadi indikator yang penting karena
 menunjukkan banyaknya siswa yang keluar dari jenjang
 pendidikan yang sedang ditekuni sebelum dinyatakan lulus.
 Meskipun angka putus sekolah di Kota Denpasar sudah
 mendekati nol, namun pada beberapa waktu masih lebih
 tinggi dari target yang diharapkan.
- 3) Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai Tingginya minat untuk bersekolah di Kota Denpasar tidak didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga rombongan belajar atau jumlah siswa perkelas melebihi dari standar dan juga kondisi bangunan sekolah belum seluruhnya dalam kondisi baik.
- 4) Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik kurang memadai Tenaga kependidikan di Kota Denpasar mengalami penurunan karena pensiun, pindah, dan meninggal dunia. Kualitas tenaga pendidik di Kota Denpasar juga masih kurang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan guru tersertifikasi yang masih rendah dan belum semua tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV.

b. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di Kota Denpasar secara umum sudah baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan kesehatan yang jika tidak diperhatikan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Kota Denpasar diantaranya:



Pelayanan kesehatan untuk penderita jenis penyakit tersebut masih rendah, dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang untuk memeriksakan diri dan juga karena koordinasi untuk pelaporan Rumah Sakit dan Klinik masih kurang sehingga data mengenai pelayanan penyakit belum seluruhnya dilaporkan.

2) Belum terpenuhinya target peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita

Permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kota Denpasar jika dilihat secara umum melalui indikator sudah baik akan tetapi perlu adanya perhatian lebih karena merupakan urusan penting yang termasuk strategis nasional dan global yang akan berdampak besar pada kualitas manusia di masa depan sehingga masih perlu diperhatikan dan diupayakan untuk ditekan kematiannya bahkan tidak ada kematian.

- 3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan
 Belum optimalnya pelayanan kesehatan ditandai dengan
 beberapa cakupan pelayanan kesehatan yang belum
 memenuhi target dan masih kurangnya sarana dan
 prasarana kesehatan.
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang melingkupi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

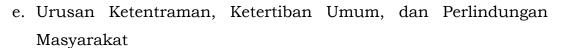
1) Masih rendahnya kualitas jaringan jalan
Keadaan kualitas jalan di Kota Denpasar masih rendah
disebabkan oleh kurangnya kualitas, kuantitas, dan
kapabilitas SDM yang menangani infrastruktur; kurangnya
profesionalisme penyedia barang/jasa; serta kurang tertibnya
pembangunan utilitas jalan dan juga belum seimbangnya
kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan



prasarana jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan.

- 2) Masih kurangnya fasilitas umum lingkungan Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang lainnya adalah masih kurangnya fasilitas umum lingkungan yang dibuktikan dengan masih adanya daerah tergenang; rumah tidak bersanitasi; serta rumah tangga tidak berakses air minum layak yang disebabkan karena pesatnya alih fungsi lahan yang tidak diiringi dengan penataan sistem drainase dan sanitasi yang baik. Hal ini disebabkan dari perilaku masyarakat yang masih banyak membuang sampah ke saluran sehingga menyebabkan saluran tersumbat.
- 3) Semakin berkurangnya sumber air
 Kebutuhan penggunaan air semakin banyak seiring dengan
 semakin bertambahnya penduduk di Kota Denpasar.
 Meskipun pada indikator proporsi rumah tangga dengan
 akses berkelanjutan terhadap air minum layak sudah
 mencapai target, namun belum semua penduduk berakses
 air minum layak yang berkelanjutan.
- 4) Belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang Belum optimalnya penyelenggaraan disebabkan oleh kebutuhan ruang meningkat karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, ada juga tidak memperhatikan ruang terbuka hijau publik sehingga belum optimal dan juga masih kurangnya penataan reklame yang memperhatikan estetika wajah Kota Denpasar karena regulasi untuk penyelenggaraan reklame masih dalam proses revisi.
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan terkait perumahan yang permukiman yang layak dan berkualitas di Kota Denpasar adalah masih adanya permukiman kumuh.



Permasalahan terkait keamanan dan ketertiban yang masih menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya penanganan pelanggaran Perda belum berhasil
 Upaya penanganan pelanggaran Perda belum berhasil
 dibuktikan dengan belum semua pelanggaran Perda
 terselesaikan. Strategi penegakan pelanggaran perda serta
 putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda
 masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera
 dan efektif mengurangi angka pelanggaran Perda.
- 2) Masih Adanya Kasus Konflik Sosial dan SARA

 Masih adanya kasus konflik sosial dan SARA disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, belum optimal dalam mengkondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang, serta kurangnya SDM untuk menangani gangguan. Dampak yang ditimbulkan seperti masih ada masyarakat yang mengkonsumsi narkoba dan prostitusi konflik dan juga belum optimal dalam mengkondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang.
- 3) Belum optimalnya mitigasi bencana
 Kota Denpasar sebagai kota dengan berbagai risiko bencana
 seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dan kebakaran belum
 sepenuhnya optimal dalam melaksanakan mitigasi becana.
 Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya aparatur pemadam
 kebakaran yang memenuhi standar keterampilan dan
 pengetahuan; kurang tersedianya sarana dan prasarana
 kebencanaa; serta belum optimalnya perencanaan mitiasi
 kebencanaan.



f. Urusan Sosial

Permasalahan dalam penanganan dan pemberdayaan PMKS karena jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah dan kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok PMKS belum ekfektif. Berikut permasalahan urusan pelayanan sosial:

- 1) Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah disebabkan karena sistem jaminan sosial masyarakat yang belum berkembang maksimal dan juga belum berjalannya pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, belum didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, belum ada penampungan tuna susila maupun gelandangan dan pengemis yang terkena razia, serta kurangnya tenaga medis (dokter) untuk menangani ODGJ.
- 2) Belum optimalnya Kerja sama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok PMKS disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk penanggulangan dan pencegahan PMKS. Penanggulangan dan pencegahan lebih sering dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar bekerjasama dengan Satpol PP.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan urusan tenaga kerja di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1) Masih Rendahnya SDM yang Berkompetensi dan Bersertifikasi Masih rendahnya SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi menandakan bahwa keterampilan SDM di Kota Denpasar cenderung masih rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya pelatihan pencari kerja.



- 2) Belum Optimalnya Penyerapan Tenaga Kerja Masalah belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di Kota Denpasar terjadi karena:
 - a) Perluasan Kesempatan dan Penempatan Kerja Belum Optimal karena belum optimalnya fungsi dan peran BKK (Bursa Kerja Khusus) dalam penempatan kerja.
 - b) Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan hubungan industrial disebabkan oleh perlindungan tenaga kerja belum memadai, masih adanya kasus pemutusan hubungan industrial, dan belum optimalnya sosialisasi aturan ketenagakerjaan.
 - c) Terbatasnya sistem pengelolaan tenaga kerja disebabkan oleh belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan, belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pekerja dan kelembagaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan belum optimalnya pengelolaan tenaga kerja asing.
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:
 - 1) Masih lemahnya kebijakan yang mengarusutamakan gender dan anak gender merupakan isu yang bersifat multidimensi, yaitu dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang disebabkan karena lemahnya kebijakan yang mengarusutamakan gender dan anak.
 - 2) Masih rendahnya kesadaran gender dalam masyarakat juga menandakan bahwa pemberdayaan gender khususnya perempuan dalam pembangunan belum optimal karena
 - a) Minimnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,
 - b) Minimnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif,
 - c) Minimnya partisipasi angkatan kerja perempuan,
 - d) Rendahnya indeks pemberdayaan gender (idg),



- e) Masih adanya kasus kdrt,
- f) Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- g) Rendahnya cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- h) Rendahnya layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

c. Urusan Pangan

Permasalahan urusan pangan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang Seimbangnya Pola Konsumsi Pangan Kurang seimbangnya pola konsumsi pangan menjadi salah satu penyebab kondisi pangan individu dan rumah tangga di Kota Denpasar belum mencapai titik optimal disebabkan
 - a) Rendahnya ketersediaan pangan
 - b) Rendahnya pola konsumsi pangan
 - c) Kurangnya intervensi pemerintah dalam penyediaan pangan
 - d) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk lumbung pangan keluarga
 - e) Upaya penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.

d. Urusan Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan di Kota Denpasar adalah masih terbatasnya Tata Kelola Pertanahan dan Aset dilihat dari belum semua tanah dan aset daerah terdata dan tersusun informasinya dengan baik dan masih adanya rumah terbangun yang belum memiliki IMB.

e. Urusan Lingkungan Hidup.

Adapun permasalahan urusan lingkungan hidup di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:



- 1) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh penurunan kualitas air, rendahnya kualitas tutupan lahan, menurunnya indeks kualitas udara, dan rendahnya indeks lingkungan hidup.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah ditandai dengan belum optimalnya pengurangan sampah melalui 3 R (reduce, reuse, recycle), belum optimalnya sampah yang tertangani, belum optimalnya peran Kota Denpasar dalam sistem pengelolaan sampah skala regional, dan belum terlaksananya optimalisasi pelaksanaan swakelola untuk kelurahan.
- f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permasalahan urusan administrasi kependudukan pencatatan sipil di Kota Denpasar adalah belum optimalnya pelaksanaan administrasi kependudukan adalah kurang tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat.
- g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:
 - 1) Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan ditandai oleh belum masyarakat optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.
 - 2) Belum maksimalnya kapasitas yang mendukung kemandirian masyarakat disebabkan oleh masih adanya ketidakberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh:
 - a) Masih Terdapat RTM (Rumah Tangga Miskin) di Desa.
 - b) Belum Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan.
 - c) Belum Optimalnya Tingkat Keswadayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa.



- 3) Belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa disebabkan oleh belum optimalnya kapabilitas sumber daya aparatur kelurahan dan desa.
- h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan.

Belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga di Kota Denpasar disebabkan karena belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB, belum optimalnya upaya pengendalian penduduk, belum optimalnya upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, dan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB.

i. Urusan Perhubungan.

Permasalahan terkait perhubungan yaitu:

- 1) Infrastruktur perhubungan kurang mendukung pergerakan masyarakat disebabkan oleh kurangnya fasilitas lalu lintas, rendahnya disiplin masyarakat, serta menurunnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.
- 2) Belum optimalnya layanan angkutan umum di Kota ditunjukkan dengan menurunnya persentase Denpasar layanan angkutan darati dikarenakan jumlah angkutan darat di Kota Denpasar sangat sedikit dan menurunnya arus penumpang.
- j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika antara lain belum maksimalnya pemberdayaan dan pemanfaatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Denpasar.

k. Urusan Koperasi dan UMKM

Permasalahan urusan koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya produktivitas koperasi di Kota Denpasar diindikasikan dengan semakin menurunnya angka koperasi aktif disebabkan oleh tiga hal, yaitu



- 1) jaringan pemasaran koperasi dan UMKM yang terbatas;
- 2) keterbatasan tata kelola UMKM;
- 3) Rendahnya sumber daya pelaku koperasi dan UMKM.

1. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan penanaman modal adalah masih adanya perusahaan yang belum tertib administrasi perizinan, belum adanya peta/informasi potensi investasi yang terbaru dan kurangnya insentif untuk investor, belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan, serta perlambatan investasi akibat kejadian luar biasa.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Denpasar yaitu masih rendahnya cakupan pembinaan pada generasi muda dan atlet muda yang disebabkan oleh masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana olahraga serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan prestasi olahraga.

n. Urusan Statistik.

Permasalahan terkait dengan upaya tersebut adalah belum terintegrasinya sistem data dan statistik yang disebabkan oleh belum semua perangkat daerah melakukan input data pada sistem yang telah tersedia. Hal ini dikarenakan belum semua perangkat daerah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal dan terintegrasi untuk mendukung kinerja layanannya.

o. Urusan Persandian

Kendala yang dihadapi dalam urusan persandian adalah belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah serta belum maksimalnya persandian yang mampu menjamin keamanan informasi di Kota Denpasar.



p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan kebudayaan adalah belum pada urusan optimalnya peran lembaga tradisional seperti

- 1) Pelestarian subak di Kota Denpasar belum optimal, Lembaga perkreditan desa (LPD) belum profesional,
- 2) Belum optimalnya pembinaan Sekaa Teruna dan Kurangnya koordinasi penyelenggaraan administrasi desa adat.
- 3) Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya disebabkan oleh belum optimalnya fungsi tim ahli cagar budaya dalam mengidentifikasi benda cagar budaya dan menetapkan sebagai cagar budaya.
- 4) Kurangnya tata kelola pengembangan kebudayaan disebabkan oleh belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni sebagai data dasar dalam pelestarian kesenian daerah serta belum optimalnya kerjasama Lembaga Kebudayaan Pusat, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan pihak swasta kesenian.
- 5) Belum optimalnya peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah disebabkan oleh belum optimalnya apresiasi terhadap kesenian.

q. Urusan Perpustakaan.

Permasalahan pada urusan perpustakaan adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan disebabkan oleh faktor kualitas sarana dan prasarana perpustakaan serta kualitas SDM perpustakaan yang belum baik.

r. Urusan Kearsipan

Permasalahan pada urusan kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku disebabkan oleh masih rendahnya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku serta masih rendahnya kualitas dan prasarana kearsipan.



3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pariwisata

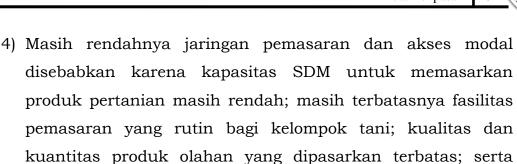
Permasalahan pada urusan pariwisata adalah

- Pemasaran atau promosi belum optimal disebabkan oleh kurangnya inovasi pemasaran, masih kurangnya jaringan kerjasama, serta belum optimalnya akurasi data.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Tujuan Wisata (alam, budaya, spiritual, buatan dan minat khusus) disebabkan oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana DTW kurang dan belum optimalnya dukungan regulasi terkait retribusi DTW.
- 3) Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata disebabkan oleh belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan karena belum optimalnya pembinaan usaha pariwisata (akomodasi, makan dan minum, serta rekreasi dan hiburan).
- 4) Adanya kejadian luar biasa yaitu pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 turut memberi dampak pada sektor pariwisata Kota Denpasar.

b. Urusan Pertanian.

Permasalahan yang terkait dengan urusan pertanian adalah

- Belum memadainya infrastruktur pertanian disebabkan karena masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) yang rusak.
- 2) Masih kurangnya pembinaan dan penerapan teknologi untuk pertanian yang mendukung kepariwisataan disebabkan oleh dua aspek yaitu pembinaan pertanian dan penerapan teknologi pertanian yang masih kurang.
- 3) Berkurangnya luas lahan pertanian baik tanaman pangan dan hortikultura karena pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang kurang ketat.



c. Urusan Perdagangan

Permasalahan pada urusan perdagangan di Kota Denpasar sebagai berikut:

- 1) Belum terpenuhinya standarisasi sarana distribusi perdagangan dan produk kualitas ekspor;
- 2) Jejaring pemasaran belum optimal;

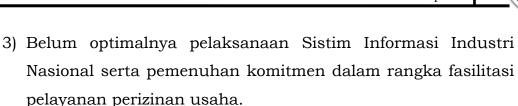
masih sedikitnya kelompok tani.

- 3) Kemampuan untuk mengakses permodalan terbatas karena pelaku IKM/UKM belum mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman;
- 4) Rendahnya SDM dalam pengelolaan manajemen keuangan dan bisnis;
- 5) Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen;
- 6) Belum optimalnya koordinasi dalam hal pengendalian harga bahan pokok;
- 7) Belum optimalnya pengawasan terhadap regulasi perdagangan.

d. Urusan Perindustrian

Permasalahan pada urusan perindustrian, yaitu:

- Belum optimalnya pengembangan sektor industri kecil dan menengah;
- 2) Koordinasi antar instansi terkait belum optimal dalam pembinaan IKM yang meliputi pembinaan untuk mutu produk, fasilitasi kerjasama dan kemitraan serta promosi produk unggulan;



e. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan adalah belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan (sumber protein) disebabkan oleh rendahnya minat dalam mengkonsumsi ikan dan rendahnya ketersediaan dan kebutuhan produk perikanan lokal.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - Permasalahan urusan perencanaan dan pembangunan Kota Denpasar yaitu
 - 1) Belum terintegrasinya perencanaan sektoral ditunjukkan dari belum optimalnya kesinambungan antara RPJMD, RKPD, dan APBD disebabkan karena belum semua program RKPD dapat dilaksanakan semua sesuai jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan.
 - 2) Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja dikarenakan belum jelasnya *outcome* pada dokumen perencanaan dan belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

b. Urusan Keuangan

Permasalahan terkait urusan keuangan yaitu belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah terjadi karena penyusunan anggaran dalam APBD yang belum optimal yang disebabkan oleh dua hal, yaitu kualitas SDM pengelola keuangan yang belum sesuai dengan beban tugas serta kurangnya kualitas dan kuantitas sarana pendukung keuangan daerah.



- c. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan kepelatihan di Kota Denpasar adalah
 - 1) Rendahnya kualitas dikarenakan oleh rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/formal dan struktural dan manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
 - 2) Rendahnya kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN) disebabkan masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah mengenai kebutuhan jabatan serta adanya pejabat yang pensiun sedangkan proses pengangkatan tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- d. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada urusan penelitian dan pengembangan (litbang) di Kota Denpasar adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan yang disebabkan oleh belum tersedianya tenaga fungsional peneliti dan perekayasa di Kota Denpasar.

e. Urusan Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kota Denpasar, masih menghadapi permasalahan terkait rendahnya tingkat pengawasan dikarenakan belum optimalnya kualitas dan kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah). Tingkat kedisiplinan ASN yang masih rendah ditunjukkan dari ditemukannya beberapa kasus pelanggaran ASN atau pegawai.

f. Urusan Administrasi Pemerintahan

Permasalahan, yaitu belum optimalnya fungsi sekretariat dewan disebabkan oleh masih kurangnya kualitas SDM sekretariat dalam memberikan dukungan dan pelayanan publik serta belum optimalnya sekretariat dewan dalam menfasilitasi kontribusi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan daerah di DPRD.



Penetapan Isu Strategis

Setelah melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi Kota Denpasar dari berbagai aspek pembangunan, maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Denpasar 2021-2025. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu dan arah kebijakan yang sudah disampaikan di atas, serta mempertimbangkan kriteria yang yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 7 (tujuh) isu strategis Kota Denpasar yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam rencana pembangunan Kota Denpasar selama kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

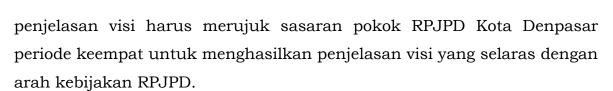
- 1. Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata
- 2. Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing
- 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul
- 4. Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal
- 5. Kelestarian Lingkungan Hidup
- 6. Tata Kelola Pemerintahan
- 7. Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa

B. Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

1. Visi Pemerintah Kota Denpasar

"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut. Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokokpokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikatorindikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan



Visi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 dimaknai sebagai "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" dengan pelaksanaan pola pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan 'Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju". Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru mengandung makna bahwa "menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945".

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai "Denpasar kota hidup", yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan; dinamika kultur bersandar pada keseimbangan; dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

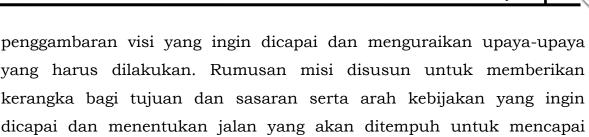
Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara kesimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, disertai dengan implementasi industri kreatif berbasis budaya secara sistematis, partisipatif, demokratis, humanis, dan berkelanjutan (sustainable), Purradhipa Bhara Bhawana yang diartikan Kewajiban Pemerintah meningkatkan Kemakmuran Rakyat menjadi slogan bersama menuju Denpasar maju.

Makna Krama (manusia) Bali sebagai kreator diharapkan tetap dijaga dan mampu memahami konsep pembangunan secara utuh dan operasional, tentang kota kreatif, industri kreatif, ekonomi kreatif, dan kebudayaan Bali yang cocok dengan kontekstual masyarakat Denpasar. Adapun sains tekno-ekonomi sebagai energi kebudayaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan kompetitif dalam rangka menata keberadaan, perkembangan, dan persebaran unsur-unsur budaya sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan.

Lingkungan sebagai habitat kebudayaan mesti terjaga berkelanjutan pada kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan dalam habitat urban. Sementara itu, organisasi sosial tradisional wadah kebudayaan didesain sebagai tetap mampu mengimbangi semakin terbukanya beragam peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi, dan sains. Agama sebagai roh dan jiwa kebudayaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial diposisikan menjadi inti dan titik tumpu perkembangan masyarakat.

2. Misi Pemerintah Kota Denpasar

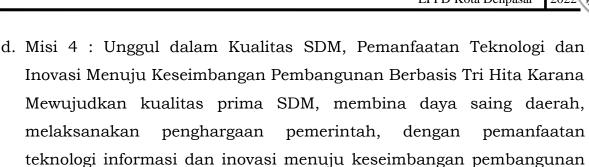
Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan



Visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2021–2026 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

misi.

- a. Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan Masyarakat Denpasar makmur dimaknai sebagai membangun manusia yang sehat; pintar; untuk dapat bekerja, menerima pendapatan dan berkecukupan. Makmur juga dimaknai masyarakat tidak miskin, memiliki rumah layak huni, dengan pembinaan ekonomi lokal berbasis budaya.
- b. Misi 2: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana Mewujudkan ketertiban masyarakat dan keamanan bersama, mengupayakan ketahanan pangan dan keselamatan dari bencana. Urban farming didukung dengan ketersediaan sumber air dan integrasi beberapa pelayanan dasar merupakan bentuk upaya ketahanan pangan Denpasar.
- c. Misi 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
 - Tata kelola pemerintahan diwujudkan dengan memelihara spirit sewakadharma (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya menyelenggarakan pembinaan potensi PAD, efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan membina jiwa korsa dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintahan.



- e. Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.
 - Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Denpasar yang berkarakter dan bermoral. Upaya memelihara dan mengaktualisasikan warisan budaya, membina kegiatan ekspresi budaya, serta memasarkan kebudayaan untuk mewujudkan perkuatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat.

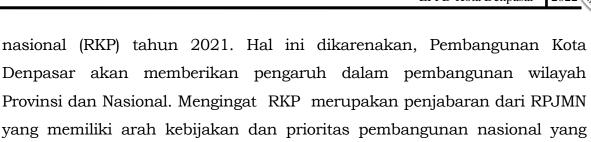
Visi dan misi dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 selaras dengan visi misi yang tertuang dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025. Rumusan visi jangka menengah Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju tidak terlepas dari visi jangka panjang Denpasar Kota Berbudaya Berlandaskan Tri Hita Karana. Berikut keterkaitan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2026 dengan visi misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memiliki keselarasan dengan rumusan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

C. Program Pembangunan Daerah

berbasis Tri Hita Karana

Dalam penyusunan RKPD Kota Denpasar tahun 2021 ini selain harus memedomani dokumen perencanaan RPJMN tetapi juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan Provinsi Bali (RKPD 2021) dan



Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas.

lebih spesifik dari pada RPJMN. Tema RKP tahun 2021 adalah

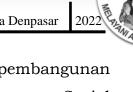
Terjadinya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi Kota Denpasar, di semua sektor kehidupan khususnya sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Denpasar mengeluarkan kebijakan seperti yang dituangkan dalam Instruksi No. 443/003/Satgas *Covid-19*/2020 Walikota Denpasar Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Kota Denpasar, yaitu upaya menanggulangi pandemi Covid-19 secara garis besar dilakukan dengan:

- 1. Promotif, dengan meningkatkan kesehatan masyarakat
- 2. Preventif yaitu menghindari masalah kesehatan
- 3. Kuratif, yaitu mencegah agar tidak menjadi parah

Dan sebagai upaya melakukan akselerasi penanggulangan kasus, Kota Denpasar melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) berbasis Desa, Kelurahan dan Desa Adat yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

Dampak jangka panjang yang harus dihadapi Kota Denpasar akibat adnya pandemi *Covid-19* selain di sektor kesehatan yaitu terpuruknya perekonomian Kota Denpasar. Sektor pariwisata yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mengalami pukulan terbesar akibat ditutupnya berbagai tempat wisata dan penurunan jumlah kedatangan turis terutama turis mancanegara ke Bali akibat pandemi yang melanda seluruh dunia.

Sebagai upaya menangani pandemi *Covid-19* beserta dampaknya di berbagai sektor kehidupan, Kota Denpasar memiliki strategi penanganan



di tahun 2021 yang secara umum tertuang dalam tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021 yaitu "Memperkuat Pembangunan Sosial untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi".

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar 5 diselaraskan untuk mendukung pencapaian (lima) prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Denpasar akibat terjadinya pandemi Covid-19 dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Sosial dan Ketenagakerjaan
- 4. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
- 5. Infrastruktur

Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Adapun program pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2021 secara terinci seperti dibawah ini:

Tabel 1.17 Program Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NO	NAMA PROGRAM
1.	PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Pendidikan
		3	Program Pengembangan Kurikulum
		4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan



PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2 3 4 5 1 2 3	Daerah Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
DAN PENATAAN	3 4 5 1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DAN PENATAAN	5 1 2	Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DAN PENATAAN	5 1 2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DAN PENATAAN	5	Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DAN PENATAAN	5	Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DAN PENATAAN	1 2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DAN PENATAAN	1 2	Resehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DAN PENATAAN	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DAN PENATAAN	2	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DAN PENATAAN	2	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	3	
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
		Penyediaan Air Minum
	4	Program Pengembangan Sistem Dan
		Pengelolaan Persampahan Regional
	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan
		Sistem Air Limbah
	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan
	7	Sistem Drainas
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan
	9	Lingkungannya
	10	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
DAN KAWASAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2	Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan
		Permukiman Kumuh
	4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
	5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak
		Mha Yang Terkait Dengan Pplh
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
	7	Program Pengelolaan Tanah Kosong
	8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
RADAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
PENANGGULANGAN	1	Daerah Kabupaten/Kota
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	Program Penanggulangan Bencana
SATUAN POLISI	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	PERMUKIMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 3 4 5 6 7 8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 SATUAN POLISI 1



		2	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
		3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
8	SOSIAL	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		2	Program Pemberdayaan Sosial	
		3	Program Rehabilitasi Sosial	
		4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		5	Program Penanganan Bencana	
9.	TENAGA KERJA	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	
		_	Daerah Kabupaten/Kota	
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas	
			Tenaga Kerja	
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	
		4	Program Hubungan Industrial	
10	DEMDEDDAYAAN	1	December 11 and	
10.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	
	PERLINDUNGAN ANAK,	2	Daerah Kabupaten/Kota Program Perlindungan Perempuan	
	PENGENDALIAN	3	Program Perlindungan Khusus Anak	
	PENDUDUK DAN	4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	
	KELUARGA	5	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	
	BERENCANA	3	Keluarga Sejahtera (Ks)	
11.	PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
12.	LINGKUNGAN HIDUP	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	
			Daerah Kabupaten/Kota	
		2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		4	Program Pengelolaan Persampahan	
13.	KEPENDUDUKAN DAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	
	PENCATATAN SIPIL		Daerah Kabupaten/Kota	



	T		D D 1 C D 1 1 1
		2	Program Pendaftaran Penduduk
		3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi
			Kependudukan
14.	PEMBERDAYAAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	MASYARAKAT DAN		Daerah Kabupaten/Kota
	DESA		,
		2	Program Peningkatan Kerjasama Desa
		3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		4	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		7	Trogram Administrasi Femerintahan Desa
1 5.	PERHUBUNGAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
10.	IERHODONGAN	1	Daerah Kabupaten/Kota
		0	
		2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
			Angkutan Jalan (LLAJ)
		3	Program Pengelolaan Pelayaran
10	WORKINIWA CI DAN	1	Durania Dania i da Harra Dania i da la constitución de la constitución
1 6.	KOMUNIKASI DAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	INFORMASI	-	Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Informasi dan Komunikasi Publik
		3	Program Aplikasi Informatika
		4	Program Penyelenggaraan Persandian
			Untuk Pengamanan Informasi
			Ontak i engamanan imormasi
17.	KOPERASI, USAHA	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
17.		1	
	MIKRO KECIL DAN		Daerah Kabupaten/Kota
	MENENGAH		
		2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP
			Koperasi
		3	Program Pendidikan dan Latihan
			Perkoperasian
1 8.	DAN PELAYANAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	TERPADU SATU PINTU		Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengembangan Iklim Penanaman
			Modal
		3	Program Pelayanan Penanaman Modal
		4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
			Modal
		5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
			Penanaman Modal
19.	KEBUDAYAAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
ıЭ.	REBUDATAM	1	
		0	Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengembangan Kebudayaan
		3	Program Pengelolaan Permuseuman
	DDDDIGMATTA	1	
20.	PERPUSTAKAANDAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	KEARSIPAN		Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Arsip
	1		
21.	PARIWISATA	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
21.	PARIWISATA	1	
21.	PARIWISATA	1 2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi



		1 _	T
		3	Program Pemasaran Pariwisata
		4	Program Pengembangan Sumber Daya
			Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
22 .	PERTANIAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyediaan Dan Pengembangan
			Sarana Pertanian
		3	Program Penyediaan Dan Pengembangan
			Prasarana Pertanian
		4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan
			Kesehatan Masyarakat Veteriner
		5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan
			Bencana Pertanian
		6	Program Penyuluhan Pertanian
23.	PERINDUSTRIAN DAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
4 3.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Daerah Kabupaten/Kota
	FERDAGANGAN	0	
		2	Program Peningkatan Sarana Distribusi
		2	Perdagangan
		3	Program Pengembangan Ekspor
		4	Program Standardisasi Dan Perlindungan
			Konsumen
		5	Program Perencanaan Dan Pembangunan
			Industri
24	THE PRIME A PART	-	D D : II D : II
24.	INSPEKTORAT	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan
			Dan Asistensi
25.	PERENCANAAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	PEMBANGUNAN		Daerah Kabupaten/Kota
	DAERAH		
		2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan
			Evaluasi Pembangunan Daerah
26.	PENGELOLAAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	KEUANGAN DAN ASET		Daerah Kabupaten/Kota
	DAERAH		
		2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
27.	KEPEGAWAIAN DAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	PENGEMBANGAN		Daerah Kabupaten/Kota
	SUMBER DAYA		
	MANUSIA		
		2	Program Kepegawaian Daerah
		3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
28.	PENELITIAN DAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
28.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
28.			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah



29.	SEKRETARIAT	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	DAERAH		Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan
			Rakyat
		3	Program Perekonomian Dan Pembangunan
30.	SEKRETARIAT DPRD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
			Fungsi DPRD
31.	KECAMATAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan
			Pelayanan Publik
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan
			Kelurahan
		4	Program Koordinasi Ketentraman Dan
			Ketertiban Umum
		5	Program Pembinaan Dan Pengawasan
			Pemerintahan Desa

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

Adapun kegiatan pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2021 secara terinci seperti dibawah ini:

Tabel 1.18 Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

NO	NAMA URUSAN	NO	NAMA KEGIATAN
1.	PENDIDIKAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
			Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		9	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		10	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		11	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang
			Diselenggarakan oleh Masyarakat
		12	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
			Kabupaten/Kota
		13	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		14	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
			Kepramukaan



2.	KESEHATAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	RESERVAN	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
		3	Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
		_	Pemerintahan Daerah
		5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
		3	dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
		0	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		7	
		′	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
		0	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		8	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
			Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
		0	di Wilayah Kabupaten/Kota
		9	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
			Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
		10	Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan
		11	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		11	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
			Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
			Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		12	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
		14	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,
			Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		13	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan
		10	dan Sentra Makanan Jajanan
		14	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post
			Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman
			Industri Rumah Tangga
		15	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran
			serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
			Kabupaten/Kota
		16	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
			Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
			Kabupaten/Kota
			1 /
3.	PEKERJAAN UMUM	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
	DAN PENATAAN RUANG		Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



			Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
			Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
			Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
			Kabupaten/Kota
		9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
			Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di
			Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
			Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
			Kabupaten/Kota
		13	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di
			Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		14	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
			Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
			Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
			Gedung
		15	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			di Daerah Kabupaten/Kota
		16	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		17	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non
			Kecil dan Kecil)
		18	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan
			dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		19	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
			Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
			Kabupaten/Kota
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
			Kawasan Permukiman
		6	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
			Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
	I .		



		1	
			(sepuluh) Ha
		7	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		8	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		9	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,
			Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait
			dengan PPLH
		10	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah
			Kabupaten/Kota
		11	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
		12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		12	Tengerotaan nearestatagaman nayati nabapaten/nota
5.	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		0	
		9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
			Bencana
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
			Kebakaran
		6	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan
			Peraturan Bupati/Wali Kota
7.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
		J	Tememataan Darang mink Dacran Tenunjang Olusan



			Pemerintahan Daerah
8.	SOSIAL	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		5	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
			Daerah Kabupaten/Kota
		6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		7	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
			Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
			HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		8	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
			Kabupaten/Kota
		9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
			Sosial Kabupaten/Kota
9.	TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	IIOMI DI DITOI	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		3	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		4	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
		5	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		6	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di
			Daerah Kabupaten/Kota
		7	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		0	
		8	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang
			hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
			Kabupaten/Kota
			naoapaton/nota
9.	PEMBERDAYAAN	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	PEREMPUAN DAN	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
	PERLINDUNGAN ANAK,		Daerah
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	KELUARGA BERENCANA	4	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		5	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
			Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi
			Kewenangan Kabupaten/Kota
		6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia



	Ī		T D 1' 1 D M' 1 (D 1
			Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		7	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
			Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
			Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
			sesuai Kearifan Budaya Lokal
		9	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat
			dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan
			KB di Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta
		10	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
			Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
			Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		11	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui
			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Tomomani netananan dan nebejanterdan neradiga
10.	PANGAN	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan
			Kabupaten/Kota
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		6	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,
			Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
			dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/
			Kota
		7	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah
			Kabupaten/Kota
		8	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		9	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
11.	LINGKUNGAN	1	Administraci Kayangan Barangkat Dacrah
11.	HIDUP	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		6	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
			Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		'	Kabupaten/Kota
		8	Pengelolaan Sampah
	<u> </u>	l o	1 chischolaan bampan



12.	KEPENDUDUKAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
	DAN PENCATATAN SIPIL		Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		8	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		9	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		10	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
13.	PEMBERDAYAAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.	MASYARAKAT DAN DESA	1	Administrasi Kedangan Ferangkat Daeran
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		6	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
		7	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
			Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
			Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
			Administrasi Pemerintahan Desa
14.	PERHUBUNGAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
			Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
		′	
		0	Kabupaten/Kota
		8	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		9	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		10	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
			untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota



 L	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	11		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkuta	12		
	Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)			
•	Daerah Kabupaten/Kota			
dan	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan	13		
	Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	KOMUNIKASI DAN NFORMASI	15.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4		
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
can oleh	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan	5		
)	Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup			
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
tah Daerah	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah	6		
	Kabupaten/Kota			
an	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	7		
l .	Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	16.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2		
usan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintah Daerah	3		
ıhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4		
Urusan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uru Pemerintahan Daerah	5		
Unit	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Uni	6		
	Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaa			
J	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
 operasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koper	7		
-	yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah			
	Kabupaten/Kota			
	Administraci Voyangan Baranglast Daggal	1		17
				17.
hon			PELAYANAN	
uiaii	, ,	3	TERPADU SATU	
Hruson		1	PINTU	
orusan	_			
Kota		5		
	- :			
_	-			
iciijaui				
vang		7		
Urus Kota Terpa nenjao	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uru Pemerintahan Daerah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Tersatu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menja Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	1 2 3 4 5 6	TERPADU SATU	17.



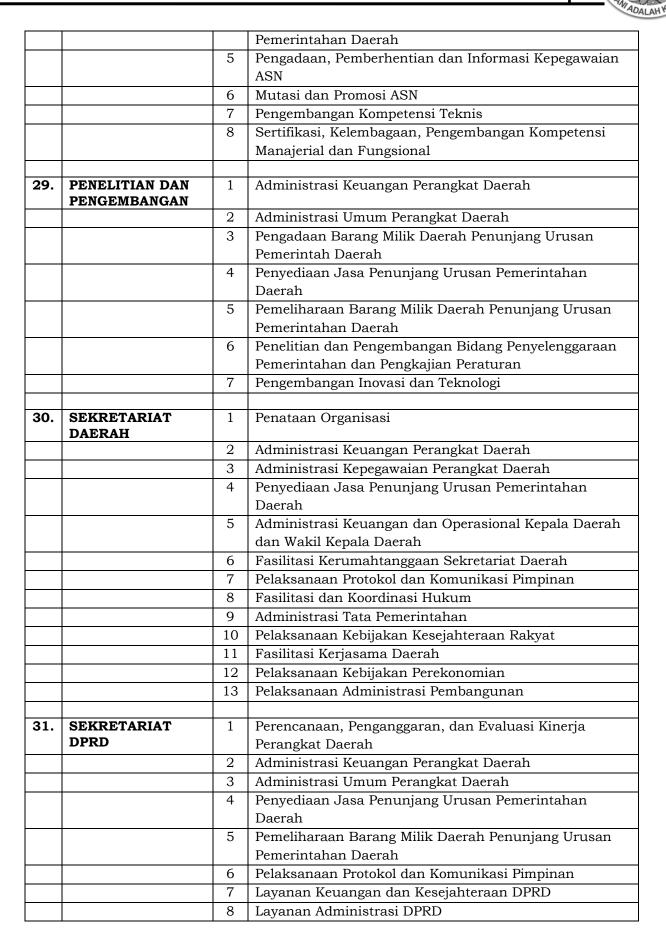
			menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
			Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah
			Kabupaten/Kota
18.	KEBUDAYAAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		6	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya
			dalam Daerah Kabupaten/Kota
		7	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat
			Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam
			Daerah Kabupaten/Kota
		9	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
19.	PERPUSTAKAAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
			Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
20.	PARIWISATA	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
		_	
			Daerah
		4	Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4 5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		4 5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
		5 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		4 5 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya
		4 5 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
		4 5 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		4 5 6 7 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
22.	PERTANIAN	4 5 6 7 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
22.	PERTANIAN	4 5 6 7 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
22.	PERTANIAN	4 5 6 7 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar



		9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	
		8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Daerah	
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	
		'	Pemerintah Daerah	
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
24.	INSPEKTORAT	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
04	INCREUTODAT	1	Administraci Voyangan Danaz alast Danas	
			Industri Kabupaten/Kota	
		9	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	
			Pemerintahan Daerah	
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	
			Daerah	
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	
			Pemerintah Daerah	
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		4	dan Pengawasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		3	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,	
			yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
		2	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran	
	DAN PERDAGANGAN		Perdagangan	
23.	PERINDUSTRIAN	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	
		11	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Kabupaten/Kota	
		10	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		9	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan	
		8	Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan	
		7	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan	
		6	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Pemerintahan Daerah	
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	
		"	Daerah	
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	



25. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 6 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 7 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan S (Sumber Daya Alam) 9 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 8 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 9 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 10 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 11 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
			-		
		Ů	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
		7			
		8	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
		9			
26.	PENDAPATAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		2			
		3	Pemerintah Daerah		
		4	Daerah		
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
27.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	-	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		
			Pemerintah Daerah		
		5			
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		
		7	 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daera 		
		(Sumber Daya Alam) 9 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur di Kewilayahan 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urupemerintah Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Upemerintahan Daerah 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kine Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urupemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Pengeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Upemerintahan Daerah 7 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Roordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 8 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 10 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Ke Daerah 11 Pengelolaan Barang Milik Daerah 11 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
		10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan		
		11			
28.	KEPEGAWAIAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	DAN	2			
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	MANUSIA				



			All
		9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		10	Pembahasan Kebijakan Anggaran
		11	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		12	Peningkatan Kapasitas DPRD
		13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		14	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		15	Fasilitasi Tugas DPRD
	77770437477477		
32.	KECAMATAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintah Daerah
		6	Penataan Organisasi
		7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
			Tingkat Kecamatan
		8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan
			kepada Camat
		9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		11	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
			dan Peraturan Kepala Daerah

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter

Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

12

13

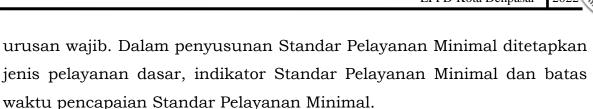
Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akutanbel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kebangsaan

Standar Pelayanan Minimal (selanjutnya disingkat SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu



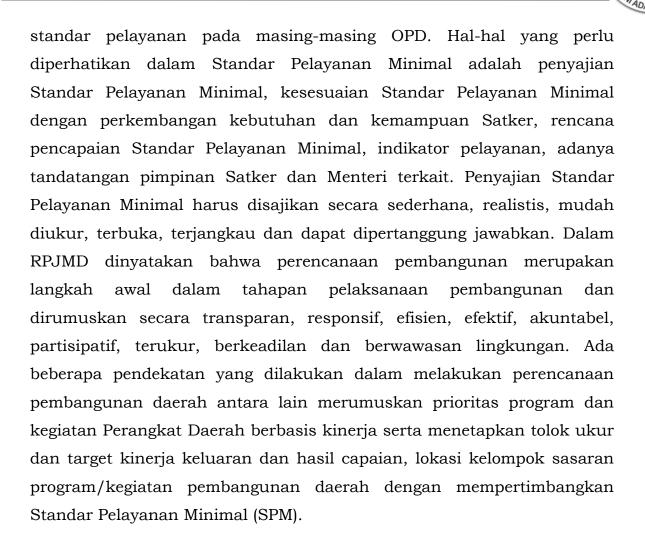
Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sebagai sebuah kebijakan yang baru diperkenalkan, standar pelayanan minimal sudah selayaknya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri terkait. Di sisi lain sebagai sebuah kebijakan baru, standar pelayanan minimal sedang dalam proses pencarian bentuk dan sosialisasi yang membutuhkan waktu tidak sedikit, mengingat perlunya kesamaan pemahaman antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan, terlebih lagi seringnya terjadi proses penyesuaian kebijakan yang disebabkan oleh dinamika masyarakat yang menjadi obyek kebijakan. Nilai strategis Standar Pelayanan Minimal yaitu: Pertama, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur (Benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan; Kedua, bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah). Dengan demikian pelayanan yang bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan



Standar Pelayanan Minimal juga diposisikan untuk menjawab isuisu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Denpasar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan Standar Pelayanan Minimal juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

- 1. Kemampuan masing-masing Daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- 2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur Standar Pelayanan Minimal yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Standar pelayanan minimal merupakan salah satu kebijakan umum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dimana peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dengan menerapkan



B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan



- Minimal Bidang Kesehatan (sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (sebagaimana telah mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464).
- 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembar Daerah Kota Denpasar Nomor 1)
- 14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- 16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021;
- 17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2022;
- 19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021;
- 20. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 (Ranperda);
- 21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
- 22. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 23. Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/155/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.



C. Kebijakan Umum

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Denpasar melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing – masing misi berdasarkan pendekatan urusan wajib maupun urusan pilihan. tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing - masing Urusan Pelayanan Dasar. Rumusan strategi dan Arah Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan.

Tabel 1.19
Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan
Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju							
Misi 1 : Men	Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui						
Peningkatan K	ualitas Pelayan	an Pendidikan, Kesel	hatan dan Pendapatan				
Masyarakat yan	g Berkeadilan						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan	Meningkatkan				
kemakmuran	kualitas	kuantitas dan kualitas	aksesibilitas pendidikan				
masyarakat	pelayanan	sarana prasarana					
Kota Denpasar	pendidikan	pendidikan					
			Meningkatkan kualitas				
			bangunan sekolah yang				
			kurang layak				
		Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas				
		dan kuantitas tenaga	dan kuantitas tenaga				

pendidik	pendidik dan kependidikan yang professional
	Pemberian penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi jenjang SD dan SMP

Tabel 1.20 Integrasi SPM Bidang Pendidikan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2021

Prioritas Kota Denpasar	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan lama sekolah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasana pendidikan	 Meningkatkan aksebilitas pendidikan Meningkatkan kualitas bangunan sekolah yang kurang layak
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	 Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang professional Pemberian penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi jenjang SD dan SMP

2. Urusan Kesehatan

Tabel 1.21 Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju						
	Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui					
_		an Pendidikan, Kes	ehatan dan Pendapatan			
Masyarakat yan	g Berkeadilan	<u></u>				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan	Meningkatkan kesadaran			
kemakmuran	kualitas	upaya preventif dan	masyarakat dan keluarga			
masyarakat	pelayanan	promotif dalam	serta keterlibatan para			
Kota Denpasar	kesehatan	rangka mencegah	pemangku kepentingan			
		penyakit menular	dalam menggiatkan			
		dan tidak menular	perilaku hidup bersih			
			dan sehat serta			
			penyehatan lingkungan			
			Menjalin kemitraan			
			antara pemerintah,			
			masyarakat dan swasta			
			dalam penyelenggaraan			
			pelayanan kesehatan			

	penyelenggaraan pelayanan kesehatan
Meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, dan balita
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit
	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
	Standarisasi industri kesehatan, makanan dan minuman

3. Urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 1.22

Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Visi : Kota I	Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju				
Misi 2 : Menjaga	Stabilitas Keamar	nan dengan Terkendalir	nya Kamtibmas, Ketahanan		
Pangan, dan Kes	iapsiagaan Benca	na			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Meningkatkan kesiapan pelaksana penegakan perda	Meningkatkan penanganan setiap pelanggaran perda		
			Meningkatan penegakan produk hukum daerah		

Tabel 1.23 Integrasi SPM Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Ke Dalam Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021

Prioritas Kota Denpasar	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	Meningkatkan kesiapan pelaksana penegakan perda	 Meningkatkan penanganan setiap pelanggaran perda Meningkatan penegakan produk hukum daerah



4. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 1.24 Integrasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021

Prioritas Kota	Indikator Kinerja	Strategi Penerapan	Arah Kebijakan
Denpasar	Utama	SPM	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	1)Berkoodinasi dengan pihak Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma untuk pembangunan Reservoar dibeberapa titik rawan air bersih di Kota Denpasar sebagai tampungan cadangan air. 2)Mengoptimalkan pasokan air baku melalui kerjasama Regional SARBAGITA untuk Denpasar Barat melalui suplai dari IPA Penet di Kabupaten Badung dan Denpasar Timur melalui suplai air minum dari IPA Petanu di Kabupaten Gianyar. 3) Mengoptimalkan Dana DAK dari Kementrian dalam program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tercapainya Universal Akses 100 % Air Minum Aman pada Tahun 2030 dim Kota Denpasar melalui Jaringa Pipa Terlindungi sebagai pelayanan dasar dan prioritas nasional



5. Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 1.25 Integrasi SPM Bidang Perumahan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Denpasar Tahun 2021

Prioritas Kota Denpasar	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni yang terbangun	Meningkatkan upaya kualitas pelayanan perumahan yang layak huni	Meningkatkan kualitas rumah yang layak huni

6. Urusan Sosial

Tabel 1.26 Integrasi SPM Bidang Sosial Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2021

Prioritas Kota Denpasar	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM		Arah Kebijakan
Rehabilitasi	Persentase (%)	Mengurangi	1.	Penguatan potensi
Sosial Dasar	Penanganan	pengeluaran		dan sumber
Penyandang	Pemerlu	masyarakat		kesejahteraan
Disabilitas	Pelayanan	miskin		sosial
Terlantar, Anak	Kesejahteraan		2.	pemenuhan
Terlantar, Lanjut	Sosial (PPKS)			Rehabilitasi Sosial
Usia Terlantar,			3.	Penguatan
Serta				Perlindungan
Gelandangan				Sosial
Pengemis di Luar			4.	Penyediaan Rumah
Panti Sosial				Layak Huni



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi targettarget kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas pencapaian keseimbangan harga, tenaga keria dan neraca yang berkesinambungan. Meskipun ekonomi makro merupakan bidang pembelajaran yang luas, ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini: kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek (siklus bisnis), dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang (peningkatan pendapatan nasional). Model makro ekonomi yang ada dan prediksi-prediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis. Adapun Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	83.93	84.03	0.119
2	Angka Kemiskinan	2.14	2.96	38.318
3	Angka Pengangguran	7.62	7.02	-7.874
4	Pertumbuhan Ekonomi	-9.43	-0.91	90.35
5	Pendapatan Per kapita	45,083,18	44,656,07	-0.947
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.330	0.375	13.602

Sumber: BPS Provinsi Bali dan Kota Denpasar 2022



1. Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah tujuan utama dari pembangunan. Berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan dapat dilihat dari bagaimana hasil pembangunan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari ratarata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia di Kota Denpasar menunjukkan nilai yang tertinggi di Provinsi Bali. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar telah mencapai angka 84.03 meningkat 0.1 dari angka Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2020 yang mencapai 83.93. Capaian Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2021 ini menempatkan posisi Kota Denpasar sebagai yang tertinggi di Provinsi Bali sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum tingkat



kesejahteraan masyarakat Denpasar relatif lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya di Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Denpasar dapat dilihat dalam gambar berikut:

84,2 84 83,8 83,6 83,4 83,2 83 82,8 82,6 82,4 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 2.1
Perkembangan IPM di Kota Denpasar
Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2022

Indeks Pembangunan Manusia memberikan suatu ukuran gabungan empat dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan: Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari angka harapan hidup); (2). Indeks pendidikan: Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); dan (3). Indeks daya beli: Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

Rata-rata lama sekolah

Selama dua tahun terakhir rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 mencapai 11.48 mengalami kenaikan 0.01 Point (lebih tinggi dari tahun 2020 mencapai 11,47). Meningkatnya rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. Hal ini juga didukung meningkatnya angka partisipasi pada semua kelompok usia sekolah, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang memutuskan



untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang usianya.

Harapan Lama Sekolah Harapan

Lama sekolah penduduk Denpasar selama kurun waktu lima tahun ini terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 mencapai 14,09 % yang mengalami kenaikan 0,09 Point dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai 14,00 %.

Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH), sebagai salah satu indikator penting bidang kesehatan yang menentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup adalah lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan, angka harapan hidup digolongkan mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Usia harapan hidup di Kota Denpasar mengalami peningkatan 0,11 point dimana pada tahun 2020 mencapai 74,82 dan pada tahun 2021 mencapai 74,93. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat meningkat. adalah diperlukan perbaikan sanitasi lingkungan, Upaya yang peningkatan kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat dan pengobatan dengan cara medik secara langsung untuk memperpanjang usia hidup masyarakat.

2. Angka Kemiskinan

Berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang belum terselesaikan dan masih terus dicari solusinya oleh hampir seluruh daerah termasuk Kota Denpasar. Bila dikaji lebih jauh mengenai penyebab terjadinya kemiskinan, maka akan melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Selama dua tahun terakhir, prosentase penduduk miskin di



Denpasar menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin naik menjadi 20.480 dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 618.064 dengan persentase sebesar 2,14% dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 29.410 dengan garis kemiskinan sebesar Rp.662.499 dengan persentase sebesar 2,96%. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan belum dapat diatasi secara tuntas, akan tetapi Kota Denpasar telah mampu meminimalisir jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi kemiskinan di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase
Penduduk Miskin Kota Denpasar Tahun 2020-2021

Uraian	2020	2021	
Garis Kemiskinan	618.064	662.499	
Jumlah Penduduk Miskin ("000)	20.480	29.410	
Prosentase Penduduk Miskin	2,14	2,96	

Sumber: BPS Provinsi Bali 2022

3) Angka Pengangguran

Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Angkatan kerja hanya memasukan pekerja yang aktif mencari kerja. Orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan atau yang tidak mendapat dukungan mencari kerja karena ketiadaan prospek kerja, tidaklah termasuk di dalam angkatan kerja.

Pengangguran sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tipe yang semuanya berkaitan dengan sebab-sebab yang berbeda pula. Pengangguran klasikal terjadi ketika gaji karyawan terlalu tinggi sehingga pengusaha tidak berani memperkerjakan karyawan lebih dari yang sudah ada. Gaji bisa menjadi terlalu tinggi karena peraturan upah minimum atau adanya aktivitas serikat pekerja. Sama halnya dengan pengangguran klasikal, pengangguran friksional terjadi apabila ada lowongan pekerjaan



untuk pekerja tetapi waktu untuk mencarinya menyebabkan adanya periode di mana si pekerja tersebut menjadi pengangguran.

struktural meliputi beberapa ienis Pengangguran penyebab pengangguran termasuk ketidakcocokan antara kemampuan pekerja dan kemampuan yang dicari oleh pekerjaan yang ada. Pengangguran besarbesaran bisa terjadi ketika sebuah ekonomi mengalami masa transisi dan kemampuan para pekerja menjadi industri tak terpakai. Pengangguran struktural itu juga cukup mirip dengan pengangguran friksional dua-duanya berkutat karena pada permasalahan ketidakcocokan kemampuan pekerja dengan lowongan pekerjaan, tetapi pengangguran struktural berbeda karena meliputi juga kebutuhan untuk menambah kemampuan diri, tidak hanya proses pencarian jangka pendek.

Selama 2 tahun terakhir, angka pengangguran di Denpasar pada 2020 sebesar 7,62 dan menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2021 sebesar 7,02. Ini menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kota Denpasar belum dapat diatasi secara tuntas apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini, yang menyebabkan banyak perusahaan mem PHK pegawainya, akan tetapi Kota Denpasar dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
- 2) Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja
- 3) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan
- 4) pengembangan hubungan industrial

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi Angka Pengangguran di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut:

2022 THE THE PART OF THE PART

Gambar 2.2. Angka Pengangguran di Kota Denpasar Tahun 2020-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali 2022

4) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar melambat di tahun 2019 sebesar 5,82%. Akan tetapi pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mengalami penururan yang drastis menjadi -9.43%. Hal ini disebabkan oleh pelambatan ekonomi akibat peningkatan pandemi *Covid-19*. Dan meningkat menjadi -0.91% pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Denpasar Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kota Denpasar 2022



Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya didaerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Tingkat harag dalam difinisi inflasi secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barangbarang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK).

Inflasi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu). Atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dilihat dari penyebabnya inflasi bisa terjadi karena dorongan permintaan (demand pull inflation) maupun dorongan kenaikan biaya produksi (cost push inflation). Inflasi akibat dorongan permintaan terjadi , ketika permintaan akan barang dan jasa sangat tinggi, sehingga meningkatkan harga barang dan jasatersebut. Sementara inflasi akibat dorongan biaya produksi terjadi ketika biaya produksi (input) mengalami peningkatkan sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut meningkat.

Pada tahun 2020 tingkat inflasi di Kota Denpasar sebesar 1,68 %

2022 Examadalan Kenta

dan pada tahun 2021 dalam situasi pandemi *Covid-19* tingkat inflasi di Kota Denpasar menurun menjadi 1,87 %. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi perkembangan inflasi di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut.

Tingkat Inflasi

1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
2020
2021

Gambar 2.4
Perkembangan inflasi Kota Denpasar Tahun 2020-2021

Sumber: BPS Kota Denpasar 2022

5) Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan perkapita merupakan sebuah tolak ukur untuk melihat kesejahteraan dan pembangunan di sebuah negara. Sering disebut juga sebagai pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita ini juga merefleksikan PDRB per kapita. Oleh karena itu, baik pendapatan nasional maupun perkapita keduanya memiliki keterikatan yang kuat.

Selain untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, pendapatan per kapita ini juga bisa digunakan sebagai tolak ukur perekonomian dan pembangunan sebuah negara. Pendapatan nasional dan per kapita ini ternyata juga memiliki keterikatan yang cukup kuat, karena pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya.



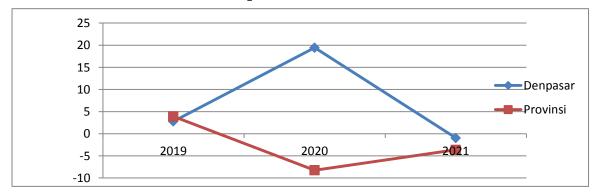
Selama lima tahun terakhir, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar dari tahun ketahun terus meningkat. Untuk lebih jelasnya Peningkatan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pendapatan Perkapita

No	PDRB Perkapita A Denpasar (Ribu Rup	Dasar	Harga	K	onstan	2010	Kota
	Tahun 2019	Tahun	2020		Tal	nun 202	1
1	37,746,41	45,08	33,18		44	1,656,07	7

Dari tabel diatas dapat terlihat PDRB Perkapita Atas Dasar Harga 2010 Kota Denpasar yang mana pada tahun Konstan 2019 menunjukkan 37,746,41 ribu rupiah dengan persentase 2,81% meningkat pada tahun 2020 yang menunjukkan 45,083,18 ribu rupiah dengan persentase 19,44 % dan pada tahun 2021 ada penurunan yang menunjukkan 44,656,07 ribu rupiah dengan persentase -0,95%. Hal ini disebabkan karena situasi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat dan berkepanjangan yang menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Denpasar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Denpasar Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali 2022



6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Untuk menurunkan *gini ratio* dan kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, yang artinya tidak ada kebijakan tunggal untuk bisa bisa menurunkan angka statistik tersebut. Karena harus melihat bukan hanya sosial, ekonomi, bahkan ke depan menyangkut terhadap lingkungan.

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Rasio adalah sebagai berikut :

1. Gini Rasio < 0.3 : ketimpangan rendah.

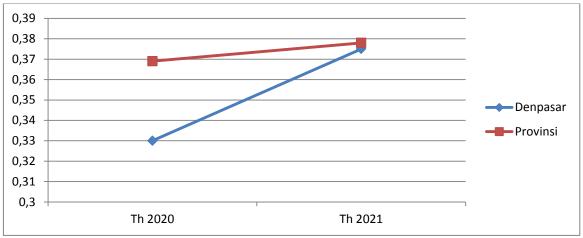
2. $0.3 \le Gini Rasio \le 0.5$: ketimpangan sedang.

3. Gini Rasio > 0.5 : ketimpangan tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tak cukup menurunkan rasio gini lantaran tidak menyentuh masyarakat kelas bawah. Artinya, sektor padat karya, seperti pertanian, industri, dan perdagangan harus tumbuh tinggi agar bisa dinikmati banyak orang. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu perlu. Karena kalau itu terjadi, dampaknya ke bawah. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang diarahkan ke sana dan memberikan kesempatan pada mereka di bawah.

Selama 2 tahun terakhir, nilai Gini Rasio di Denpasar pada tahun 2020 sebesar 0.330 meningkat menjadi 0.375 pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya mengenai Gini Rasio di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6 Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2020-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali 2022

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari dalam keberhasilan daerah mengatur dan mengurus pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintah sesuai dengan indikator masing - masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang . Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Pada Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome) yang merupakan kinerja Pemerintah Kota Denpasar meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan.



1. Urusan Pendidikan

Capaian penyelenggaran urusan Pendidikan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Keluaran			
1	2	3	4	5	
1			URUSAN PENDIDIK	AN	
1.1	Urusan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	296 Paud	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
1.2	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.257 Siswa Paud	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
1.3	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	308 Siswa Paud	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
1.4	Urusan Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1.357 Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
1.5	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada PAUD	1.357 Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
1.6	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.025 Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



1.7	Urusan Pendidikan	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	111 Kepala sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.1	Urusan Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	180 Sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.2	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	74.366 peserta didik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.3	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35.403 peserta didik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.4	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	41.911 peserta didik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.5	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12.826 peserta didik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.6	Urusan Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.310 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan OlahragaKota Denpasar	
2.7	Urusan Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.831 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



2.8	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.310 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.9	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.831 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.10	Urusan Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	619 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.11	Urusan Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	541 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.12	Urusan Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	619 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.13	Urusan Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	541 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.14	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.198 Pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan OlahragaK ota Denpasar	
2.15	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.806 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.16	Urusan Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	142 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.17	Urusan	Jumlah kepala sekolah pada	29 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan	



	Pendidikan	jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.18	Urusan Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	161 Tenaga penunjang	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.19	Urusan Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	106 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.1	Urusan Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	180 Sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.2	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	74.366 peserta didik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.3	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35.403 peserta didik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.4	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	41.911 peserta didik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.5	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12.826 peserta didik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.6	Urusan	Jumlah kebutuhan minimal	4.310 pendidik	Dinas	



	Pendidikan	pendidik pada jenjang sekolah dasar		PendidikanKepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.7	Urusan Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.831 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.8	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.310 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.9	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.831 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.10	Urusan Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	619 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.11	Urusan Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	541 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.12	Urusan Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	619 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.13	Urusan Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	541 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.14	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.198 Pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.15	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.806 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



3.16	Urusan Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	142 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.17	Urusan Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	29 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.18	Urusan Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	161 Tenaga penunjang	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.19	Urusan Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	106 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.1	Urusan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	9 Lembaga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.2	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Sudah menganggarkan namun tidak bisa disetujui karena skala prioritas
4.3	Urusan Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Pada tahun anggaran 2021 terkait tidak adanya peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima



4.4	Urusan Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan	185 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	pembebasan biaya pendidikan, disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19
	1 originalitati	kesetaraan		Kota Denpasar	
4.5	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	185 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.6	Urusan Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)Jumlah kepala sekolah pada satuan Pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	176 Pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.7	Urusan Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan Pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Di Pendidikan Kesetaraan <u>tidak ada</u> <u>sertifikat khusus</u> untuk uji kompetensi kepala sekolah.
4.8	Urusan Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	14 Kepala sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan OlahragaKota Denpasar	



2. Urusan Kesehatan

Capaian penyelenggaran urusan Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemerintahan 2	3	4	5	6
2	4	URUSAN KE	•	5	
	TT		<u></u>	D: 1 1	
1.1	Urusan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang	15 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	memenuhi sarana, prasarana dan alat		Kota Denpasar	
		kesehatan (SPA) sesuai standar			
2.1	Urusan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan	16 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	akreditasinya		Kota Denpasar	
3.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	17.051 jumlah ibu	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	tersedia	hamil	Kota Denpasar	
3.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	44 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	antenatal		Kota Denpasar	
4.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	16.934 ibu bersalin	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	tersedia		Kota Denpasar	
4.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	44 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	persalinan sesuai standar		Kota Denpasar	
5.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	16.513 bayi baru	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	tersedia	lahir	Kota Denpasar	
5.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	44 Orang	Dinas Kesehatan	-
	Kesehatan	neonatal esensial sesuai standar		Kota Denpasar	
6.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	39.457 Balita	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	tersedia		Kota Denpasar	
6.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	55 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	kesehatan balita sesuai standar		Kota Denpasar	
7.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	117.121 Anak	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	tersedia		Kota Denpasar	



7.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	55 Petugas	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	kesehatan anak usia pendidikan dasar		Kota Denpasar
		sesuai standar		
8.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	395.845 Orang	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	tersedia	_	Kota Denpasar
8.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	22 tenaga	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	kesehatan sesuai standar	kesehatan	Kota Denpasar
9.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	53.830 Orang	Dinas Kesehatan -
	Kesehatan	tersedia		Kota Denpasar
9.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	44 Orang	Dinas Kesehatan
		kesehatan sesuai standar		Kota Denpasar
10.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	66.902 Orang	Dinas Kesehatan
		tersedia		Kota Denpasar
10.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	22 Tenaga	Dinas Kesehatan
		Kesehatan sesuai tandar	Kesehatan	Kota Denpasar
11.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	15.366 Orang	Dinas Kesehatan
		tersedia		Kota Denpasar
11.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	22 tenaga	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	persalinan sesuai standar	kesehatan	Kota Denpasar
12.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	746 ODGJ	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	tersedia		Kota Denpasar
12.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	30 Orang	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	kesehatan sesuai standar		Kota Denpasar
13.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	14.892	Dinas Kesehatan
İ	Kesehatan	tersedia		Kota Denpasar
13.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	170 SDM	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	Kesehatan sesuai standar		Kota Denpasar
14.1	Urusan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang	20.404	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	tersedia		Kota Denpasar
14.2	Urusan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	144 Orang	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	Kesehatan sesuai standar		Kota Denpasar



3. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

BT -	TT	T., 4:14 T7:: T7:	Canalan Winania	0	T7 - 4
No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
•	Pemerintahan	Keluaran	4		
1	2	3	4	5	6
3			URUSAN PEKERJAAN UMUM		
1.1	Urusan	Luas kawasan permukiman	3,9983 Ha	Dinas Pekerjaan	
	Pekerjaan	rawan banjir di WS		Umum dan	
	Umum	kewenangan Kota Denpasar		Penataan Ruang	
		(ha)		Kota Denpasar	
1.2	Urusan	Panjang sungai di kawasan	23,040 Km	Dinas Pekerjaan	
	Pekerjaan	permukiman yang rawan		Umum dan	
	Umum	banjir di WS kewenangan		Penataan Ruang	
		Kota Denpasar (m)		Kota Denpasar	
1.3	Urusan	Luas kawasan permukiman	11,26 Km	Dinas Pekerjaan	
	Pekerjaan	sepanjang pantai yang rawan		Umum dan	
	Umum	abrasi erosi dan akresi di WS		Penataan Ruang	
		kewenangan Kota Denpasar		Kota Denpasar	
		(ha)			
1.4	Urusan	Panjang pantai di kawasan	11,26 Km	Dinas Pekerjaan	
	Pekerjaan	permukiman yg rawan abrasi,		Umum dan	
	Umum	erosi, akresi di WS		Penataan Ruang	
		kewenangan Kota Denpasar		Kota Denpasar	
		(m)			
1.5	Urusan	Rencana Tata Pengaturan air	Ada	Dinas Pekerjaan	
	Pekerjaan	dan tata pengairan/rencana	Masterplan Drainase Kota	Umum dan	
	Umum	pengelolaan sumber daya air	Denpasar	Penataan Ruang	
		WS Kewenangan Kota		Kota Denpasar	
		Denpasar			
1.6	Urusan	Rencana Teknis tata	Ada	Dinas Pekerjaan	



	Pekerjaan Umum	pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kota Denpasar	Masterplan Drainase Kota Denpasar	Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
1.7	Urusan Pekerjaan Umum	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kota Denpasar	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak mempunyai data mengenai Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kota Denpasar, karena kewenangan hal tersebut diatas ada pada wilayah kewenangan Balai Wilayah Sungai Bali- Penida (BWS Bali Penida)
2.1	Urusan Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kota Denpasar (ha)	3,9983 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.2	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kota Denpasar (m)	23,04 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.3	Urusan Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kota Denpasar (ha)	11,26 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.4	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kota Denpasar	11,26 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



		(m)			
2.5	Urusan Pekerjaan Umum	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kota Denpasar	Ada Masterplan Drainase Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.6	Urusan Pekerjaan Umum	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kota Denpasar	Ada Masterplan Drainase Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.7	Urusan Pekerjaan Umum	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kota Denpasar	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak mempunyai data mengenai Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kota Denpasar, karena kewenangan hal tersebut diatas ada pada wilayah kewenangan Balai Wilayah Sungai Bali- Penida (BWS Bali Penida)
3.1	Urusan Pekerjaan Umum	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer $\frac{dalam \ kondisi \ baik \ (m)}{Panjang \ jaringan} \ x \ 100\%$ irigasi primer \((m)\) $\frac{10.300 \ m}{10.684 \ m} \ x \ 100\% = 96\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	,,



3.2	Urusan Pekerjaan Umum	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder $\frac{dalam \ kondisi \ baik \ (m)}{Panjang \ jaringan} x \ 100\%$ irigasi sekunder (m) $\frac{5.400 \ m}{5.729 \ m} x \ 100\% = 94\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
3.3	Urusan Pekerjaan Umum	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) Panjang jaringan irigasi tersier (m) $\frac{36.150 \text{ m}}{38.412 \text{ m}} \times 100\% = 92\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
4.1	Urusan Pekerjaan Umum	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas Kota Denpasar	Ada	PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	RISPAM lintas Kota merupakan RISPAM SARBAGITA
4.2	Urusan Pekerjaan Umum	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kota Denpasar	54,95 % (89.559 SR)	BAPPEDA kota Denpasar, PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma	
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kota Denpasar penyelenggaran SPAM	55,95 % (88.559 SR)	PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma	
4.4	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	10 rekomendasi pemanfaatan bagian jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
4.5	Urusan Pekerjaan	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan	Mengenai Jumlah kerja sama penyelenggaran



	Umum	pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		Penataan Ruang Kota Denpasar	SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.
5.1	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	91,52 % (132.758 SR)	RENSTRA Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.2	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	8,61 % (12.495 SR)	RENSTRA Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.3	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	99,98% (145.033 SR)	RENSTRA Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.4	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	100% (145.033 rumah)	RENSTRA Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



5.5	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	100% (145.033 rumah)	RENSTRA Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.6	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	8,61 % (12.495 SR)	RENSTRA Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.7	Urusan Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah yang memiliki akses pengelolaan berupa cubluk atau tanki septik Rumah diwilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun $< 25 \text{ jiwa/ha}$ $\frac{132.758}{145.033}$ x $100 \% = 91,52\%$	RENSTRA Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



5.8	Urusan Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Rumah dengan lumpur tinjanya telah diolah di IPLT Rumah diwilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun $< 25 \text{ jiwa/ha}$ $\frac{12.495}{132.758} \text{x} \ 100 \% = 6,51\%$	RENSTRA Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, RPJM Teknokratik	
5.9	Urusan Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya $\frac{diolah\ di\ IPALD}{Rumah\ di\ wilayah} x 100\%$ pengembangan SPALDT $\frac{12.495}{145.033} x 100 \% = 8,61\%$	RENSTRA Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, RPJM Teknokratik	
5.10	Urusan Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Rumah yang memiliki akses unit pengelolaan $\frac{\text{setempat}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$ yang termasuk dalam wilayah pengembangan $SPALD - S$ $\frac{132.758}{145.033} \times 100\% = 91,52\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



5.11	Urusan Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah sarana pengangkutan tersedia Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan di Kota Denpasar 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	mengenai Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak memiliki sarana pengangkutan lumpur tinja
5.12	Urusan Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Jumlah sarana pengangkutan tersedia Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan di Kota Denpasar	UPT PAL Provinsi Bali	Mengenai Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak memiliki sarana pengangkutan lumpur tinja
5.13	Urusan Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD - T pada Kota Denpasar $\frac{12.495}{12.495} \times 100 \% = 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, RPJM Teknokratik	



5.14	Urusan Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD – S 132.758 132.758 x 100 % = 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, RPJM Teknokratik	
6.1	Urusan Pekerjaan Umum	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) $\frac{12}{1252} \times 100\% = 0,95\%$	SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung)	
6.2	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam tahun eksisting	1252 IMB	SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung)	
6.3	Urusan Pekerjaan Umum	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung
6.4	Urusan	Penetapan Keputusan	Ada	Dinas Pekerjaan	



	Pekerjaan Umum	Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	SK TABG Tahun 2021 Nomor 188.45/II/26/HK /2021	Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
6.5	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak memiliki kewenangan perlindungan dan pelestarian gedung
6.6	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kota Denpasar	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak menangani kegiatan Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kota Denpasar
6.7	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota Denpasar	38 Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
6.8	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota denpasar yang dipelihara/dirawat	38 Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.1	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kota Denpasar	486.084,35 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.2	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang dibangun	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak pernah melakukan kegiatan pembangunan jalan di Kota Denpasar.



7.3	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang jembatan yg dibangun	<u>0</u> 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan di Kota Denpasar.
7.4	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur /fungsi)	I,36 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.5	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	<u>0</u> 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pergantian/pelebaran jembatan di Tahun 2021
7.6	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	I,36 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.7	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang jembatan yang direhabilitasi	<u>0</u> 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai Panjang jembatan yang direhabilitasi tidak ada capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak pernah melakukan kegiatan rehabilitasi jalan di Kota Denpasar.
7.8	Urusan Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang dipelihara	$\frac{22.5}{22.5} \text{x } 100 \% = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.9	Urusan Pekerjaan	Panjang jembatan yang dipelihara	<u>0</u> 1	Dinas Pekerjaan Umum dan	Mengenai Panjang jembatan yang dipelihara



	Umum			Penataan Ruang	tidak ada capaian kinerja
	Jiiuiii			Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
					Denpasar tidak pernah melakukan kegiatan
					Panjang jembatan yang dipelihara
8.1	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah Kota Denpasar	<u>0</u> 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak memiliki data terkait Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah Kota Denpasar
8.2	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah Kota Denpasar	236 Tenaga Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Data Tenaga Kerja Yang Memiliki SKA/SKT di Kota Denpasar Tahun 2021 144 Orang Tenaga Kerja dengan Sertifikat Keahlian Kerja 92 Orang Tenaga Kerja dengan Sertifikat Keterampilan Kerja
8.3	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah Kota Denpasar	236 Tenaga Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Data Tenaga Kerja Yang Memiliki SKA/SKT di Kota Denpasar Tahun 2021 144 Orang Tenaga Kerja dengan Sertifikat Keahlian Kerja 92 Orang Tenaga Kerja dengan Sertifikat Keterampilan Kerja
8.4	Urusan Pekerjaan Umum	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan Kota Denpasar yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Monitoring Tata Tertib jasa Kontruksi



8.5	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Denpasar untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota Denpasar	Rp. 10.308.715	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.6	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Denpasar untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.7	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Denpasar untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.8	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.9	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota Denpasar	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.10	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapaten /kota



8.11	Urusan Pekerjaan Umum	dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Denpasar yang dibuktikan dengan sertifikat	0 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak memiliki data/ tidak melaksanakan kegiatan pelatihan mengenai Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Denpasar yang dibuktikan dengan
		pelatihan operator dan teknisi/analis			sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak memiliki data tersebut / tidak melaksanakan pelatihan tersebut.
8.12	Urusan	Tersedianya data dan	<u>0</u>	Dinas Pekerjaan	mengenai Tersedianya data
	Pekerjaan	informasi tenaga kerja	1	Umum dan	dan informasi tenaga kerja
	Umum	konstruksi terlatih yang		Penataan Ruang	konstruksi terlatih yang
		tersertifikasi		Kota Denpasar	tersertifikasi



		operator/teknisi/analis di wilayah Kota Denpasar			operator/teknisi/analis di wilayah Kota Denpasar tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak memiliki data tersebut / tidak melaksanakan pelatihan tersebut.
8.13	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota Denpasar	245 badan usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.14	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	23 Rekomendasi IUJK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.15	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak memiliki data tersebut.



8.16	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar memang tidak ada kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
8.17	Urusan Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak memiliki data tersebut.
8.18	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kota Denpasar	463 IUJK Jumlah badan usaha yang memiliki IUJK di wilayah Kota Denpasar 463 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



8.19	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kota Denpasar	<u>0</u> 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kota Denpasar tidak ada capaian kinerja karena data tersebut ditangani oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar
8.20	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kota Denpasar	826 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	233 Konsultan Perencana 256 Konsultan Pengawas 337 Pelaksana
8.21	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota Denpasar	826 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	233 Konsultan Perencana 256 Konsultan Pengawas 337 Pelaksana
8.22	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	463 Rekomendasi IUJK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.23	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak memiliki data tersebut



0.04	I I am a com	Jumlah kecelakaan	0	Dinas Dalassia	Manganai izznalala
8.24	Urusan		-	Dinas Pekerjaan	Mengenai jumlah
	Pekerjaan	konstruksi pada proyek yang	1	Umum dan	kecelakaan konstruksi
	Umum	menjadi kewenangan		Penataan Ruang	pada proyek yang menjadi
		pengawasannya		Kota Denpasar	kewenangan
					pengawasannya tidak ada
					capaian kinerja karena
					Dinas Pekerjaan Umum
					dan Penataan Ruang Kota
					Denpasar memang tidak
					ada kecelakaan konstruksi
					pada proyek yang menjadi
					kewenangan
					pengawasannya
8.25	Urusan	Jumlah pengawasan terkait	<u>0</u>	Dinas Pekerjaan	Mengenai jumlah
0.20	Pekerjaan	ketidaksesuaian jenis, sifat,	- 1	Umum dan	pengawasan terkait
	Umum	klasifikasi, layanan usaha,	1	Penataan Ruang	ketidaksesuaian jenis, sifat,
	Omam	bentuk dan/atau kualifikasi		Kota Denpasar	klasifikasi, layanan usaha,
				Kota Delipasai	bentuk dan/atau
		usaha dengan segmentasi			
		pasar jasa konstruksi yang			kualifikasi usaha dengan
		menjadi kewenangan			segmentasi pasar jasa
		pengawasannya			konstruksi yang menjadi
					kewenangan
					pengawasannya tidak ada
					capaian kinerja karena
					Dinas Pekerjaan Umum
					dan Penataan Ruang Kota
					Denpasar tidak memiliki
					data tersebut untuk Tahun
					2021



4. Urusan Perumahan Rakyat

Capaian penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
110	Pemerintahan	Keluaran	oupului iiiioiju	Sumser Sucu	notorungun
1	2	3	4	5	6
4			URUSAN PERUMAHAI	N RAKYAT	
1.1	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
1.2	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	4 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
1.3	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	4 KK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
1.4	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana	4 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota	



1.5	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	4 Unit	Denpasar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota	
1.6	Urusan	Jumlah unit rumah korban	0 1	Denpasar Dinas Perumahan,	Dinas Perumahan, Kawasan
	Perumahan Rakyat	bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	_	Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi.
1.7	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.
1.8	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	4 KK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	



1.9	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	<u>0</u> 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.
2.1	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<u>0</u> 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
2.2	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<u>0</u> 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
2.3	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<u>0</u> 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM.



2.4	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	22 KK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
2.5	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	445 KK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Jumlah data RTLH Tahun 2021 – Jumlah Penerimaan bantuan RTLH Tahun 2021 (467 KK- 22 KK = 445 KK)
2.6	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan luasan (Ha) pengadaan tanah .
3.1	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	7,72 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
3.2	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	22 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
3.3	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	3,78 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.1	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah di Kota Denpasar	188.732 Unit	Dinas Perumaha, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.2	Urusan	Jumlah unit PK RTLH	22 Unit	Dinas Perumahan,	



	Perumahan Rakyat			Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.3	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni	467 unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang tidak dihuni	<u>0</u> 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah rumah yang tidak dihuni.
4.5	Urusan Perumahan Rakyat	Rasio rumah dan KK	$\frac{Jumlah\ KK}{Jumlah\ total\ unit\ rumah}$ $\frac{170.377}{188.732} = 0,90$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.6	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah pembangunan baru	0 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan Jumlah rumah pembangunan baru tahun 2021
5.1	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	188.732 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.2	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	188.732 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	



5.3	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	188.732 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.4	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	188.732 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.5	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	188.732 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.6	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan rumah yang terfasilitasi akses PJU.
5.7	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah pengembang yang tersertifikasi
5.8	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah pengembang yang terregistrasi	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah pengembang yang terregistrasi.
5.9	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	<u>0</u> 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah pengembang



				yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.
--	--	--	--	--

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-		Kunci Keluaran	4		
1	2	3	<u> </u>	5	6
5			KETERTIBAN UMUM DAN P		ARAKAT
1.1	Ketentraman,	Jumlah pelanggaran	687 Pelanggaran dan	Satuan Polisi	
	Ketertiban	dan pengaduan	Pengaduan	Pamong Praja Kota	
	Umum dan	trantibum dalam Kota		Denpasar	
	Perlindungan	Denpasar yang			
	Masyarakat	ditangani			
1.2	Ketentraman,	Jumlah Satlinmas yang	1.303 Satlinmas	Satuan Polisi	
	Ketertiban	terlatih dan		Pamong Praja Kota	
	Umum dan	dikukuhkan		Denpasar	
	Perlindungan				
	Masyarakat				
1.3	Ketentraman,	Jumlah Perda dan	11 Perda	Satuan Polisi	1. Peraturan Daerah Kota
	Ketertiban	Perkada yang		Pamong Praja Kota	Denpasar Nomor 11 Tahun
	Umum dan	ditegakkan		Denpasar	2001 tentang Usaha
	Perlindungan	arrogamian		Benpasar	Rekreasi dan Hiburan
	Masyarakat				Umum.
	Masyarakat				2. Peraturan Daerah Kota
					Denpasar Nomor 24 Tahun
					2001 tentang Ijin Usaha
					Hotel Melati
					3. Peraturan Daerah Kota



Denpasar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Rumah Makan 4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan /Tanda Daftar Perusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pejak Reklame		DALAH
Rumah Makan 4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan /Tanda Daftar Perrusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan /Tanda Daftar Perusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan /Tanda Daftar Perusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
2002 tentang Usaha Bar 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan /Tanda Daftar Perusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan /Tanda Daftar Perusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Vsaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan /Tanda Daftar Perusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan /Tanda Daftar Perusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
Usaha Perdagangan /Tanda Daftar Perusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
Daftar Perusahaan 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		
2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		6. Peraturan Daerah Kota
Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		Denpasar Nomor 7 Tahun
Gangguan (HO)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		2005 tentang Retribusi Ijin
Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		Tempat Usaha dan Ijin
Nomor 9 Tahun 2002 tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		Gangguan (HO)Peraturan
tentang Usaha Pondok Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		Daerah Kota Denpasar
Wisata 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		Nomor 9 Tahun 2002
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		tentang Usaha Pondok
Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		Wisata
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		7. Peraturan Daerah Kota
Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		Denpasar Nomor 11 Tahun
Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame		2012 tentang Perubahan
2011 tentang Pajak Reklame		Atas Peraturan Daerah Kota
2011 tentang Pajak Reklame		Denpasar Nomor 2 Tahun
		2011 tentang Pajak Reklame
j j j j j j j j j j j j j j j j j j j		8. Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 7 Tahun		Denpasar Nomor 7 Tahun
2013 tentang Kawasan		
Tanpa Rokok		
9. Peraturan Daerah Kota		
Denpasar Nomor 1 Tahun		
2015 tentang Ketertiban		
Umum		
10. Peraturan Daerah Kota		



					Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
1.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4 PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	•
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 16 SOP	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	 SOP Deteksi Dini SOP Bintek Linmas SOP Patroli Linmas SOP Pengamanan Kegiatan SOP Pembinaan Dan Penyuluhan SOP Penertiban PKL SOP Penertiban Usaha dan Bangunan SOP Diklat Dasar SOP Diklat Kesamaptaan SOP Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat dan Pendidikan PNS SOP Bangunan SOP Pembongkaran Reklame SOP ODGJ SOP Orang Terlantar SOP Pengaduan Masyarakat SOP Pengamanan Kegiatan Satpol. PP



1.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	
3.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kema juan peker jaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan 0 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar pada tahun 2021 tidak terdapat penyelesaian dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) sampai dinyatakan sah/legal karena rencana penyusunan dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) sudah dianggarkan dan dilaksanakan di tahun 2022
3.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana \$ 652.728 \tag{652.728} \tag{100} = 100 \tag{652.728}	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
4.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen x 100% RPB yang lengkap dan sudah disahkan 0 1	Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Denpasar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar pada tahun 2021 tidak terdapat penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal karena rencana penyusunan dokumen RPB



4.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen x 100% renkon yang lengkap dan sudah disahkan <u>0</u> 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	(Rencana Penanggulangan Bencana) sudah dianggarkan dan dilaksanakan di tahun 2022 Rencana penyusunan dokumen Renkon awalnya sudah diusulkan di tahun 2022 dan tidak memperoleh anggaran, sehingga akan diusulkan di tahun 2023
4.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana 2.447 652.728 x 100% = 0,37%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
4.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan Jumlah warga negara x 100% yang berada di kawasan rawan bencana 2.447 652.728 x 100% = 0,37%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada masyarakat
4.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 4.081 652.728 x 100% = 0,62%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Jumlah penduduk Kota Denpasar yang mendapat layanan pusdalops.



		bencana			
4.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 14.818 652.728 x 100% = 2.27%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
5.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Jumlah seluruh penetapan status KLB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Tidak terdapat penetapan status KLB (Kejadian luar biasa)di tahun 2021, sehingga tidak dapat menghitung persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB
5.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana 2x 100% = 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
5.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan <u>darurat bencana</u> Jumlah keseluruhanx 100% petugas dalam penanganan darurat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	



			$\frac{300}{300} \times 100\% = 100\%$		
5.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana 1.132 1.132 1.132	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	18 Jenis Layanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	16 Orang per 24 jam di setiap pos kecamatan



C 1	TZ - 4 4	D D1	T: 1-1- A 1-	D- 1	D- 1 D 1
6.4	Ketentraman,	Pos Damkar yang	Tidak Ada	Badan	Badan Penanggulangan
	Ketertiban	dilengkapi dengan		Penanggulangan	Bencana Daerah Kota Denpasar
	Umum dan	sarana/prasaran		Bencana Daerah	pada tahun 2021 tidak terdapat
	Perlindungan	damkar, sarana		Kota Denpasar	pos pemadam kebakaran yang
	Masyarakat	prasarana			dilengkapi dengan
		penyelamatan dan			sarana/prasarana pemadam
		evakuasi di setiap			kebakaran, sarana prasarana
		keluarahan/desa			penyelamatan dan evakuasi di
					setiap kelurahan/desa karena
					pos pemadam kebakaran hanya
					ada di kecamatan
6.5	Ketentraman,	Jumlah dan jenis	16 Jenis	Badan	
	Ketertiban	sarana prasarana	795 sarana prasarana	Penanggulangan	
	Umum dan	pemadaman,	pemadaman, penyelamatan	Bencana Daerah	
	Perlindungan	penyelamatan dan	dan evakuasi	Kota Denpasar	
	Masyarakat	evakuasi			
6.6	Ketentraman,	Jumlah aparatur	23 Orang	Badan	
	Ketertiban	pemadam kebakaran		Penanggulangan	
	Umum dan	yang memenuhi		Bencana Daerah	
	Perlindungan	Standar Kualifikasi		Kota Denpasar	
	Masyarakat	Pemadam sebagaimana			
		dimaksud Peraturan			
		Menteri Dalam Negeri			
		Nomor 16 Tahun 2009			
		tentang Standar			
		Kualifikasi Aparatur			
		Pemadam Kebakaran			
6.7	Ketentraman,	Jumlah relawan	<u>0</u>	Badan	Badan Penanggulangan
	Ketertiban	kebakaran di bawah	1	Penanggulangan	Bencana Daerah Kota Denpasar
	Umum dan	binaan Dimas		Bencana Daerah	pada tahun 2021 tidak terdapat
	Perlindungan	Pemadam Kebakaran		Kota Denpasar	relawan kebakaran di bawah
	Masyarakat	dan Penyelamatan atau			binaan Dinas Pemadam
		perangkat daerah yang			Kebakaran dan Penyelamatan
		menyelenggarakan sub			atau Perangkat Daerah yang
		urusan kebakaran			menyelenggarakan sub urusan



					kebakaran karena Kota Denpasar belum memiliki kader untuk relawan kebakaran
6.8	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	<u>0</u> 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar pada tahun 2021 tidak dilaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran karena belum tersedianya anggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di tahun 2021

6. Urusan Sosial

Capaian penyelenggaran urusan Sosial berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6			URUSAN SOSIAL		
1.1	Urusan Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	4 Pengaduan	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.2	Urusan Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM



1.3	Urusan Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	57 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.4	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	105 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.5	Urusan Sosial	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 Mobil	Dinas Sosial Kota Denpasar	 Mobil Rescue Mobil UPSK Mobil Pickup
1.6	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi.	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi.
1.7	Urusan Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada rumahsinggah/shelter/tempat tinggal sementarayang sesuai standar
1.8	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang.
1.9	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu.



1.10	Urusan Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada alat bantu yang tersediadi rumah singgah/ shelter.
1.11	Urusan Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada paket perbekalankesehatan yang tersedia.
1.12	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkanpaket perbekalan kesehatan.
1.13	Urusan Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah
1.14	Urusan Sosial	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	78 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.15	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada penyandang disabilitaterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter
1.16	Urusan Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada kegiatan



		dan masyarakat			bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.
1.17	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	14 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.18	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada penyandang disabilitaterlantar, anak terlantar, lanjut usiterlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
1.19	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada penyandang disabilitaterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga
1.20	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga
1.21	Urusan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	3 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	



2.1	Urusan Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada korban bencana yang mendapatkan makanan
2.2	Urusan Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada korban bencana yang menerima paket sandang
2.3	Urusan Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada tempat penampungan pengungsi yang dimiliki.
2.4	Urusan Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada paket permakanan khusus bagi kelompok rentan.
2.5	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	<u>0</u> 1	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada korban bencana yanmenerima pelayanan dukungan psikososial.
2.6	Sosial	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	78 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	



7. Urusan Ketenagakerjaan

Capaian penyelenggaran urusan Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Keluaran			
1	2	3	4	5	6
7			URUSAN KETENAGAKERJA	AAN	
1.1	Ketenagakerjaan	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kota Denpasar	2 RENSTRA, RENJA Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	RENJA, RENSTRA
1.2	Ketenagakerjaan	Persentse akurasi proyeksi indicator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi indikator $\frac{-target \ indikator}{Realisasi} \times 100\%$ $\frac{6-6}{6} \times 100\% = 0\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
1.3	Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja di Kota Denpasar	41 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



2.1	Ketenagakerjaan	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n 3/4 x 100 % = 75%	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.2	Ketenagakerjaan	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n $\frac{281}{644} x 100 \% = 43,63\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.3	Ketenagakerjaan	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n jumlah peserta pelatihan pada tahun n $\frac{644}{8.360} \times 100\% = 7,70 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.4	Ketenagakerjaan	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n jumlah seluruh LPK pada tahun n $\frac{32}{54} \times 100\% = 59,26\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



2.5	Ketenagakerjaan	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n jumlah LPK yang terdata pada tahun n $\frac{54}{54} \times 100\% = 100 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.6	Ketenagakerjaan	Jumlah Penganggur Yang Dilatih	1.466	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.7	Ketenagakerjaan	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n Jumlah orang yang dilatih pada tahun n 3.908 8.360 x 100% = 46,75%	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.8	Ketenagakerjaan	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n Jumlah lulusan x 100% pada tahun n 2.442 3.908 x 100% = 62,49%	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.9	Ketenagakerjaan	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



		1	2.056	1	T
			$\frac{2.056}{1}$ x 100% = 52,61 %		
			3.908		
2.10	Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Pekerja	$\sum CPMI \ dilatih$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan
		Migran Indonesia	$\frac{\sum CPMI \ attatth}{\sum CPMI \ terdaftar} \times 100\%$	dan Sertifikasi	Sertifikasi Kompetensi Kota
		(CPMI)/Calon Tenaga		Kompetensi Kota	Denpasar belum
		Kerja Indonesia (CTKI)	$\frac{0}{411} \times 100\% = 0\%$	Denpasar	mengadakan kegiatan
		yang diberikan	411		pelatihan CPMI
		pelatihan			
2.11	Ketenagakerjaan	Jumlah pelatihan	<u>0</u>	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan
		Calon Pekerja Migran	1	dan Sertifikasi	Sertifikasi Kompetensi Kota
		Indonesia		Kompetensi Kota	Denpasar belum
		(CPMI)/Calon Tenaga		Denpasar	mengadakan kegiatan
		Kerja Indonesia (CTKI)			pelatihan CPMI
3.1	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan	Jumlah perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	
		yang menerapkan	yang menerapkan	dan Sertifikasi	
		program peningkatan	program peningkatan	Kompetensi Kota	
		produktivitas	produktivitas	Denpasar	
			pada tahun n		
			$\frac{pada tanun n}{jumlah perusahaan} \times 100\%$		
			pada tahun n		
			$\frac{41}{200}$ X 100 % = 20,50%		
3.2	Ketenagakerjaan	Data tingkat	Pertumbuhan ekonomi	Badan Pusat	
3.2	Keteriagakerjaari	produktivitas total	dikurangi (pertumbuhan	Statistik Provinsi	
		produktivitas totai	modal+pertumbuhan tenaga	Bali dan Dinas	
			kerja).	Tenaga Kerja dan	
			= - 0,91 - (22,57 + 92,98)	Sertifikasi	
			= - 0,91 - (115,55)	Kompetensi Kota	
			= - 116,46	Denpasar dan Dinas	
				Penanaman Modal	
				dan Pelayanan	
				Terpadu Satu Pintu	
				Kota Denpasar	



4.1	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih $\frac{41}{41} \times 100 \% = 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.2	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.3	Ketenagakerjaan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	1. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SPsebanyak 0 2. SB yang tercatat, federasi SP sebanyak 0 3. SB yang tercatat, SP sebanyak 3 4. SP/SB di luar perusahaan yang tercatat sebanyak 0 5. anggota SP/SB di perusahaan sebanyak 0	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	3 Perusahaan yang memiliki SP/SB yang tercatat : 1. PT Amanah Abadi Bali 2. PT BPR Pasar Umum 3. PT Maya Resort



4.4	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB). 41 42 41 44 41 41 41 42 41 43 41 44	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.5	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor 41 290 x 100 % = 14,14%	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.6	Ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih jumlah perusahaan pada tahun n $\frac{44}{200} \times 100\% = 22\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.7	Ketenagakerjaan	Jumlah mogok kerja	<u>0</u> 1	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak mendapat laporan data jumlah mogok kerja tahun 2021



4.8	Ketenagakerjaan	Jumlah penutupan perusahaan	1 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	PT. Nirmala Lestari
4.9	Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan kepentingan	<u>0</u> 1	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Tidak ada perselisihan kepentingan di Kota Denpasar
4.10	Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	$\frac{0}{1}$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Tidak ada perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan.
4.11	Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan PHK	24 Perselisihan	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.12	Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	64 Pekerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.13	Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	5	Dinas Tenaga Kerja dan Sertfikasi Kompetensi Kota Denpasar	1. UD. Rachmat Motor 2. PT . BPR KITA Cendradana 3. PT. Indolok Bakti Utama 4. PT. Solid Gold Berjangka 5. PT. Kusemas Citra Mandiri
4.14	Ketenagakerjaan	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Denpasar yang diberdayakan	Ada 1 LKS	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	LKS Tripartit Kota Denpasar



4.15	Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama Jumlah kasus perselisihan $\frac{17}{44} \times 100\% = 38,64\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.1	Ketenagakerjaan	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kota Denpasar	669	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.2	Ketenagakerjaan	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar di Kota Denpasar	883	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.3	Ketenagakerjaan	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kota Denpasar	26	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.4	Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar dalam Satu Kota Denpasar	607	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.5	Ketenagakerjaan	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Pengantar Kerja Madya Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
5.6	Ketenagakerjaan	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kota Denpasar	14 LPTKS	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



5.7	Ketenagakerjaan	Jumlah Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kota Denpasar	4 Perjanjian	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.8	Ketenagakerjaan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	607	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.9	Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum CPM \ atau \ CTKI \ yang}{mendapatkan \ sosialisasi} x100\%$ $\frac{0}{411} x \ 100\% = 0\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar belum mengadakan sosialisasi PMI/CTKI
5.10	Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	411	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.11	Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum fasilitasi\ PMI\ yang}{dipulangkan} \frac{dipulangkan}{\sum PMI\ yang\ pulang.} \ x\ 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak memiliki data terkait PMI yang pulangkan, akan dikoordinasikan dengan pihak instansi terkait tahun berikutnya
5.12	Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan	<u>0</u> 1	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak melakukan Pendidikan dan Pelatihan kerja terhadap PMI/TKI



		pendidikan dan pelatihan kerja			
5.13	Ketenagakerjaan	Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	<u>0</u> 1	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak mempunyai data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya di Tahun 2021
5.14	Ketenagakerjaan	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	<u>0</u> 1	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak mempunyai data jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukkan pada tahun 2021

8. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian penyelenggaran urusan Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
8		URUSAN PERLINDU	INGAN PEREMPUAN DAN I	PERLINDUNGAN ANAK	
1.1	Perlindungan	Jumlah lembaga	94 OPD	Dinas Pemberdayaan	
	Perempuan Dan	pemerintah tingkat		Perempuan dan	
	Perlindungan Anak	daerah Kota Denpasar		Perlindungan Anak,	
		yang telah dilatih PUG		Pengendalian Penduduk	



				dan Keluarga Berencana	
				Kota Denpasar	
				_	
1.2	Perlindungan	Jumlah program/kegiatan	97 program dan 97	Dinas Pemberdayaan	
	Perempuan Dan	PUG pada perangkat	kegiatan	Perempuan dan	
	Perlindungan Anak	daerah yang sudah	S	Perlindungan Anak,	
		dievaluasi melalui analisis		Pengendalian Penduduk	
		gender di Tingkat kota		dan Keluarga Berencana	
		Denpasar		Kota Denpasar	
2.1	Perlindungan	Jumlah media massa	3 media massa	Dinas Pemberdayaan	Media massa yang
2,1	Perempuan Dan	(cetak, elektronik) yang	o media massa	Perempuan dan	bekerja sama dengan
	Perlindungan Anak	bekerja sama dengan		Perlindungan Anak,	Pemerintah Kota
	i eriiliddiigaii Aliak	Pemerintah Kota		Pengendalian Penduduk	
					Denpasar (dinas pppa)
		Denpasar (dinas pppa) untuk melakukan KIE		dan Keluarga Berencana	
				Kota Denpasar	pencegahan kekerasan
		pencegahan kekerasan			terhadap anak:
		terhadap anak			- Pro Denpasar
					- RPKD FM
					- RRI Denpasar
2.2	Perlindungan	Jumlah lembaga layanan	3 Lembaga	Dinas Pemberdayaan	Layanan Rujukan pada
	Perempuan Dan	anak yang telah memiliki		Perempuan dan	Dinas Sosial, Dinas
	Perlindungan Anak	standar pelayanan		Perlindungan Anak,	Kesehatan UPTD PPA
		minimal		Pengendalian Penduduk	dan LBH APIK
				dan Keluarga Berencana	
				Kota Denpasar	
2.3	Perlindungan	Persentase korban	Jumlah korban	Dinas Pemberdayaan	
	Perempuan Dan	kekerasan anak yang	kekerasan anak yang dilayani 1000/	Perempuan dan	
	Perlindungan Anak	terlayani	yang dilayani jumlah korban x 100%	Perlindungan Anak,	
			kekerasan anak di tingkat provinsi	Pengendalian Penduduk	
				dan Keluarga Berencana	
			$\frac{137}{156}$ x 100% = 87,82%	Kota Denpasar,	
			156	Tota Benpadar,	
2.4	Dorlindungon	Jumlah lambaga layanan	2 lambaga	Dinas Pemberdayaan	1. LBH APIK
2.4	Perlindungan	Jumlah lembaga layanan	3 lembaga	2	
	Perempuan Dan	anak yang mendapat		Perempuan dan	Lentera Anak



	Perlindungan Anak	pelatihan		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Bali 3. GRASA
2.5	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD Kota Denpasar)	$\frac{0}{1}$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tidak terdapat data jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD Kota Denpasar)
3.1	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3 organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	- LBH APIK - BALI SRUTI - LBH BALI
3.2	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	$\frac{0}{1}$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tidak terdapat data jumlah



	1				
					kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih tahun 2021
3.3	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Lembaga PUSPA
3.4	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{1}$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tidak terdapat data Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
3.5	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 kebijakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perwali tentang Rencana Aksi TPPO dan penghapusan



					ESKA Nomor 15 tahun 2018
3.6	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	3 lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Layanan Rujukan pada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan UPTD PPA dan LBH APIK
3.7	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 115 115 115 115	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	

9. Urusan Pangan

Capaian penyelenggaran urusan Pangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
9			URUSAN PAN	GAN	
1.1	Pangan	Tersedianya infrastruktur	Ada 6	Dinas Perikanan	
		pergudangan dan sarana		dan Ketahanan	1. UD. Padma sari
		pendukung lainnya untuk		Pangan Kota	2. UD. Dwijati



	1				1
		penyimpanan cadangan pangan		Denpasar	 3. Pb. Wirya 4. Pb. Sari mulya 5. Pb. Merta sari 6. Pb. Sari Bali
1.2	Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	 Beras: 1.029 ton GulaPasir: 616 ton Minyak: 30 ton Telur Ayam: 32 ton Daging Ayam: 34 ton Daging Sapi: 12 ton Cabai: 30 ton BawangMerah: 12 ton Bawang Putih: 12 ton
1.3	Pangan	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar belum memiliki regulasi harga minimum daerah.
1.4	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Sosialisasi P2L Belanja Bahan Bibit Tanaman
1.5	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Peta ketahanan dan kerentanan pangan Tahun 2021.
1.6	Pangan	Tertanganinya kerawananan pangan	Ada	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Terpantaunya Kewaspadaan Pangandan Gizi
1.7	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Peraturan Daerah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Nomor 9 Tahun 2021

		ad	3/2	
los de la companya de	9	100		T he
3				~/
EB		ALAHV	IN SI	5/
	MAD	ALAHK	EAR	

1.8	Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Dinas Perikanan dan Ketahanan	80% dari 60 sampel yang aman dikonsumsi (48 sampel) dari hasil
		noumanum pangam oogar		Pangan Kota	monitoring pada Pasar Tradisional
				Denpasar	dan Pasar Modern.

10. Urusan Pertanahan

Capaian penyelenggaran urusan Pertanahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Keluaran			
1	2	3	4	5	6
10			URUSAN PERTANAHA	AN	
1.1	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbit kan Oleh Bupati/Walikota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+ jumlah surat penolakan pemohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun 0 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Pada tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak memiliki SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
1.2	Pertanahan	SK Bupati/ Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak memiliki SK Bupati/ Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar



		danDaftar Subyek	<u>0</u> 1		Subyek-
1.3	Pertanahan	SK Bupati /Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum /Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak memiliki SK Bupati /Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum /Absentee
1.4	Pertanahan	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun 0 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak memiliki Dokumen Izin membuka tanah
1.5	Pertanahan	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun 0 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak memiliki Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten /Kota



11. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
140	Pemerintahan	Kunci Keluaran	Capaian Kineija	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
11			URUSAN LINGKUNGAN HII	DUP	
1.1	Lingkungan Hidup	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar	 Indeks Kualitas Air = 19,74 Indeks Kualitas Udara = 33,68 Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 6,04 Indeks Kualitas Tutupan Hutan = 0 	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tidak menghitung Indeks Kualitas Hutan karena Kota Denpasar tidak memiliki hutan
2.1	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kota Denpasar	Total penanganan sampah di Kota Denpasar Jumlah timbulan sampah di Kota Denpasa $\frac{346.607}{388.063} x100\% = 89,32\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
3.1	Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota jumlah usulan permohonan yang teregestrasi 122 122 x100% = 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	



3.2	Linglangen Hider	Dogio poichet	Jumlah PPLHD yang ada	Dinos Linglaunger	
3.2	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kota Denpasar terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Denpasar	jumlah kegiatan dan x 100% atau usaha yang izin ingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota $\frac{1}{122}x100\% = 0,82\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
3.3	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jmlh MHA yg diakui jmlh usulan MHA x 100% 0 1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH
3.4	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan jmlh MHA yg ada 0 1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH
3.5	Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan d iklat/rencana target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Jumlah dan Target lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat memang benar belum bisa dipenuhi dikarenakan kegiatan tersebut saat ini memang benar tidak dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota



					Denpasar
3.6	Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kota Denpasar, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kota Denpasar yang ditangani	Pengaduan masyarakat yg ditangani total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi 107/107 x 100% = 100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian penyelenggaran urusan Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber	Keterangan
	Pemerintahan	Keluaran	Kinerja	Data	
1	2	3	4	5	6
12	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
1.1	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Peristiwa perkawinan yang dilaporkan $\frac{3.460}{3.460}x100\% = 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	



1.2	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yangditerbitkan Peristiwa perceraian $x100\%$ yang dilaporkan $\frac{512}{512}x100\% = 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
1.3	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian $\frac{yang\ diterbitkan}{Peristiwa\ kematian}x100\%$ $yang\ dilaporkan$ $\frac{5.190}{5.190}x100\% = 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
1.4	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajiandata kependudukanskala kotadenpasar dalamsatutahun 2tahun 2 x100%= 50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	

Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian penyelenggaran urusan Pemerdayaan Masyarakat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Keluaran	Kinerja		
1	2	3	4	5	6
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1.1	Pemberdayaan	Jumlah desa yang	0	Dinas Pemberdayaan	Pada tahun 2021 tidak melaksanakan
	Masyarakat Dan	terfasilitasi dalam kerjasama	1	Masyarakat dan Desa Kota	kegiatan Kerjasama Antar Desa di Dinas
	Desa antar Desa Denpasar		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota		
					Denpasar. Dikarenakan di desa belum ada
					yang dikerjasamakan antar desa.



1.3	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0 1 LPM: 43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar DinasPemberdayaanMasyara katdanDesa Kota Denpasar	Pada tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan Kerjasama Antar Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Dikarenakan di desa belum ada yang dikerjasamakan antar desa.
1.4	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatannya dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.	<u>0</u> 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Pada tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan. Dikarenakan lembaga kemasyarakatan di DPMD tidak melaksanakan kegiatan ekonomi produktif.
2.1	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	<u>0</u> 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Pada tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan Kerjasama Antar Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Dikarenakan di desa belum ada yang dikerjasamakan antar desa.
2.2	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya.	<u>0</u> 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Pada tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan Kerjasama Antar Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Dikarenakan di desa belum ada yang dikerjasamakan antar desa.
2.3	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	LPM : 43	DinasPemberdayaanMasyara katdanDesa Kota Denpasar	
2.4	Pemberdayaan Masyarakat Dan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga	$\frac{0}{1}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota	Pada tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan lembaga



	Desa	kemasyarakatan dan		Denpasar	kemasyarakatan dan lembaga adatnya
		lembaga adatnya			melaksanakan
		melaksanakan kegiatan			kegiatan ekonomi produktif dan
		ekonomi produktif dan			pemberdayaan.
		pemberdayaan			Dikarenakan lembaga kemasyarakatan di
					DPMD tidak
					melaksanakan kegitan ekonomi produktif.
2.4	Pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa	0	Dinas Pemberdayaan	Pada tahun 2021 tidak melaksanakan
	Masyarakat Dan	yang lembaga	1	Masyarakat dan Desa Kota	kegiatan lembaga
	Desa	kemasyarakatan dan		Denpasar	kemasyarakatan dan lembaga adatnya
		lembaga adatnya			melaksanakan
		melaksanakan kegiatan			kegiatan ekonomi produktif dan
		ekonomi produktif dan			pemberdayaan.
		pemberdayaan			Dikarenakan lembaga kemasyarakatan di
					DPMD tidak
					melaksanakan kegitan ekonomi produktif.

14. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Capaian penyelenggaran urusan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1.1	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kota Denpasar 2016-2026 Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM		



1.2	Urusan	Median Usia Kawin	MUKP = Jumlah	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Universitas Udayana dengan Badan Keluarga Brencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Tahun 2016 (Perda belum disusun)
	Pengendalian Penduduk & KB	Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	wanita status nikah umur 25-30 + Jumlah status wanita umur 31> 21.775 + 49.300 =71.075	dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
1.3	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	$\frac{22}{1000} = 0,022$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
1.4	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) 160 160 x 100% = 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
1.5	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	Jumlah stakeholders/pemangk u kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang	268 Stakeholder	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	



2.1	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani $\frac{KB\ MKJP}{Jumlah\ faskes} \times 100\%$ $\frac{72}{72} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2.2	Urusan Pengendalian Penduduk &KB	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$Jumlah Peserta$ $\frac{KB Aktif}{Jumlah PUS} \times 100\%$ $\frac{63.024}{81.575} \times 100\% = 77,26\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2.3	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	472 Poktan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2.4	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan 2.693 2.693 X 100% = 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	



3.1	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	$\frac{\frac{\text{IAT+TIAL}}{\text{PUS}} \times 100\%}{\frac{3.017+3.229}{81.575} \times 100\%}$ = 7,66%		
3.2	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga penerima PBI jumlah Keluarga PBI 352 x 100%=100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	

15. Urusan Perhubungan

Capaian penyelenggaran urusanPerhubungan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15			URUSAN PERHUBUNGA	N	
1.1	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan TipeC yang tersedia Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan tandar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	



1.2	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji pertahun Jumlah kendaraan wajib uji 31.458 31524 x 100 % = 99,79%	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Kendaraan Yang Uji per Tahun dilaksanakan 2 kali
1.3	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan Jumlah l intas penyeberangan x 100% dalamKabupaten atau Kota 0 1	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Tidak terdapat lintas angkutan sungai , danau dan penyebrangan dalam Kota dan angkutan darat pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar
1.4	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi Target kebutuhan perlengkapan jalan Provinsi 0 1	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Dinas Perhubungan Kota Denpasar tidak ada pemasangan perlengkapan jalan dijalan Provinsi di Tahun 2021
2.1	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan <u>Kabupaten atau Kota</u> Target kebutuhan perlengkapanJalan Kabupaten atauK ota 24 100 x 100% = 24 %	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	



16. Urusan Komunikasi dan Informasi

Capaian penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
16		URUSA	N KOMUNIKASI DAN INFORM	ASI	
1.1	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintahatau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah x 100% 36 x 100% = 100%	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
1.2	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yangdisediakan dinas kominfo Jumlah Perangkat Daerah $\frac{36}{36}$ x $100\% = 100\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
1.3	Komunikasi dan Informasi	Tersedianya system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dansinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	



2.1	Komunikasi dan Informasi	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event) "perangkatdaerahdan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanf aatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerahdan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 1 x 100% = 100%	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.2	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar jumlah Perangkat Daerah $\frac{36}{36}$ x $100\% = 100\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.3	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah perangkat daerah $\frac{36}{36}x\ 100\% = 100\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.4	Komunikasi dan Informasi	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Jumalah Layanan 1/4 x 100% = 25%	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	



2.5	Komunikasi dan Informasi	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan $\frac{\text{sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\%$ $\frac{85}{95} \times 100\% = 89,47\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.6	Komunikasi dan Informasi	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah sistem elektronik 85 95 x 100% = 89,47%	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.7	Komunikasi dan Informasi	Persentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah	Jumlahl ayanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Jumlah layanan publik dan layanan administrasi $\frac{54}{152} \times 100\% = 22,37\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.8	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah $\frac{OPD}{OPD} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.9	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan $\frac{data\ di\ pusat}{Jumlahperangkat daerah} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	



2.10	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya Jumlahperangkatdaerah $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.11	Komunikasi dan Informasi	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang x 100% dimiliki pemerintah daerah $\frac{10}{10}$ x $100\% = 100\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.12	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smartcity Jumlahperangkatdaerah $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.13	Komunikasi dan Informasi	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan DinasKominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasik ompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo Jumlah ASN PengelolaTIK 1 31 x 100% = 3,23%	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.14	Komunikasi dan Informasi	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government	Ada	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014



3.1	Komunikasi dan Informasi	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan peimerintah kabupaten/kota Jumlah penduduk 0	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	Belum terakomodir dalam program dan kegiatan di Dinas Komuikasi informasi dan Statistik Kota Denpasar
3.2	Komunikasi dan Informasi	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Ekomunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Ekomunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi P emerintah Daerah Provinsi 36 x 100% = 100%	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	
3.3	Komunikasi dan Informasi	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	ΣDiseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi <u>Komunikasi (STRAKOM)dan SOP</u> ΣDiseminasi dan layanan Informas iPublik 100% = 100%	Dinas Komuikasi,informasi dan Statistik Kota Denpasar	



17. Urusan Koperasi

Capaian penyelenggaran urusan Koperasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut.

	1	- 444			
No	Urusan	Indikator	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kinerja Kunci Keluaran			
1	2	3	4	5	6
17					
1.1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam 4 417 x 100%= 0,9%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar tidak ada melaksanakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar tidak ada melaksanakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi



1.3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah koperasi x 100% yang ada 0 807x 100%=0%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang diperiksa : Nihil Keterangan : Rasionalisasi Anggaran
1.4	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada 150 807 x 100% = 18,59%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian Jumlah anggota koperasi yang ada 859 137.387 x 100% = 0,6%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	



1.7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada 0 1.144 x100% = 0%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	Tahun 2021 tidak ada koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
1.8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0.26%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	1.Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan - KSU Eka Nawa Cita - KSU Dharmasiaga - KSU Kertasari Sedana Sumber pembiayaan: LPDB 2. Jumlah koperasi yang ada - Denpasar Utara 203 - Denpasar Timur 323 - Denpasar Selatan 340 - Denpasar Barat 278 Jumlah 1.144
1.9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Jumlah koperasi yang ada 334 1.144 x 100% = 29%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan Jumlah koperasi x 100% yang ada	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	Tahun 2021 Koperasi Kota Denpasar tidak ada yang mendapatkan pembiayaan



			$\frac{0}{1}$		
1.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran Jumlah koperasi yang ada	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	Tahun 2021 Koperasi Kota Denpasar tidak ada yang mendapatkan fasilitasi pemasaran
			<u>0</u> 1		
1.12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah koperasi yang ada 30 1.144 x 100% = 2,62%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.13	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi <u>kemitraan</u> Jumlah koperasi yang ada 30 1.144 x 100%= 2,62%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru Jumlah wirausaha yang ada 250 9.370 x 100% = 2,67%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	



2.2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) Jumlah usaha mikro yang ada	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra Jumlah usaha mikro yang ada	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.4	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk	75 30.852 x 100% = 0,24% Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
		usaha	dan sertifikasi Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk 47 193 x 100% = 24%		
2.5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Jumlah usaha x 100%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	



			$\frac{70}{30.852} \times 100\% = 0.2 \%$		
2.7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah usaha mikro yang ada 150 30.752 x 100% = 0,5%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	

Urusan Penanaman Modal

Capaian penyelenggaran urusanPenanaman Modal berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
18			URUSAN PENAN	AMAN MODAL	
1.1	Penanaman	PERDA mengenai		Dinas Penanaman	Pada Dinas Penanaman Modal dan
	Modal	pemberian		Modal dan Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
		fasilitas/intensif	<u>0</u>	Terpadu Satu Pintu	Denpasar tidak terdapat Perda
		penanaman modal	1	Kota Denpasar	mengenai pemberian
		yang menjadi			fasilitas/intensif penanaman modal
		kewenangan daerah			yang menjadi kewenangan daerah
		kabupaten/kota			Kota Denpasar
1.2	Penanaman	Standar operasional		Dinas Penanaman	Pada Dinas Penanaman Modal dan
	Modal	prosedur pelaksanaan	<u>0</u>	Modal dan Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
		pemberian	1	Terpadu Satu Pintu	Denpasar tidak terdapat Standar
		fasilitas/insentif		Kota Denpasar	operasional prosedur pelaksanaan
		penanaman modal			pemberian fasilitas/insentif



					penanaman modal
1.3	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	<u>0</u> 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tidak terdapat Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
1.4	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	$\frac{0}{1}$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tidak terdapat Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting
1.5	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	0 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tidak terdapat Kegiatan pameran penanaman modal
1.6	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	<u>0</u> 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar pada tahun 2020 tidak terdapat Kegiatan penerimaan misi penanaman modal
1.7	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.413 Permohonan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
1.8	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.115 dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Yang terdiri atas: 1) Penerbitan perizinan = 1.589 dokumen 2) Penerbitan non perizinan = 526 dokumen
1.9	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kotaterdiri atas - Jumlah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	



			realisasiinvestasi penanaman modal asing = Rp. 1.255.391.309.224 - Jumlah realisasi investasipenanama n modal dalamnegeri = Rp. 3.121.876.820.851 Jumlah = Rp. 4.377.268.130.075		
1.10	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	8 Orang aparatur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
1.11	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	432 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
1.12	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	 Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi = 31 Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima= 31 	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	



19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian penyelenggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Keluaran			
1	2	3	4	5	6
19		UR	USAN KEPEMUDAA	N DAN OLAHRAGA	
1.1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlahpemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	23 Orang	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
1.2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	<u>0</u> 1	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Tidak terdapatnya program dan kegiatan untuk pemberian bantuan kewirausahaan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar
2.1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan kepedulian kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	2 Orang	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0 1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Pada Tahun 2021 Terkait tidak adanya pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga belanja yang sudah di anggarkan dan di tuangkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) di revisi



					untuk ditunda Tahun Anggaran berikutnya
3.1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi disatuan-satuan pendidikan	181 Pelatih	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR Prestasi tingkat daerah	8 Event Olahraga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	

20. Urusan Statistik

Capaian penyelenggaran urusan Statistik berdasarkan Indikator Kinerja KunciKeluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Keluaran			
1	2	3	4	5	6
20			URUSAN S	TATISTIK	
1.1	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Buku Denpasar Membangun
1.2	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	<u>0</u> 1	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Denpsar.
1.3	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	<u>0</u> 1	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut



1.4	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada <u>0</u> 1	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Denpsar . Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS yang dilakukan mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut
1.5	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Tidak ada <u>0</u> 1	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut.
1.6	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral Jumlah kegiatan X 100% statistik sektoral 0 1	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut.
1.7	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral jumlah indikator statistik sektoral 0 1	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut



21. Urusan Persandian

Capaian penyelenggaran urusan Persandian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator	Capaian Kinerja	Sumber	Keterangan
	Pemerintahan	Kinerja Kunci Keluaran		Data	
1	2	3	4	5	6
21			URUSAN PERSANDIAN	7	
1.1	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan $x = \frac{100\%}{3}$ yumlah kegiatan strategis yang ada $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	
1.2	Persandian	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik ataua aplikasi penyandian Jumlah SE yang ada x 100% 0 1	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Belum adanya program dan kegiatan pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar terkait jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian.
1.3	Persandian	Persentase system elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori <u>rendah</u> Jumlah SE yang ada	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	belum adanya program dan kegiatan pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar terkait jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko katagori rendah



			$\frac{0}{1}$		
1.4	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan Jumlah titik pada PHKS 0 1	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	belum adanya program dan kegiatan pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar terkait Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan

22. Urusan Kebudayaan

Capaian penyelenggaran urusan Kebudayaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Keluaran			
1	2	3	4	5	6
22			URUSAN KEBUDAYAAN		
1.1	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	254 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.2	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	3 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Terdiri dari : 1. Prasasti Blanjong, 2. Hotel Inna Bali, dan 3. Pura Maospahit Gerenceng



1.3	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Terdiri dari: 1.Prasasti Blanjong, 2.Hotel Inna Bali, dan 3. Pura Maospahit Gerenceng
1.4	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	15 Orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.5	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan 861 - 0 = 861	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.6	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya Kota Denpasar (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Dilaksanakan Delapan (8) kali pemugaran	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Diantaranya: 1) Kori Agung Pohmanis, 2) Kori Agung Pura Alas Harum Ubung 3) Gedong Ratu Puseh Peguyangan, 4) Balai Kulkul Banjar Kebon Kori Kelod, 5) Balai Kulkul Pura Desa Peguyangan, 6) Kori Agung Pura Pasek Dangka Sesetan, 7) Kori Agung Pura Dalem Kehen Kesiman, 8) Kori Agung Pura Tambang Badung
1.7	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa		Dinas	Layanan perizinan membawa



		cagar budaya Kota Denpasar ke luar provinsi dengan dukungan data	0 1	Kebudayaan Kota Denpasar	cagar budaya Kota Denpasar ke luar provinsi dengan dukungan data, memang benar belum bisa dipenuhi dikarenakan kegiatan tersebut saat ini memang belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
1.8	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya Kota Denpasar (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi sebanyak 3 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Terdiri dari: 1) Prasasti Blanjong, 2) Hotel Inna Bali, dan 3) Pura Maospahit Gerenceng
1.9	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya Kota Denpasar (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	3 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Terdiri dari: 1) Prasasti Blanjong, 2) Hotel Inna Bali, dan 3)Pura Maospahit Gerenceng
1.10	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum sebanyak 120 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.11	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum sebanyak 123 Orang Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum sebanyak 0	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tidak berpartisipasi dalam pengelolaan museum di Tahun 2021 dikarekan pandemi.
1.12	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum sebanyak 120 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	•
1.13	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk adalah 8 Orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	



1.14	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kota Denpasar	6 Orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.15	Kebudayaan	Fasilitas Sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah pembentukan tim ahli CB adalah 6 Orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.16	Kebudayaan	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum sebanyak 29 orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.17	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang sudah bersertifikasi 6 Orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.18	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) Sebanyak 2	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.19	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0 1	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Tidak terdapat penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat di Tahun 2021 dikarenakan pandemic.



23. Urusan Perpustakaan

Capaian penyelenggaran urusanPerpustakaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
МО		_	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
_	Pemerintahan	Keluaran	_	_	
1	2	3	4	5	6
23			URUSAN PERPUSTAKAAN		
1.1	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 33.719 652.728 x 100% = 5,17%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
1.2	Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kun jungan pemustaka yang meman faatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite Jumlah penduduk di wilayahnya 1.120 652.728 x 100% = 0,17%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	



1.3	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 388 652.728 Ketersediaan tenaga perpustakaan x 100% 388 652.728	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
1.4	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya 12 372 x 100% = 3,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
1.5	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1.120	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.1	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.2	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.3	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	125 Buku



24. Urusan Kearsipan

Capaian penyelenggaran urusan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
24			URUSAN KE	ARSIPAN	
1.1	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip aktif 1.144 1.144 x 100% = 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
1.2	Kearsipan	Persentase arsip in- aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip inaktif 500 500 x 100% = 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
1.3	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Jumlah seluruh arsip statis 0 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Surat Pernyataan Tidak ada sarana bantu temu balik arsip statis dikarenakan tidak melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip dan tidak mendapatkan alokasi anggaran.



1.4	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Surat Pernyataan Tidak melaksanakan SIKN JIKN dikarenakan server di Pusat (ANRI) penuh, disarankan untuk berdiri sendiri.
			1		
2.1	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.2	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	3 Alat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.3	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kecamatan/Kelurahan yang sesuai NSPK di Provinsi
2.4	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	<u>0</u> 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK, karena tidak mendapatkan alokasi anggaran.



2.5	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	326	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.6	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	<u>0</u> 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian penyelenggaran urusanKelautan dan Perikanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
25			URUSAN KEL	AUTAN DAN PERIKANA	N
1.1	Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	29 RTP	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	 Penyewaan Perahu = 17 Penyediaan Umpan = 3 Penyewaan Boat = 1 Pengolahan Produk Hasil Tangkapan = 4 Penyewaan Perahu dan Penyediaan Umpan =



					1 6. Perahu = 3 Jumlah = 29 RTP
1.2	Perikanan	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	<u>0</u> 1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
1.3	Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	0 1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tidak ada ijin usaha perikanan (IUP)
1.4	Perikanan	Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemerdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	235	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	
1.5	Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	8.678.056	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	 Produksi Benih Triwulan I = 1.724.300 Produksi Benih Triwulan II = 2.256.250 Produksi Benih Triwulan III = 2.221.036 Produksi Benih Triwulan IV = 2.476.470 Jumlah = 8.678.056



26. Urusan Pariwisata

Capaian penyelenggaran urusan Pariwisata berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber	Keterangan
МО	Pemerintahan	Kunci Keluaran	Capaian Kineija	Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	2	<u> </u>	•	I	6
26			URUSAN PAR		
1.1	Pariwisata	Jumlah entitas	53	Dinas Pariwisata	1. Daya Tarik Wisata Alam = 24
		pengelolaan destinasi	Daya tarik Wisata	Kota Denpasar	2. Daya Tarik Wisata Budaya = 23
					3. Daya Tarik Wisata Buatan = 6
					Jumlah = 53
1.2	Pariwisata	Jumlah kelengkapan	762 fasilitas umum	Dinas Pariwisata	
		infrastruktur dasar,	dan fasilitas	Kota Denpasar	
		fasilitas umum dan	pariwisata	110th 2 offpaser	
		fasilitas pariwisata	parmidata		
		-			
1.3	Pariwisata	Jumlah tanda daftar	14 TDUP	Dinas Penanaman	
		usaha pariwisata per		Modal dan Pelayanan	
		sub jenis usaha di		Terpadu Satu Pintu	
		kabupaten/kota		Kota Denpasar dan	
				Dinas Pariwisata	
				Kota Denpasar	
1.4	Pariwisata	Jumlah wisatawan	2.358 orang	Polsek Denpasar	1. Asia Pasifik Diluar ASEAN = 846
		mancanegara per		Utara, Selatan dan	2. ASEAN = 47
		kebangsaan		Barat dan Dinas	3. Afrika = 7
		_		Pariwisata Kota	4. America = 263
				Denpasar	5. Europa = 1.187
				_	6. Middle East = 8
					Jumlah = 2.358 Orang



1.5	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2 (Dua) kegiatan	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Virtual Sales Mission Gathering Pariwisata
1.6	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	<u>0</u> 1	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar tidak terdapat data jumlah event luar negeri yang diikuti oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar pada Tahun 2021. Dinas Pariwisata Kota Denpasar tidak menganggarkan kegiatan <i>event</i> luar negeri Tahun 2021 dikarenakan kondisi pandemi <i>covid-19</i> .
1.7	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	0 1	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar tidak terdapat data jumlah industri pariwisata daerah yang berpatisipasi pada <i>event</i> promosi pariwisata di dalam negeri pada Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan anggaran di Tahun 2021 pada kegiatan pelaksanaan promosi Nusantara di dalam dan luar negeri terdapat pelaksanaanya rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganaan <i>Covid-19</i> .
1.8	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi Jumlah tenaga kerja pariwisata $\frac{1.416}{3.775} \times 100\% = 37,51\%$	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	



1.9	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan $\frac{kepariwisataan}{Jumlah sasaran} \times 100\%$ pembekalan sektor kepariwisataan $\frac{280}{280} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
1.10	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3 (tiga) lokasi	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	1.Pelatihan Kegitan Keamanan dan Keselamatan 2.Pelatihan Pengelolaan Toilet 3.Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata

27. Urusan Pertanian

Capaian penyelenggaran urusan Pertanian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
27			URUSAN PERT	ANIAN	
1.1	Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	6 Unit	Dinas Pertanian Kota Denpasar	2 Unit Cultivator 4 Unit Transplanter
1.2	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	199.515 meter	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
1.3	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	<u>0</u> 1	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Dengan ini menyatakan bahwa tidak ada data penerbitan usaha pertanian pada Dinas pertanian Kota Denpasar



1.4	Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan Jumlah prasarana yang dibangun 199.515 199.515 x 100%=100%	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
1.5	Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kota denpasar	<u>0</u> 1	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Dengan ini menyatakan bahwa tidak ada datapersentase jumlah usulan izin usaha pertanian pada Dinas pertanian Kota Denpasar
2.1	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi Luas area terkena bencana 1 x 100%=100%	Dinas Pertanian Kota Denpasar	

28. Urusan Kehutanan

Capaian penyelenggaran urusan Kehutanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
28			U	RUSAN KEHUTANAN	
1.1	Kehutanan	Tersedianya dokumen		Bagian Tata Pemerintahan	Kota Denpasar tidak menangani Urusan
		rencana pengelolaan	<u>1</u>	Sekretariat Daerah Kota	Kehutanan karena itu merupakan Urusan
		Tahura	1	Denpasar	Provinsi Bali.
1.2	Kehutanan	Pemberdayaan	<u>1</u>	Bagian Tata Pemerintahan	Kota Denpasar tidak menangani Urusan
		masyarakat di daerah	1	Sekretariat Daerah Kota	Kehutanan karena itu merupakan Urusan
		penyangga		Denpasar	Provinsi Bali.
1.3	Kehutanan	Pemulihan ekosistem	1	Bagian Tata Pemerintahan	Kota Denpasar tidak menangani Urusan
		pada tahura	1	Sekretariat Daerah Kota	Kehutanan karena itu merupakan Urusan



				Denpasar	Provinsi Bali.
1.4	Kehutanan	Menurunnya	1_	Bagian Tata Pemerintahan	Kota Denpasar tidak menangani Urusan
		gangguan kawasan	1	Sekretariat Daerah Kota	Kehutanan karena itu merupakan Urusan
		tahura		Denpasar	Provinsi Bali.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian penyelenggaran urusanEnergi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Keluaran	Kinerja		
1	2	3	4	5	6
29		URUSA	N ENERGI I	DAN SUMBER DAYA MINI	ERAL
1.1	Energi dan Sumber Daya	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	1 1	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Pada Bagian Perekonomian dan sumber daya alam tidak terdapatnya program dan kegiatan untuk koordinasi pemanfaatan panas bumi



30. Urusan Perdagangan

Capaian penyelenggaran urusanPerdagangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
30			URUSAN PERDAGANGA	AN	
1.1	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b.Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar 100% swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar 0 1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Tidak ada data ijin terkait pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang terbit di tahun 2021
1.2	Perdagangan	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja Jumlah permohonan x 100% penerbitan TDG 20/20 x 100% =100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	



1.3	Perdagangan	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG Jumlah gudang yang ada di Kab Kota $\frac{461}{461} \times 100\% = 0\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
1.4	Perdagangan	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk: a)Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b)Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c)Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk enerima w aralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja seja berkas permogonan diterima secaral engkap dan atau benar Jumlah permohonan STPWuntuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri □ □ □ 1 Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri Jumlah STPW untuk penerimalan jutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Tidak ada Data STPW terbit di Tahun 2021
			1		



1.5	Perdagangan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit≤2hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daerah Kab Kota Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer 1/2 x 100% =0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
1.6	Perdagangan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1x24jam) Jumlah permohonan penerbitanSKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Tidak ada Data Penerbitan SKA di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Denpasar.



1.7	Perdagangan	Persentase pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan t elah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) (0,5 + 0,5) x 100% = 100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
1.8	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	122,03%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
2.1	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{871,79 ton}{(868,10 x 964,55 Ton)} \times 100\%$ $= 96,865\%$ $X = \text{Persentase jumlah pupuk yang disalurkan}$ $a = \text{Jumlah pupuk yang disalurkan}$ $b = \text{Target komisi pengawasan}$ $\text{Pupuk dan Pestisida}$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
3.1	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	fumlah UTT bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan Jumlah potensi UTTP yang wajib diterapan dan tera ulang di wilayah Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	



	$\frac{2.652}{1.500}$ x 100% =176,800%		
--	--	--	--

31. Urusan Perindustrian

Capaian penyelenggaran urusan Perindustrian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
31			URUSAN PERINDUSTRIA	AN	
1.1	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan x 100% atau pengajuan izin yang masuk 0 1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Tidak ada penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) di Kota Denpasar Tahun 2021
2.1		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK 50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)
3.1		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 175 x 100% = 100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	



4.1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yangmasuk 0 1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Tahun 2021 tidak ada industri yang mengajukan IPUI
6.1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten /Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil,menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas Total populasi perusahaan industri kecil,menengah d an perusahaan kawasan industri diKab Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Kota Denpasar belum menerapkan SINAS Kementerian Perindustrian sehingga belum bisa memantau Data dari SINAS



32. Urusan Transmigrasi

Capaian penyelenggaran urusan Transmigrasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Keluaran	Kinerja		
1	2	3	4	5	6
32			URUSAN '	TRANSMIGRASI	
1.1	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1 1	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Transmigrasi karena itu merupakan Urusan Provinsi Bali.
1.2	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	<u>1</u> 1	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Transmigrasi karena itu merupakan Urusan Provinsi Bali.
1.3	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1/1	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Transmigrasi karena itu merupakan Urusan Provinsi Bali.



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian pelaksanaan kinerja Kota Denpasar Tahun 2021 dalam laporan ini memuat capaian kinerja kunci untuk hasil (Outcome) sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana berikut.

1. Urusan Pendidikan

Capaian penyelenggaran urusan Pendidikan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1			URUSAN PENDIDIKAN		
1	Urusan Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yangsudah tamat atau sedang belajar disatuan PAUD Jumlah anak usia5-6tahun pada Kota Denpasar yang bersangkutan 17.983 18.649 X 100% = 96,43%	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



2	Urusan Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7 - 12 x 100% tahun pada Kota Denpasar yang bersangkutan 62.362 62.400 x 100% = 99,94%	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
3	Urusan Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13–15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama Jumlah anak usia 13–15 tahun pada Kota Denpasar yang bersangkutan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
4	Urusan Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kota Denpasar yang bersangkutan 1.406 1.436 x 100% = 97,91%	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan OlahragaKota Denpasar



Urusan Kesehatan

Capaian penyelenggaran urusan Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2		1	URUSAN KESEHATAN		
1	Kesehatan	Mengukur rasio daya tamping rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan Jumlah Penduduk di Kota Denpasar 2.452 652.728 x 100% = 0,376%	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	Kesehatan	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi Jumlah RS di Kota Denpasar 14 21 x 100% = 66,67%	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
3	Kesehatan	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil di Kota Denpasar $\frac{17.051}{17.826} \times 100\% = 95,7\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	



4	Kesehatan	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Jumlah ibu bersalin di Kota Denpasar 16.638 16.934 x 100% = 98,3%	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
5	Kesehatan	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah bayi baru lahir di Kota Denpasar 16.513 16.513 x 100% = 100%	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
6	Kesehatan	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah balita di Kota Denpasar $\frac{39.457}{61.860} x 100\% = 63,8\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
7	Kesehatan	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Denpasar 116.500 117.121 x 100% = 99,5%	Dinas Kesehatan Kota Denpasar



8	Kesehatan	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kota Denpasar 395.845 447.089 Jumlah orang 447.089	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
9	Kesehatan	Mengukur persentase warganegara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kota Denpasar	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
10	Kesehatan	Mengukur persentase penderita hipertensiber usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita x 100% hipertensi di Kota Denpasar 66.902 126.830 x 100% = 52,75%	Dinas Kesehatan Kota Denpasar



11	Kesehatan	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan <u>sesuai standar</u> x 100% DM di Kota Denpasar $\frac{10.353}{10.353} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
12	Kesehatan	Mengukur persentasependerita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita ODGJ di Kota Denpasar $\frac{746}{746} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
13	Kesehatan	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita TBC di Kota Denpasar 3.726 x 100% = 100%	Dinas Kesehatan Kota Denpasar



14	Kesehatan	Mengukur persentase orang dengan resikoterinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota 2.0404 2.3455 x 100% = 86,99%	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
----	-----------	--	---	----------------------------------

3. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3		UF	RUSAN PEKERJAAN UMUM		
1	Urusan Pekerjaan Umum	Mengukur rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Denpasar	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di ws Kewenangan Kota Denpasar (ha) Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian di WS Kewenangan Kota Denpasar (ha)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



			$\frac{187.074 m2}{227.052,31 m2} \times 100 \% = 82,39 \%$		
2	Urusan Pekerjaan Umum	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Denpasar	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Denpasar (m) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota Denpasar (m) 11,26 11,26 x 100 % = 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
3	Urusan Pekerjaan Umum	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota Denpasar yang dilayani oleh jaringan irigasi	luas irigasi kewenangan kota denpasar yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha) dioperasi dan dipelihara (ha) ditahun eksisting luas daerah irigasi kewenangan kota Denpasar 100%	Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



4	Urusan Pekerjaan Umum	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota denpasar	jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah Kota Denpasar jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten Kota Denpasar	Renstra Air Minum Dinas PUPR Kota Denpasar, PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma.
5	Urusan Pekerjaan Umum	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang dimiliki akses pengelolaan berupa cubluk +jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah IPALD Jumlah rumah di Kabupaten 145.062 145.062 x100% = 100%	Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinas PUPR Kota Denpasar



Urusan Pekerjaan	Mengukur rasio kepatuhan	jumlah pemanfaatan	SIMBG (Sistem
Umum	IMB Kota Denpasar	IMB yang sesuai peruntukannya	Informasi Bangunan
		Jumlah IMB yang berlaku x100%	Gedung)
		, ,	Dinas Pekerjaan
		$\frac{1.252}{100}$ x $100\% = 100\%$	Umum dan Penataan
		1.202	Ruang Kota Denpasar
_	9	jumlah panjang jalan	Bidang Bina Marga,
Umum	kemantapan jalan	dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan
		januan total panjang	Umum dan Penataan
		jalan kabupaten kota	Ruang Kota Denpasar
		279 529 92 m	
		$\frac{376.339,92 \text{ m}}{486.084.35 \text{ m}} \times 100 \% = 77,87\%$	
Urusan Pekerjaan	Mengukur rasio tenaga	Jumlah tenaga kera	Dinas Pekerjaan
Umum	operator/teknisi/analisis yang		Umum dan Penataan
	memiliki sertifikat kompetensi	, .	Ruang Kota Denpasar
		jumian kebutunan tenaga	
		-	
		7	
		карираten коta	
		$\frac{236}{5}$ x 100% = 89.05%	
	Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan	Urusan Pekerjaan Umum Mengukur tingkat kemantapan jalan Urusan Pekerjaan Umum Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang	UmumIMB Kota DenpasarIMB yang sesuai peruntukannya Jumlah IMB yang berlakuUrusan Pekerjaan UmumMengukur tingkat kemantapan jalanjumlah panjang jalan dalam kondisi mantap Jumlah total panjang jalan kabupaten kotaUrusan Pekerjaan

		a	S)	
lor s	23) 2 3		BE
M	A			MAN
Bi	ANIADA	ALAH V	EWA	51/

9	Urusan Pekerjaan	Mengukur rasio proyek yang	Jumlah proyek	Dinas Pekerjaan
	Umum	menjadi kewenangan	yang menjadi	Umum dan Penataan
		pengawasannya tanpa	kewenangan	Ruang Kota Denpasar
		kecelakaan konstruksi	pengawasannya	
			tanpa terjadi	
			<u>kecelakaan konstruksi</u> x Jumlah total proyek	:100%
			yang menjadi	
			kewenangan	
			pengawasannya	
			$\frac{13}{13} \times 100 = 100\%$	

4. Urusan Perumahan Rakyat

Capaian penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4		URI	USAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	Urusan Perumahan Rakyat	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota Denpasar	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n yang dimelah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n $\frac{4}{4} \ge 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	



2	Urusan Perumahan Rakyat	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota Denpasar	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan 1 1 1 x 100% =100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota Denpasar.
3	Urusan Perumahan Rakyat	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Denpasar yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 3,78 7,720 x 100% = 48,96%	Dinas Perumaha, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4	Urusan Perumahan Rakyat	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni Jumlah total unit rumah Kabupaten Kota 467 190.034 x 100% = 0,246%	Data Base E-RTLH Kota Denpasar, Dinas Perumaha, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	



5	Urusan Pe	erumahan	Mengukur persentase unit rumah	Jumlah unit	Dinas Perumaha,	
	Rakyat		yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	rumah yang sedang dibangun <u>terfasilitasi PSU</u> Jumlah unit x 100%	Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
				rumah kab/kota $\frac{190.034}{190.034} \times 100\% = 100\%$		

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Hasil			
1	2	3	4	5	6
5		URUSAN KETENTRAMAN	N, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDU	NGAN MASYARAKAT	
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Pengaduan yang ditangani Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk $\frac{687}{687}x100\% = 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	



2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi $\frac{11}{11}x100\% = 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	652.728 Warga Negara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21.346 Warga Negara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan $\frac{112}{1} \times 100\% = 112\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	



6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi korban Terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu Tanggap oleh Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 105 105 x 100% = 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,8 menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	



6. Urusan Sosial

Capaian penyelenggaran Urusan Sosial berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Hasil			
1	2	3	4	5	6
6			URUSAN SOSIAL		
1	Sosial	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tepenuhi kebutuhan dasanya di luar panti Populasi penyandang x 100% disabilitas terlantar ,anak terlantar ,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 105 105 x 100% = 100%	Dinas Sosial Kota Denpasar	



2	Sosial	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bnencana derah Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada Dinas Sosial Kota Denpasar anggaran tahun 2021 Kota Denpasar tidak ada korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerahkabupaten/kota
---	--------	---	--	-------------------------------	---

7. Urusan Ketenagakerjaan

Capaian penyelenggaran urusan Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
7			URUSAN KETENAGAKERJAAN		
1	Ketenagakerjaan	Mengukur persentase kegi yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenag kerja	keselurunan yang dilaksanakan yang	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompentensi Kota Denpasar	



2	Ketenagakerjaan	Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja keseluruhan 7.496 499.900 x 100 % = 0,499%	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
3	Ketenagakerjaan	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan $\frac{(atas\ dasar\ harga\ konstan)}{jumlah\ tenaga\ kerja} \times 100\%$ $\frac{\frac{32.447,06}{499.900}}{} \times 100\% = 6,49\%$	BPS Provinsi Bali dan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompentensi Kota Denpasar
4	Ketenagakerjaan	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja $\frac{yang\ layak}{Jumlah\ perusahaan} \ x\ 100\%$ $\frac{200}{200} \ x\ 100\ \% = 100\%$	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
5	Ketenagakerjaan	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Denpasar	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan Jumlah pencaker yang terdaftar $\frac{607}{883} \times 100 \% = 68,74 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



8. Urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Capaian penyelenggaran urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
8		URUSAN PERLI	NDUNGAN PEREMPUAN DAN PE	RLINDUNGAN ANAK	
1	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD Jumlah seluruh belanja langsung di APBD 376.890.657.373 1.065.327.565.776 x 100% = 35,38%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kota Denpasar	Jumlah anak (penduduk usia (kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten Kota yang didampingi Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 137 184.460 x 100% = 0,07%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
3	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami <u>kekerasan</u> Jumlah penduduk perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	



	$\frac{115}{362.383} \times 100.000 = 35,23\%$		
--	--	--	--

9. Urusan Pangan

Capaian penyelenggaran Urusan Pangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
9			URUSAN PANGAN		
1	Pangan	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah <u>cadangan pangan</u> x 100% Jumlah kebutuhan pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	



10. Urusan Pertanahan

Capaian penyelenggaran urusan Pertanahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Hasil	_	_	
1	2	3	4	5	6
10			URUSAN PERTANA	HAN	
1	Pertanahan	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan i jin lokasi Seluruh luas tanah yang diberikan i jin lokasi 1 x 100% = 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi
2	Pertanahan	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetepan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 1 x 100% = 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
3	Pertanahan	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi Luas izin lokasi yang diterbitkan 1 x 100% = 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan luas tanah yang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan nya diatas izin



4	Pertanahan	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasa ldari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landref orm dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha Jumlah penerima tanah obyek landref orm 1 x 100% = 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	lokasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan penerima tanah Landreform dengan luas aysan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha
5	Pertanahan	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfatatkan berdasarkan izin membuka tanah Luas izin membuka tanah yang diterbitkan 1 x 100% = 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah
6	Pertanahan	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan 17/2 x 100%= 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	



11. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Hasil			
1	2	3	4	5	6
11			URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
1	Lingkungan Hidup	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar	IKLH Kota Denpasar = (IKA 30%) + (IKU30%)+(IKTL 40%) = (52,50 x 30%) + (83,17 x 30%) + (27,59 x 40%) = 15,75 + 24,951 + 11,036 = 51,737	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
2	Lingkungan Hidup	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kota Denpasar	Total volume sampah yang dapat ditangani total volume timbunan x 100% sampah kabupaten/kota 346,607 388,063 x 100% = 89,31%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
3	Lingkungan Hidup	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar	(Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota) usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan $\frac{5}{46} \times 100\% = 10,87\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	



12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian penyelenggaran urusanAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Hasil			
1	2	3	4	5	6
12		URUSAN AD	MINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN C	ATATAN SIPIL	
1	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kota Denpasar	Jumlah penduduk wajib KTP -el yang telah melakukan perekaman Jumlah penduduk 1 7 tahun ke atas $\frac{484.471}{491.452} \times 100 \% = 98,58\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
2	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA Jumlah anak usia 0 – 17 tahun $x = \frac{109.175}{161.278} \times 100 \% = 67,69\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
3	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir Jumlah anak usia 0 – 18 tahun $x = \frac{179.432}{183.850} \times 100 \% = 97,60\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	



4	Administrasi	Mengukur persentase	Jumlah OPD yang telah	Dinas Kependudukan dan	
	Kependudukan	perangkat daerah yang	memanf aatkan data	Pencatatan Sipil Kota	
	dan Catatan	telah memanfaatkan	kependudukan berdasarkan	Denpasar	
	Sipil	data kependudukan	perjanjian kerja sama x 100%		
		berdasarkan perjanjian	Jumlah OPD		
		kerjasama	14 100 0/ - 20 000/		
			$\frac{14}{36} \times 100 \% = 38,89\%$		

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Capaian penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	CapaianKinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Hasil			
1	2	3	4	5	6
13		URU	SAN PEMBERDAYAAN MASYA	RAKAT DAN DESA	
1	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun Jumlah desa tertinggal x 100% (per-awal tahun n) $\frac{1}{1} \times 100 \% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Denpasar	Tahun 2021 sudah <u>tidak terdapat</u> Desa Tertinggal di Kota Denpasar



2	Pemberdayaan	Mengukur	Jumlah desa berkembang yang memenuhi	Dinas Pemberdayaan	Tahun 2021 sudah
	Masyarakat	perkembangandesa	ktiteria desa	Masyarakat Dan Desa Kota	tidak terdapat Desa
	Dan Desa	yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) 1/2 x 100 % = 100%	Denpasar	Berkembang di Kota Denpasar Dikarenakan pada Tahun 2021 status Desa pada Kota Denpasar sudah mencapai Status Desa
					Mandiri

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan	Kunci Hasil			
1	2	3	4	5	6
14		URUSAN PEN	NGENDALIAN PENDUDUK DAN KE	ELUARGA BERENCANA	
1	Pengendalian Penduduk & KB	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	TFR = $5\sum_{i=1}^{7} ASFR i = 1,99$ ASFRi = $\frac{b_i}{p_i^f} \times k = 398$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2	Pengendalian Penduduk & KB	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	$\frac{\textit{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\textit{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$ $\frac{63.024}{81.575} \times 100\% = 77,26\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	



				dan Keluarga Berencana Kota	
				Denpasar	
3	Pengendalian	Persentase kesertaan	Jumlah PUS yang ingin ber–KB tetapi	Dinas Pemberdayaan	
	Penduduk & KB	KB di Kabupaten dan	tidak terlayani x 100%	Perempuan dan Perlindungan	
		Kota dengan kesertaan	Jumlas Pasangan Usia Subur	Anak, Pengendalian Penduduk	
		rendah	(24)	dan Keluarga Berencana Kota	
			$\frac{6.246}{81.575} \times 100\% = 7,66\%$	Denpasar	

15. Urusan Perhubungan

Capaian penyelenggaran urusan Perhubungan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	1 cmcimumum	nunci musii			
1	2	3	4	5	6
15			URUSAN PERHUBUNGAN		
1	Perhubungan	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK 1 = Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek) ÷ jumlah kebutuhan trayek IK2 = Jumlah Lintas penyeberangan yang beroprasi x bobot lintas ÷ jumlah kebutuhan lintas penyeberangan Bobot Angkutan Sungai, danau,	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	IK1 = Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek) ÷ jumlah kebutuhan trayek - IK2 = Jumlah Lintas penyeberangan yang beroprasi x bobot lintas ÷ jumlah kebutuhan lintas penyeberangan o Bobot Angkutan Sungai,danau,penyeberangan = 0 o Bobot Angkutan Jalan = 100 o Bobot trayek = 0,5



2 Perhubunga	ngan - Menetapkan nilai dengan kejenuhan / kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan Geometri jalan meliputi letak ruas jalan, lebar bahu dan median	penyeberangan Bobot Angkutan Jalan Rasio Konektivitas Kabupaten / Kota = (IK 1 x bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Sungai, Danau Penyeberangan) = ((11 x 0,5) : 11) x 100) + ((0 x 0,5) : 0) x 0) = $\frac{50+0}{100}$ = 0,5 V/C ratio di jalan Kabupaten / Kota 0,70 (C)	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	 ○ Bobot Lintas = 0,8 ○ Jumlah Trayek = 11 ○ Jumlah Kebutuhan trayek = 11 ○ Jumlah Lintas Penyeberangan = 0 ○ Jumlah Kebutuhan Lintas Penyeberangan = 0
--------------	---	--	---------------------------------------	--



16. Urusan Komunikasi dan Informasi

Capaian penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		
16		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI					
1	Komunikasi dan Informasi	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD 36/36 x 100% = 100%	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar			
2	Komunikasi dan Informasi	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik $\frac{170}{189} \times 100\% = 89,95\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar			
3	Komunikasi dan Informasi	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan peimerintah kabupaten/kota Jumlah penduduk 652.728 x 100% = 100%	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar dan DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar			



17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian penyelenggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahberdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
17		URUSAN	KOPERASI, USAHA KECIL DAN M	ENENGAH	
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualtiasnya berdasarkan RAT,volume usaha dan aset Jumlah seluruh koperasi 481 503 100%= 92,63%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha Jumlah usaha mikro keseluruhan 9.370 30.852 x 100% = 30,37%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	



18. Urusan Penanaman Modal

Capaian penyelenggaran urusan Penanaman Modal berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	6	7
18			URUSAN PENANAMAN MODAL		
1	Penanaman Modal	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	$ \begin{pmatrix} Jumlah \ inevstasi \\ tahun \ n-jumlah \ investasi \\ tahun \ n-1 \\ \hline \frac{di \ kabupaten/kota}{Jumlah \ investasi} & x \ 100\% \\ tahun \ n-1 \\ di \ kabupaten/kota \\ \hline \frac{(2.223.566.489.301-759.755.428.729)}{759.755.428.729} & x \ 100\% \\ \hline = \frac{1.463.811.060.572}{759.755.428.729} & x \ 100\% \\ \hline = \text{Peningkatan } 192,67\% $	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	



19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian penyelenggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
МО	Pemerintahan	Kunci Hasil	Capaian Mileija	Sumber Data	Neterangan
1	2	3	4	5	6
19	_		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$[Jumlah\ pemuda\ (16-30\ tahun)$ $yang\ berwirausaha$ $di\ kabupaten/kota$ $[Jumlah\ pemuda\ (umur\ 16-30\ tahun)]$ $x\ 100\%$ $di\ kabupaten/kota$ $\frac{23}{158.317}\ x\ 100\% = 0,01\%$	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	(Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di kabupaten/kota 120.576 157.318 x 100% = 76,64%	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	0 medali Tahun 2021 tidak ada atlet yang mendapatkan medali di tingkat nasional	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



20. Urusan Statistik

Capaian penyelenggaran urusan Statistik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
20		U	RUSAN STATISTIK		
1	Statistik	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD 36/36 x 100% = 100%	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	
2	Statistik	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD x 100% 36/36 x 100%=100%	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	



21. Urusan Persandian

Capaian penyelenggaran urusan Persandian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
21			URUSAN PERSANDIAN		
1	Persandian	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten /Kota	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) Jumlah area penilaian	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	
			$\frac{5}{5}$ x 100% = 100%		

22. Urusan Kebudayaan

Capaian penyelenggaran urusan Kebudayaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
22			URUSAN KEBUDAYAAN		
1	Kebudayaan	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang terdata	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
			$\frac{254}{254} \times 100\% = 100\%$		



23. Urusan Perpustakaan

Capaian penyelenggaran urusan Perpustakaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
23			URUSAN PERPUSTAKAAN		
1	Perpustakaan	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan kearsipan sudah melakukan pengukuran kegemaran membaca masyarakat melalui survey secara online dengan metode random sampling. Untuk tahun 2021 tingkat kegemaran membaca masyarakat yaitu 19,36%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2	Perpustakaan	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	UPLM = 0,1077 ALM Propinsi Bali = 0,4458 Indek PLM = UPLM/ALM*100 0,1077/0,4458*100 = 24,16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	



24. Urusan Kearsipan

Capaian penyelenggaran urusan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
24			URUSAN KEARSIPAN	ĺ	
1	Kearsipan	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T= a + i + s + j $T = 45,76 + 20 + 0 + 0$ $= 65,76%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	 a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 45,76% i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 20 s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik = 0 j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN = 0 T = Tingkat ketersediaan arsip = 65,76%
2	Kearsipan	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6}$ $T = \frac{(97 + 3 + 0 + 0 + 0 + 326)}{6}$ $= 71$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	



25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian penyelenggaran urusan Perikanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
25		UR	RUSAN KELAUTAN PER	IKANAN	
1.	Perikanan	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota Denpasar	1.988,2 Ton	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Total Produksi perikanan laut = 1.626,5 Ton 2. Total Produksi perikanan darat = 361,7 Ton Jumlah = 1.988,2 Ton



26. Urusan Pariwisata

Capaian penyelenggaran urusan Pariwisata berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
26			URUSAN PARIWISA	TA	
1	Pariwisata	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan $tahun n - $ Jumlah wisatawan $\frac{tahun n - 1}{Jumlah wisatawan} \times 100\%$ $tahun n - 1$ $\frac{(2.358 - 32.180)}{32.180} \times 100\%$ $= -92.67\%$	Polsek Denpasar Utara , Selatan dan Barat dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
2	Pariwisata	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan $tahun n - Iumlah$ wisatawan $\frac{tahun n - 1}{Jumlah wisatawan} \times 100\%$ $tahun n - 1$ $\frac{(39.901 - 29.014)}{29.014} \times 100\%$ $= -37,52\%$	Polsek Denpasar Utara , Selatan dan Barat dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar	



3	Pariwisata	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota	$\frac{yang\ terjual}{yang\ terjual} \times 100\%$ $yang\ tersedia$ $\frac{951}{12.854} \times 100\% = 7,40\%$	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
4	Pariwisata	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)	Rp. 9.426.092.650.000	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
5	Pariwisata	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku)	Rp.104.723.689.370,14	Laporan Realiasasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar (unaudited) dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar	

27. Urusan Pertanian

Capaian penyelenggaran urusan Pertanian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
27		UI	RUSAN PERTANIAN		
1	Pertanian	Mengukur tingkat produktivitas pertanian	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun Luas panen	Dinas Pertanian Kota Denpasar	



			$\frac{25.338 \text{ Ton}}{3.423 \text{ ha}} = 740,23 \text{ Ton/ha}$		
2	Pertanian	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun ber jalan (t) — jumlah kejadian penyakit hewan menular tahun sebelumnya Jumlah kejadian hewan menular tahun sebelumnya (t-1) 1	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Terdapat 1 kejadian penyakit kasus yaitu kasus babi mati pada Tahun 2020 dan Kasus Anjing Rabies Tahun 2021

28. Urusan Kehutanan

Capaian penyelenggaran urusan Kehutanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
28			URUSAN KEI	IUTANAN	
1	Kehutanan		$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Kehutanan karena merupakan Urusan Provinsi Bali



29. Urusan Energi dan Sumber Daya

Capaian penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
29	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA					
1	Energi dan Sumber Daya	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	Jnmlah perusahaan pemanfaaatan panas bumi yang memiliki ijin Jumlah perusahaan x 100% pemangfaatan panas bumi 1 x 100% = 100%	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Pada Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar tidak terdapatnya program dan kegiatan untuk koordinasi pemanfaatan panas bumi karena Kota Denpasar tidak mempunyai Energi dan Sumber Daya	

30. Urusan Perdagangan

Capaian penyelenggaran urusan Perdagangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
1	2	3	4	5	6			
30		URUSAN PERDAGANGAN						
1	Perdagangan	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin <u>sesuai ketentuan</u> Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar Bidang Perdagangan Disperindag Kota Denpasar DPMPTSP Kota Denpasar				



			$\frac{170}{245} \times 100\% = 69,38\%$		
2	Perdagangan	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ $\frac{871,79 \text{ Ton}}{964,55 \text{ Ton}} \times 100\% = 90,38\%$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
3	Perdagangan	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota 2.652 1.500 x 100% = = 176.800%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	

31. Urusan Perindustrian

Capaian penyelenggaran urusan Perindustrianberdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
31		UI	RUSAN PERINDUSTRIAN		
1	Perindustrian	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	JumlahIndustri kecil dan menengah tahun n-jumlah idustri kecil dan menengah tahun n-1 Jumlah insutri kecil dan menengah tahun n-1 (5.036-4.834) 4.834 x 100% = 4,18%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	



2	Perindustrian	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Draft tentang Rancangan Rencana Pembangunan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Draft Masih dalam proses pengajuan
3	Perindustrian	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantaudan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan $\frac{20}{244} \times 100\% = 24,59\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
4	Perindustrian	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang di pantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan x 100% $\frac{1}{1} x100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Kota Denpasar pada Tahun 2021 tidak ada industri yang mengajukan PUI
5	Perindustrian	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan 1 x 100% = 100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak ada Kawasan Industri
6	Perindustrian	Mengukur ketersediaan informasi industry secara lengkap dan terkini	Ketersediaan informasi industri lengkap secara lengkap dan terkini sebesar 60% 1) Keterkinian informasi industri:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	

	- Tersedianyainformasi industry denganbataswaktu 0-6 bulan (50%) 2) Kelengkapaninformasi industry meliputi: - Informasiproduksidankapasit asproduksi (10%)	
--	--	--

32. Urusan Transmigrasi

Capaian penyelenggaran urusan Transmigrasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
32			URUS	SAN TRANSMIGRASI	
1	Transmigrasi		$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani urusan transmigrasi karena urusan transmigrasi merupakan urusan dari Provinsi Bali

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian pelaksanaan kinerja Kota Denpasar Tahun 2021 dalam laporan ini memuat capaian kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang



Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana berikut :

1. Urusan Perencanaan Dan Keuangan

Capaian penyelenggaran urusan Perencanaan Dan Keuangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1			URUSAN PERENCANAAN DAN KEUAN	GAN	
1	Perencanaan Dan Keuangan	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga <u>kesehatan</u> x100% Jumlah APBD 328.109.925.635 408.848.906.976 x 100% = 7,44%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar	
2	Perencanaan Dan Keuangan	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah	Jumlah PAD jumlah Non migas x 100% 792.361.913.752,87 9.588.376,87 = 1.597.878,30%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar	
3	Perencanaan Dan Keuangan	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Kualitas SPIP level 3 berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP dengan nilai 3,064	Inspektorat Kota Denpasar	
4	Perencanaan Dan Keuangan	Melihat tingkat peningkatan apabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat Kota Denpasar	



5	Perencanaan Dan Keuangan	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam	Jumlah belanja urusan –transfer <u>expenditures</u> Jumlah belanja x 100% APBD	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
		APBD di luar transfer expenditures	$\frac{1.427.535.050.958,7}{1.925.696.608.874,12} \times 100\% = 74,13\%$	
6	Perencanaan Dan Keuangan	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir	Opini Laporan Keuangan: 2011: WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 2012 - 2016: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2017 - 2019: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2020: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2021: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar

2. Urusan Pengadaan

Capaian penyelenggaran urusan Pengadaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2			URUSAN PENGADA	AN	
1	Pengadaan	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar Kota Denpasar Infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kwar	



			$\frac{0}{1} \times 100\% = 0$		dan Kota Denpasar tidak memiliki Pengadaan Konstruksi yang dibawa ke tahun 2022
2	Pengadaan	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 1.630 5.565 x 100% = 29,29%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	
3	Pengadaan	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan Total belanja langsung 65.951.821.83092 1.529.910.555592,23 X 100% = 4,31 %	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	



3. Urusan Kepegawaian

Capaian penyelenggaran urusan Kepegawaian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3			URUSAN KEPEGAWAIAN		_
1	Kepegawaian	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas Seluruh jumlah pegawai dengan pendidkan SMA ke bawah 1.565 1.016 Jumlah va 100% 1.54,04%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	Kepegawaian	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\frac{121}{2.581} x \ 100\% = 14,69\%$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	



3	Kepegawaian	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Seluruh jumlah x 100% pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 107/121 x 100% = 88,43%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
---	-------------	---	---	--	--

4. Urusan Manajemen Keuangan

Capaian penyelenggaran urusan Manajemen Keuangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN		
1	Manajemen Keuangan	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi total belanja APBD dikurangi satu 1.925.695.566.384,40 2.204.424.453.487,00 =87,36% - 100 = - 12,64%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	



2	Manajemen Keuangan	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Total PAD dalam APBD dikurangi satu 792.361.913.752,87 669.954.138.635 x 100% =118,27% - 100 = 18,27%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
3	Manajemen Keuangan	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/ Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap (Ya/ Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan (Ya/ Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam anggaran? (Ya/ Tidak) Hasil: Laporan Inventarisasi Aset Kota Denpasar	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4	Manajemen Keuangan	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA Total belanja anggaran tahun sebelumnya 378.347.176.697.14 1.884.553.111.846,61 x 100% = 20,08%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar



Urusan Transparansi Dan Partisipasi Publik

Capaian penyelenggaran urusan Transparansi Dan Partisipasi Publik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5		URUSAN	TRANSPARANSI DAN PARTIS	IPASI PUBLIK	
1	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda 12.842.472.406 13.503.795.253 x 100% = 95,10%	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	
2	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda Total jumlah dokumen yang telah dirinci 4 x 100%= 100%	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah/Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja memuat ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tetang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 yang menyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan bertitik tolak dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021, serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD Kota Denpasar, maka penyusunan LKjIP Tahun 2021



menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berdayaguna dan bertanggungjawab.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Denpasar Tahun 2021 antara lain:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
- 3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur. Adapun 5 (lima) tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan di Kota Denpasar secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1	2		3		4		
1	Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar	1	Menguatnya keberadaan lembaga- lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)		
	berlandaskan kebudayaan Bali			2	Indeks Tri Hita Karana		
	Kebudayaan Ban	2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan		
2	Meningkatkan kesejahteraan	3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan		
	masyarakat dengan	4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran (%)		
	mendorong kemampuan	5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (Tahun)		
	masyarakat untuk mengurangi kesenjangan	mengurangi kesenjangan	6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	
	ekonomi dan sosial serta	7	Meningkatnya pengarusutamaan	8	Indek Pembangunan Gender/IPG (%)		
	pemerataan pembangunan	-	n Perlindungan Anak	gender dan Perlindungan Anak	9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG (%)	
	inirastruktur			10	Katagori Kota Layak Anak		
		8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh (%)		
		9	Meningkatnya kualitas	12	Jalan Kondisi Baik (%)		
			Infrastruktur	13	Titik Genangan		
				14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (SR)		
				15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)		
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan	10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat		
	yang baik (good governance)			17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)		
				18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori)		



Sumber: RPJMD Kota Denpasar

Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan Tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar 2016-2021, yang didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp 882.223.062.297,00 dengan realisasi sebesar Rp 705.496.240.688,00 Secara detail anggaran kinerja Pemerintah Kota



Denpasar untuk masing-masing Tujuan/Sasaran disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Tujuan dan Anggaran Kinerja
Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021

	Temerintan Nota Benpasar Tana	
No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Menguatnya jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	33,409,525,222.00
2	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	550,796,749,771.00
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)	234,302,196,316.00
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	15,470,110,348.00
5	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	48,244,480,640.00
	TOTAL ANGGARAN	882,223,062,297.00

Sumber: Bappeda Kota Denpasar, 2021 (data diolah)

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra dicapai. Faktor-faktor mana berkontribusi dalam berhasil yang sekaligus dapat menghambat capaian kinerja, ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana.

Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Pencapaian sasaran mencapai kegiatan adalah untuk sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target kinerja. Target kinerja Pemerintah Kota Denpasar merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal Pengukuran dilakukan tahun perencanaan. kineria dengan

Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2021 untuk 16 sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari 29 indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

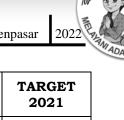
membandingkan antara target dengan realisasinya.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2021

	a was mad at a 1								
SASARAN STRATEGIS		IN	DIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2021				
	1		2	3	4				
1	1 Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional		Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	1.940				
		2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80,21				
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A				
3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2,00				
4	Mengurangi Pegangguran	5	Angka Pengangguran	Persen	5,00				
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,63				
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Indeks	12,88				
7	Meningkatnya	8	Indek Pembangunan	Persen	80				



SASARAN STRATEGIS		IN	DIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2021
	1		2	3	4
	pengarusutamaan		Gender/IPG		
	gender dan Perlindungan Anak		Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Persen	60
		10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Utama
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh	Persen	20
9	Meningkatnya kualitas	12	Jalan Kondisi Baik	Persen	66,89
	Infrastruktur	13	Titik Genangan	Persen	50
		14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	80,66
		15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	48,04
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84
	yang efektif dan akuntabel	17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP
		18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	4
		20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6,80
12	Meningatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	75
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50
		23	Koperasi yang SHU- nya meningkat	Persen	75
14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2,5
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	61,932
	budaya	26	Lama Tinggal Wisatawan		
			- Asing	Hari	3.16
			- Domestik	Hari	3.13
		27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak	Juta rupiah	162.530,50



\$	SASARAN STRATEGIS		DIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2021
	1		2	3	4
			Hiburan		
16	Meningkatnya Kualitas	28	Sampah tereduksi	Persen	30
	Lingkungan Hidup	29	Indeks LH	Indeks	57,3

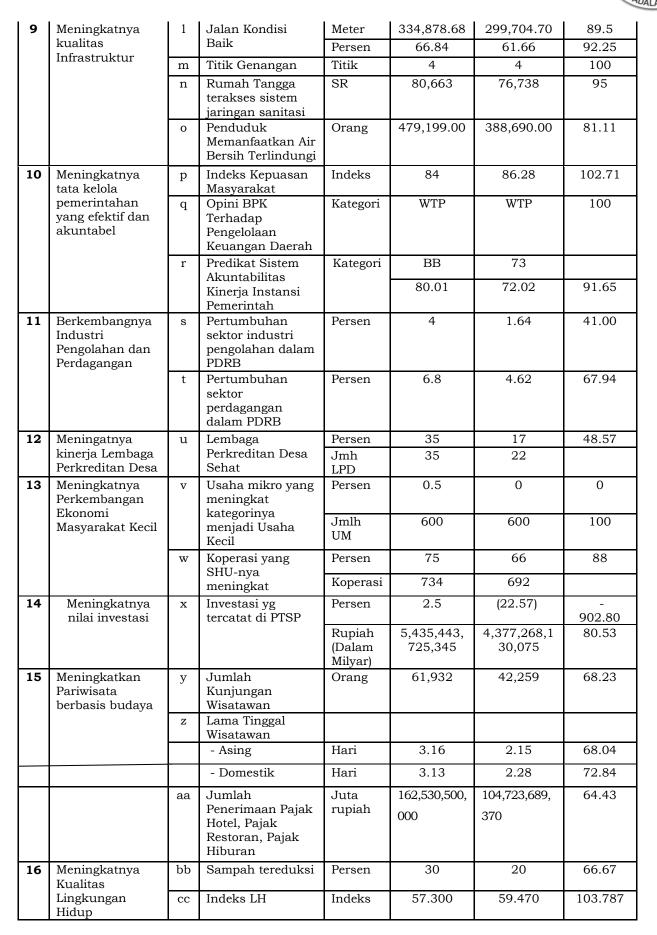
Sumber : Penetapan Kinerja Tahun 2021

B. Formula Perhitungan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7 Pengukuran Capaian Kinerja Berbanding dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis		I	ndikator Kinerja	Satuan	C	Capaian Target	:
			Utama		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	а	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	1,940	1,915	98.71
		b	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80.21	80.21	100
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	С	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	d	Angka Kemiskinan	Persen	2	2.96	99.52
4	Mengurangi Pegangguran	е	Angka Pengangguran	Persen	5	7.02	99.6
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	f	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.63	74.93	100.4
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	g	Indeks Pendidikan	Indeks	12.88	12.78	99.22
7	Meningkatnya pengarusutamaa n gender dan	h	Indek Pembangunan Gender/IPG	Persen	80	96.77	120.96
	Perlindungan Anak	i	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Persen	60	67.26	112.1
		j	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Utama	Utama	100
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	k	Luas permukiman kumuh	Persen	20	17.42	66.98





C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Pengukuran Capaian Kinerja Berbanding dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator	Satuan	Capaian	Ca	Capaian Tahun 2021				
	Kinerja Utama		Tahun 2020	Target	Realisasi	% Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7			
	SASARAN 1 : MEN	GUATNYA KI	EBERADAAN	LEMBAGA-L	EMBAGA TRADI	SIONAL			
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	1,958	1,940	1,915	98.71			
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80.11	80.21	80.21	100			
			Rata-rata (Capaian Kine	rja Sasaran 1 :	99.36			
	SASARAN 2 : ME	NINGKATNYA	PELESTAR	IAN DAN PEN	GEMBANGAN B	UDAYA			
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A			
			Rata-rata (Capaian Kine	rja Sasaran 2 :	N/A			
	S	SASARAN 3:	MENGENTAS	SKAN KEMIS	KINAN				
4	Angka Kemiskinan	Persen	2.14	2	2.96	99.52			
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3: 99.52								
	;	SASARAN 4:	MENGURAN	GI PEGANGG	URAN				
5	Angka Pengangguran	Persen	7.62	5	7.02	99.6			
				_	rja Sasaran 4 :	99.6			
			KAN DERAJ	AT KESEHAT	'AN MASYARAK				
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.82	74.63	74.93	100.40			
					rja Sasaran 5 :	100.40			
	1				KAN MASYARAK				
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.70	12.88	12.78	99.22			
					rja Sasaran 6 :	99.22			
SA	SARAN 7 : MENIN	GKATNYA PE	NGARUSUTA ANAK	AMAAN GEND	ER DAN PERLIN	NDUNGAN			
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	96.92	80	96.77	120.96			
9	Indek Pemberdayaan	Indeks	62.16	60	67.26	112.10			

	Gender/IDG				Ī	
10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Utama	Utama	Utama	100
		ı	Rata-rata	Capaian Kine	rja Sasaran 7 :	111.02
	SASARAN	8: MENGURA			JH PERKOTAAN	
11	Luas permukiman kumuh	Persen	31.00	20.00	17.42	66.98
			Rata-rata	Capaian Kine	rja Sasaran 8 :	66.98
	SASARA	N 9 : MENINO	GKATNYA K	UALITAS INFR	RASTRUKTUR	
12	Jalan Kondisi Baik	Meter	385,188. 90	334,878.68	299,704.70	89.50
		Persen	79.52	66.84	61.66	92.25
13	Titik Genangan	Titik	4	4	4	100
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	75,672	80,663	76,738	95
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	378,360. 00	479,199.00	388,690.00	81.11
			Rata-rata	Capaian Kine	rja Sasaran 9 :	92.12
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100
18	Predikat Sistem Akuntabilitas	Kategori	BB	BB	73	
	Kinerja Instansi Pemerintah		72.02	80.01	72.02	91.65
					a Sasaran 10 :	98.12
	SASARAN 11 : BER	KEMBANGN	YA INDUSTR	I PENGOLAHA	AN DAN PERDAC	GANGAN
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	8.34	4	1.64	41.00
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	7.90	6.80	4.62	67.94
			Rata-rata C	apaian Kinerj	a Sasaran 11 :	54.47
					ERKREDITAN D	
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	62.86	35.00	17.00	48.57
_		Jml LPD	30	35	22	
		-	Rata-rata C	apaian Kinerj	a Sasaran 12 :	48.57
S	ASARAN 13 : MEN	INGKATNYA	PERKEMBA	NGAN EKONO	MI MASYARAKA	T KECIL
22	Usaha mikro yang meningkat	Persen	0.50	0.50	0	0
	kategorinya	Jml UM	450	600	600	100

	menjadi Usaha Kecil							
23	Koperasi yang SHU-nya	Persen	66.00	75.00	66.00	88.00		
	meningkat	Koperasi	692	734	692			
			Rata-rata C	apaian Kiner	ja Sasaran 13 :	94.00		
SASARAN 14 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI								
24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	63.49	2.5	(22.57)	902.80		
		Rupiah (Dalam Milyar)	5,653,450, 420,135	5,435,443,7 25,345	4,377,268,130, 075	80.53		
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :							
	SASARAN 1	5 : MENINGK	ATKAN PA	RIWISATA BE	RBASIS BUDAY	1		
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	56,302	61,932	42,259	68.23		
26	Lama Tinggal Wisatawan							
ļ	- Asing	Hari	3.15	3.16	2.15	68.04		
	- Domestik	Hari	3.12	3.13	2.28	72.84		
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Rupiah (Dalam Jutaan)	157,274	162,530,500 ,000	104,723,689, 370	64.43 68.39		
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :							
	SASARAN	16: MENING	KATNYA KU	ALITAS LING	KUNGAN HIDUP			
28	Sampah tereduksi	Persen	27.00	30.00	20.00	66.67		
29	Indeks LH	Indeks	55.720	57.300	59.47	103.787		
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :						

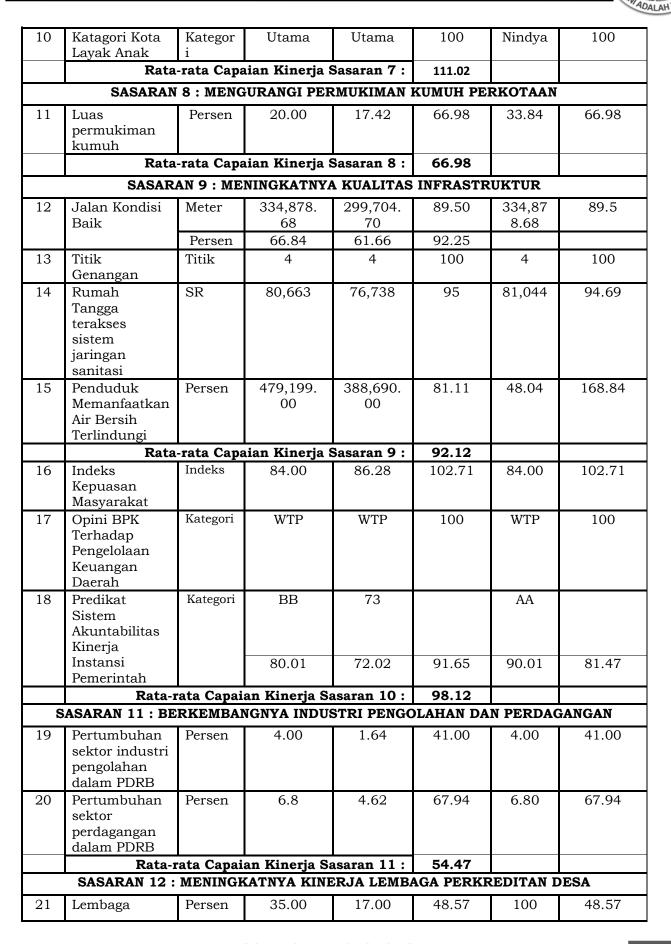
D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.9 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021			Target	Capaian
	Kinerja Utama		Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir Rpjmd	Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Rpjmd (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
	SASARAN 1 : ME	NGUATNY	A KEBERAD	AAN LEMBA	GA-LEMBAC	A TRADI	SIONAL
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	1,940	1,915	98.71	2,289	83.66
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80.21	80.21	100	80.21	100
	Rata	-rata Capa	ian Kinerja	Sasaran 1 :	99.36		
	SASARAN 2 : MI	ENINGKAT	'NYA PELES'	TARIAN DAN	PENGEMB	ANGAN BU	JDAYA
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Rata	-rata Capa	ian Kinerja	Sasaran 2 :	N/A		
	SASARAN 3 : ME	NGENTAS	KAN KEMIS	KINAN			
4	Angka Kemiskinan	Persen	2	2.96	99.52	2.00	99.52
	Rata	-rata Capa	ian Kinerja	Sasaran 3 :	99.52		
		SASARAN	14: MENGU	RANGI PEGA	ANGGURAN		
5	Angka Pengangguran	Persen	5.00	7.02	99.60	3.25	99.60
	Rata	-rata Capa	ian Kinerja	Sasaran 4 :	99.60		
	SASARAN 5	:MENING	KATKAN DE	RAJAT KES	EHATAN MA	SYARAKA	AT
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.63	74.93	100.40	74.63	100.40
	Rata	-rata Capa	ian Kinerja	Sasaran 5 :	100.40		
	SASARAN 6	: MENING	KATKAN KU	ALITAS PEN	DIDIKAN M	ASYARAK	AT
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.88	12.78	99.22	12.96	98.61
			ian Kinerja		99.22		
SA	ASARAN 7 : MENI	NGKATNY		SUTAMAAN IAK	GENDER DA	AN PERLII	NDUNGAN
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	80.00	96.77	120.96	80.00	120.96
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	60.00	67.26	112.10	60.00	112.10



	T			T	T				
	Perkreditan Desa Sehat								
		Jml LPD	35	22		35			
	Rata-r	ata Capai	an Kinerja Sa	asaran 12 :	48.57				
SA	SASARAN 13 : MENINGKATNYA PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL								
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya	Persen	0.50	0.00	0.00	2.50	0.00		
	menjadi Usaha Kecil	Jml UM	600	600	100.00	750	80.00		
23	Koperasi yang	Persen	75.00	66.00	88.00	75.00	88.00		
	SHU-nya meningkat	Koperasi	734	692		787			
		ata Capai	an Kineria Sa	asaran 13 :	94.00				
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 : 94.00 SASARAN 14 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI								
24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2.5	(22.57)	902.80	12.5	- 180.56		
	1 1 0 1	Rupiah (Dalam Milyar)	5,435,443,7 25,345	4,377.268, 130,075	80,53	5,435	80,538,512, 053		
	Rata-r	ata Capai	an Kinerja Sa	asaran 14 :	80.53				
	SASARAN	15 : MENI	NGKATKAN	PARIWISAT	A BERBASI	S BUDAYA	1		
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	61,932	42,259	68.23	667,08 6	6.33		
26	Lama Tinggal Wisatawan								
	- Asing	Hari	3.16	2.15	68.04	3.16	68.04		
	- Domestik	Hari	3.13	2.28	72.84	3.13	72.84		
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Rupiah (Dalam Jutaan)	162,530, 500,000	104,723, 689,370	64.43 68.39	305,329	34,298,594. 50		
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 : SASARAN 16 : MENINGKATNYA KUALITAS					M HIDIT			
28	Sampah	Persen	30	20	66.67	30	66.67		
29	tereduksi Indeks LH	Indeks	57.3	59.47	103.787	55.24	107.657		
	Rata-r	ata Capaia	an Kinerja Sa	asaran 16 :	85.23				

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai



tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)				
1	2	3	4	5	6				
	MISI 1								
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2	99.36	86.81	12.54				
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1	N/A	-	N/A				
MISI 2									
3	Mengentaskan Kemiskinan	1	99.52	96.76	2.76				
4	Mengurangi Pengangguran	1	99.60	97.93	1.66				
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	100.40	82.98	17.42				
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1	99.22	90.08	9.14				
7	Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak	3	111.02	67.26	43.76				
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	66.98	94.81	-27.83				
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	92.12	81.18	10.94				
		MIS	SI 3						
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	3	98.12	66.25	31.87				
	MISI 4								
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	54.47	66.20	-11.73				
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1	48.57	0.00	48.57				
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	2	94.00	93.47	0.53				

14	Meningkatnya nilai investasi	1	80.53	87.91	-7.38					
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	3	68.39	98.27	-29.88					
	MISI 5									
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	85.23	62.62	22.60					

Sumber: Bappeda Kota Denpasar, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.10, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran sudah efisien. Dari ke 16 (enam belas) sasaran tersebut diatas, masih terdapat sasaran yang belum dapat dihitung tingkat efisiensinya yaitu, sasaran meningkatnya pelestarian budaya, yang diukur menggunakan pengembangan Kebudayaan, yang sampai saat ini belum ada data publish terkait indeks kebudayaan untuk kabupaten/kota. Sasaran Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya menjadi sasaran yang terendah tingkat efisiensinya yaitu sebesar -29,88% yang berarti bahwa pelaksanaan program kegiatan penunjang pada indikator ini tidak dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata karena adanya kebijakan pusat terkait pembatasan kunjungan yang merupakan dampak dari pandemi Covid 19 yang telah melanda Dunia hampir 3 tahun terakhir ini sehingga berimbas kepada perkembangan ekonomi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar . Sedangkan sasaran yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi adalah Sasaran Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa dengan tingkat efisiensi sebesar 48,57%.



F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program yang menjadi prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2021 antara lain:

Tabel 2.11 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Kinerja Utama			paian Tahun 2021		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020 Terhadap	Program Kegiatan prioritas	
			Target	Realisasi	% Realisasi	112 0.112	Target Akhir RPJMD (%)		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
			SASARAN 1 : MENGU	JATNYA KEBERADA	AN LEMBAGA-I	EMBAGA TI	RADISIONAL		
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	1,940	1,915	98.71	2,289	83.66	 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 	
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80.21	80.21	100	80.21	100	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Rata-rata Capaian B	Kinerja Sasaran 1 :	99.36				
			SASARAN 2 : MENI	NGKATNYA PELEST	ARIAN DAN PEI	NGEMBANGA	N BUDAYA		
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	-	 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman 	
			Rata-rata Capaian K	Kinerja Sasaran 2 :	N/A				
			SAS	SARAN 3 : MENGEN	raskan kemis	KINAN			
4	Angka Kemiskinan	Persen	2	2.96	99.52	2	99.52	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial	



			Rata-rata Capaian K	ineria Sasaran 2	99.52			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman
				-				
			SAS	SARAN 4 : MENGURA	ANGI PEGANG	GURAN		
5	Angka Pengangguran	Persen	5	7.02	99.60	3.25	99.60	 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial
			Rata-rata Capaian K	inerja Sasaran 4 :	99.60			
	•		SASARAN 5 :ME	NINGKATKAN DERA	AJAT KESEHA	TAN MASYAR	AKAT	•
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.63	74.93	100.40	74.63	100.40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Rata-rata Capaian K	inerja Sasaran 5 :	100.40			
	•	SASARAN 6	: MENINGKATKAN KU	JALITAS PENDIDIKA	N MASYARAK	КАТ		
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.88	12.78	99.22	12.96	98.61	1. Program Pengelolaan Pendidikan
			Rata-rata Capaian K	-	99.22			
		SASA	RAN 7: MENINGKAT	NYA PENGARUSUTA	MAAN GENDE	R DAN PERLI	NDUNGAN AN	AK
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	80.00	96.77	120.96	80.00	120.96	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan



9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	60.00	67.26	112.10	60	112.10	Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem
								Data Gender Dan Anak
10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Utama	Utama	100	Nindya	100	 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Program Pemberdayaan Dan
								Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		l	Rata-rata Capaian F	Kinerja Sasaran 7 :	111.02			Sojaniora (125)
	•		SASARAN 8:	MENGURANGI PER	MUKIMAN KU	MUH PERKOT.	AAN	
11	Luas permukiman kumuh	Persen	20	50.52	17.42	33.84	66.98	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Program Kawasan Permukiman
		-	Rata-rata Capaian I	Kinerja Sasaran 8 :	17.42			
	l.		SASARAN	9 : MENINGKATNYA	KUALITAS IN	FRASTRUKTU	R	
12	Jalan Kondisi Baik	Meter	334,878.68	299,704.70	89.50	334,878.6 8	89.50	Program Penyelenggaraan Jalan
		Persen	66.84	61.66	92.25			2. Program Pengembangan Permukiman
13	Titik Genangan	Titik	4	4	100	4	100	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase



14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	80,663	76,738	95.13	81,044	94.69	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	479,199.00	388,690.00	81.11	48.04	168.84	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			Rata-rata Capaian I	Kinerja Sasaran 9 :	92.124			
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	100	WTP	100	Program Penyelenggaraan Pengawasan Pengram Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB 80.01	73 72.02	90.01	90.01	80.01	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan
		F	Rata-rata Capaian Ki	nerja Sasaran 10 :	97.58			
	1	S	ASARAN 11 : BERK	EMBANGNYA INDUS	TRI PENGOLA	HAN DAN PER	DAGANGAN	1
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	4.00	1.64	41.00	4.00	41.00	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6.80	4.62	67.94	6.80	67.94	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



		R	ata-rata Capaian Ki	nerja Sasaran 11 :	54.47			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	<u> </u>		SASARAN 12 : ME	NINGKATNYA KINE	RJA LEMBAGA	PERKREDIT	AN DESA	
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	35	17	48.57	100	48.57	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Jml LPD	35	22		35		7
		R	ata-rata Capaian Ki	nerja Sasaran 12 :	48.57			
	ı	SA	SARAN 13 : MENIN	GKATNYA PERKEM	BANGAN EKON	OMI MASYAF	RAKAT KECIL	
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0.50	0.00	0.00	2.50	0.00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Program Pengembangan Umkm Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Jml UM	600	600	100.00	750	80	6. Program Perizinan Usaha Pertanian
23	Koperasi yang SHU-nya	Persen	75	66.00	88.00	75.00	88.00	1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi



						1		
	meningkat							2. Program Penilaian Kesehatan
								Ksp/Usp Koperasi
								3. Program Pendidikan Dan
								Latihan Perkoperasian
		Koperasi	734	692		787		4. Program Pemberdayaan Dan
								Perlindungan Koperasi
		R	ata-rata Capaian Ki	nerja Sasaran 13 :	94.00			
			SASA	RAN 14: MENINGK	ATNYA NILAI I	NVESTASI		
24	Investasi yg	Persen	2.5	- 902.94	12.5	-	1. Program Pengembangan Iklim	
	tercatat di PTSP			(22.57)			180.56	Penanaman Modal
								2. Program Promosi Penanaman
								Modal
								3. Program Pelayanan
								Penanaman Modal
								4. Program Pengendalian
								Pelaksanaan Penanaman
								Modal
		Rupiah	5,435,443,725,34	4,377,268,130,07	80.53	5,435	80,538,512,0	5. Program Pengelolaan Data
		(Dalam	5	5			52.90	Dan Sistem Informasi
		Milyar)						Penanaman Modal
		R	lata-rata Capaian Ki	nerja Sasaran 14 :	80.53			
			SASARAN 15 :	MENINGKATKAN	PARIWISATA B	ERBASIS BUI	DAYA	
25	Jumlah	Orang	61,932	42,259	68.23	667,086	6.33	1. Program Peningkatan Daya
	Kunjungan							Tarik Destinasi Pariwisata
	Wisatawan							2. Program Pemasaran
26	Lama Tinggal							Pariwisata
	Wisatawan							3. Program Pengembangan
	- Asing	Hari	3.16	2.15	68.04	3.16	68.04	Sumber Daya Pariwisata Dan
								Ekonomi Kreatif
	- Domestik	Hari	3.13	2.28	72.84	3.13	72.84	
27	Jumlah	Rupiah	162,530,500,000	104,723,689,370	64.43	305,329	34,298,594.	
	Penerimaan	(Dalam					50	
	Pajak Hotel,	Jutaan)						
	Pajak Restoran,							
	Daial- Hibrana							
	Pajak Hiburan		lata-rata Capaian Ki		68.39			



			SASARAN 16	: MENINGKATNYA	KUALITAS LINC	KUNGAN HI	DUP	
28	Sampah tereduksi	Persen	30	20	66.67	30	66.67	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
29	Indeks LH	Indeks	57.3	59.47	103.787	55.24	107.657	 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		R	ata-rata Capaian Kir	nerja Sasaran 16 :	85.23			



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- g. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang: Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.



2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi tidak dimungkinkan semua wewenang kesatuan memang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah



otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugastugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas
kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang
tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak
atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas
pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa
mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten / kota di bidang pemerintahan
yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas memberikan konsekuensi pembantuan terhadap pengaturan pendanaan.Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L). Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagiananggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementeria / lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten / kota, dan / atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Denpasar tidak memperoleh lokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda Indonesia bahkan hamper



seluruh dunia. Dengan adanya pandemic ini, menyebabkan penurunan pendapatan yang tajam dan masalah likuiditas. Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro. Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berfokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun daerah, perlu mengerahkan kekuatan dalam penanggulangan penyebaran pandemi ini memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 (3) dan Pasal 18 (2) terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memprioritaskan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun 6 Pelayanan Dasar dimaksud yaitu:

- 1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2. Bidang Sosial
- 3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 4. Bidang Kesehatan
- 5. Bidang Pendidikan
- 6. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Pendidikan anak usia dini
- > Pendidikan dasar
- > Pendidikan kesetaraan



4.1.2 Indikator dan Nilai SPM

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia yang didalamnya terkandung ikhtiar luhur dan mulia dengan nuansa mendidik generasi penerus bangsa yang berdedikasi tinggi dan berkarakter serta sangkil dan mangkus sebagai pewaris dan estapet pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Seiring hal tersebut keberhasilan pembangunan bangsa memiliki korelasi positif dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa "Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perabadan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Dalam otonomi daerah banyak kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah diantaranya :penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang merupakan penyelenggaran pendidikan Kota Denpasar pada jenjang pendidikan : TK, SD, SMP dan sederajat.

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang pendidikan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

4.1.3 Realisasi

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan realisasi beberapa kegiatan yang ditargetkan Kota Denpasar pada tahun 2021 terealisasi diatas 62,19 %.



4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan di Kota Denpasar pada tahun 2021 tidak ada mengalokasikan anggaran, dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* dan rasionalisasi anggaran.

1.1.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan didukung oleh personil Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar sejumlah 12 Orang PNS.

1.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Adapun persentase realisasi capaian beberapa kegiatan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan antara lain:

- 1. Pada Pelayanan Pendidikan Dasar yang dimana data diminta adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan demikian realisasi persentase capaian indikator pada kegiatan tersebut sebesar 99,4%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkendala APBD tahun 2021, solusi yang akan dilaksanakan berupa dianggarkan pada tahun 2022 dan Situasi pandemi *Covid-19* pada tahun 2021 mengakibatkan beberapa siswa yang tidak datang ke sekolah.
- 2. Pada Pelayanan Pendidikan Kesetaraan yang dimana data diminta yang belum adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun atau menyelesaiakan pendidikan dasar dan menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan, dengan realisasi persentase capaian indikator pada kegiatan tersebut sebesar 98,31%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini,terkendala APBD tahun 2021, solusi yang akan dilaksanakan berupa dianggarkan pada tahun 2022 dan Situasi pandemi Covid-19 pada tahun 2021 mengakibatkan beberapa siswa yang tidak datang ke sekolah.



3. Pada Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dimana data diminta adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, dengan realisasi persentase capaian indikator pada kegiatan tersebut sebesar 62,19%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini,terkendala APBD tahun 2021, solusi yang akan dilaksanakan berupa dianggarkan pada tahun 2022 dan Situasi pandemi *Covid-19* pada tahun 2021 mengakibatkan beberapa siswa yang tidak datang ke sekolah.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar tahun 2021 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

No	Jenis	Indikator	Target	Realisasi	Alc	kasi Ang	garan	Dukungan	Permasalahan	Keterangan
	Pelayanan Dasar	Pencapaian			APBD	APBN	Lainnya	Personil	Dan Solusi	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	99,4%	-	-	-	Terdiri dari 8 tim survey ke lapangan dan 4 verifikator	Terkendala APBD Tahun 2021 Solusi : akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	98,66%	-	-	-	Terdiri dari 8 tim survey ke lapangan dan 4 verifikator	Terkendala APBD Tahun 2021 Solusi : akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	62,19%	-	-	-	Terdiri dari 8 tim survey ke lapangan dan 4 verifikator	Terkendala APBD Tahun 2021 Solusi : akan dianggarkan	-



				pada tahun	
				berikutnya.	
				Realisasi dari	
				Jumlah Warga	
				Negara Usia 5-6	
				Tahun yang	
				berpartisipasi	
				dalam	
				pendidikan	
				PAUD sebanyak	
				62.19%	
				dikarenakan	
				pada anak usia	
				6 tahun sudah	
				terdaftar di	
				SD/MI.	



1.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

- 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4. Pelayanan Kesehatan Balita
- 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Indikator dan Nilai SPM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Urusan Kesehatan merupakan urusan yang dibagi anatara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar.untuk mencapai sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional pada Bidang Kesehatan diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap



Warga Negara memperoleh Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan kebutuhan Warga Negara terhadap barang dan jasa kesehatan sangat vital dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks maka peranan Pemerintah dibidang kesehatan harus distandarisasi agar Warga Negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, komplek dan bahkan terkadang tak terduga. Oleh karena itu pembangunan kesehatan memperhatikan dinamika dilaksanakan dengan kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran aktif masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 mengamanatkan target-target Standar Pelayanan Minimal lebih merupakan kinerja Pemerintah Daerah, dan menjadi penilaian kinerja Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara, sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan Nasional, pemberian insentif, disinsetif dan sanksi administrasi Kepala Daerah.

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

4.2.3 Realisasi

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan ada beberapa capaian realisasi kegiatan Kota Denpasar pada tahun 2021 tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan keterbatasan dalam melakukan kegiatan yang direncanakan.



4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan di Kota Denpasar pada tahun 2021 sudah mengalokasikan anggaran disetiap indikator kegiatan.

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan didukung oleh personil Dinas Kesehatan Kota Denpasar sejumlah 171 Orang.

4.2.6 Permasalahan Dan Solusi

Adapun persentase realisasi capaian beberapa kegiatan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan antara lain:

- 1. Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dimana data diminta adalah Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan dengan sebanyak 17.051 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 95,65%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini jumlah kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan masih kurang akibat situasi pandemi *Covid-19*, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak masyarakat yang kembali ke daerah asal.
- 2. Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang dimana data diminta adalah Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan adalah sebanyak 16.638 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 98,25%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih kurang akibat situasi pandemi *Covid-19*, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak masyarakat atau ibu bersalin yang kembali ke daerah asal.
- 3. Pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang dimana data diminta adalah Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan



- kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah 16.205 bayi, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.
- 4. Pada Pelayanan Kesehatan Balita yang dimana data diminta adalah Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 39.457 balita, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 63,78%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dimana situasi pandemi *Covid-19* pada tahun 2021 membuat pelayanan terhadap balita di beberapa Posyandu di Kota Denpasar menjadi tertunda.
- 5. Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dimana data diminta adalah Jumlah semua anak usia pendidikan dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 116.500 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 96,15%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dimana situasi Pandemi *Covid-19* pada tahun 2021 mengakibatkan ada beberapa siswa di Kota Denpasar belum melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat screening.
- 6. Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dimana data diminta adalah Jumlah pengunjung berusia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 395.845 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 88,86%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dimana situasi Pandemi *Covid-19* pada tahun 2021 tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak sasaran dalam pelaksaan screening.
- 7. Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dimana data diminta adalah Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 53.830 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 87,26%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, adanya Pelaksanaan Posyandu Paripurna tertunda akibat *Covid-19* di Tahun 2021.



- 8. Pada Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yang dimana data diminta adalah Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 66.902 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 52,75%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, dimana Screening Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tidak mampu dilaksanakan akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2021.
- 9. Pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus yang dimana data diminta adalah Jumlah penyandang diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 10.353 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.
- 10. Pada Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang dimana data diminta adalah Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 746 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 38,16%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, keterbatasan untuk menemukan penderita gangguan jiwa akibat Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021.
- 11. Pada Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dimana data diminta adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 2.754 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.
- 12. Pada Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang dimana data diminta adalah Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 20.404 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 86,99%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkait sasaran 8 kunci pemeriksaan pada orang beresiko terinfeksi HIV yang datang ke



Pos Pelayanan Kesehatan sangat minim, dikarenakan pandemi Covid.

> Solusi

Terjadinya Pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung di Kota Denpasar hingga tahun 2021 memang membatasi ruang gerak masyarakat di Kota Denpasar. Banyaknya dari program pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar yang tidak bisa mencapai target di tahun 2021 ini, untuk meningkatkan capaian SPM Bidang Kesehatan maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program diantaranya:

- 1. Peningkatan pencapaian Pelayanan Ibu Hamil
 - a. Pelaksanaan kelas ibu online
 - b. Inovasi KOI ELOK (Kohort Ibu hamil elektronik)
 - c. PEDULI BUMII (Pelayanan dahulukan ibu hamil) : (Pelayanan diberikan kepada ibu hamil dengan tidak mengantri di loket umum dan di ruang rujukan terpadu)
- 2. Peningkatan Pencapaian Pelayanan Ibu Bersalin di masa Pandemi *Covid-19* Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui Puskesmas melaksanakan beberapa inovasi yang dikomunikasikan melalui grup whatsapp:
 - a. Perencanaan persalinan aman
 - b. Rujukan dini berencana dengan stiker resiko tinggi ibu hamil (JUDICA SIRESTI)
 - c. SEHATI (setetes darah untuk ibu hamil dengan tulus dan ikhlas)
- 3. Peningkatan pencapaian pelayanan kesehatan balita dibuat inovasi yang dikomunikasikan melalui grup whatsapp:
 - a. NGOBRAS SENI (ngobrol asik seputar imunisasi)
 - b. SURAT CINTAKU (surat catatan imunisasi dasar dan lanjutan untuk kunjungan ulang)
 - c. Janji timbang yang dilakukan dari rumah ke rumah oleh kader dengan penerapan protocol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19
 - d. Kelas online ibu balita terintergrasi melalui grup whatsapp.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini:

No	Jenis	Indikator	Target	Realisasi		Alokasi Anggara	an	Dukungan	Permasalahan	Keterangan
	Pelayanan Dasar	Pencapaian			APBD	APBN	Lainnya	Personil	Dan Solusi	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,65%	-	97.990.046 (pajak rokok, BOK)	-	13 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	-	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,25%	-	1.353.890.792 (DAK- Jampersal, BOK)	-	13 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	-	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	-	78.310.528 (pajak rokok)	-	13 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	-	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	63,78%	-	2.918.766.786 (DID, pajak rokok)	-	14 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Posyandu tidak dapat berjalan dengan penuh dikarenakan masih adanya Covid-19	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang	100%	96,15%	-	599.223.082 (pajak rokok)	-	13 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar	-	



	dasar	mendapatkan layanan kesehatan						dan Puskesmas)		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88,86%	-	489.125.220 (pajak rokok)	-	13 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Pandemi Covid-19 tidak memungkinan untuk Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas mengumpulka n sasaran yang banyak	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,26%	-	49.030.280 (BOK, pajak rokok)	-	13 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Posyandu Paripurna tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan Covid-19	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	52,75%	-		-	13 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Screening PTM tidak maksimal dapat dilaksanakan dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan	100%	100%	-	116.710.000 (pajak rokok)	-	13 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	-	



		kesehatan								
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	38,16%	-	457.080.750 (pajak rokok)	-	13 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Keterbatasan dalam menemukan penderita gangguan jiwa akibat terjadinya pandemi Covid-19	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	-	716.006.540 (pajak rokok, DBH)	-	20 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	-	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie ncy Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	86,99%	-	753.303.376 (pajak rokok, DBH)	-	20 personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Sasaran 8 kunci pemeriksaan orang beresiko terinfeksi HIV yang datang ke Pos Pelayanan sangat minim.	



4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Urusan Pemerintahaan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yaitu:

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- > Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

4.3.2 Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal

Adapun indikator pelayanan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target capaian kinerja 100 %.

4.3.3 Realisasi

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum capaian realisasi kegiatan Kota Denpasar pada tahun 2021 tidak sesuai target.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Denpasar pada tahun 2021 sudah mengalokasikan anggaran disetiap indikator kegiatan, akan tetapi karena pandemi mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan maksimal.

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum didukung oleh personil Dinas PUPR Kim Provinsi, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Darma, BPPW Provinsi Bali dan Dinas



PUPR Kota Denpasar yang berjumlah sejumlah 54 Orang.

4.3.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan:

- 1. Keterbatasan sumber air baku yang potensial, karena Kota Denpasar memanfaatkan air baku hanya dari Sungai Ayung
- 2. Dana APBD yang terbatas dalam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 3. Budaya Masyarakat Kota Denpasar yang masih nyaman menggunakan sumur bor dan sumur dangkal tidak terlindungi untuk penyediaan air bersih di rumah tangga
- 4. Pipa induk DSDP yang belum terpasang pada seluruh kawasan di Kota Denpasar, sehingga tidak bisa dipasangkan pipa sambungan rumah.
- 5. Dana APBD yang terbatas dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah di Kota Denpasar.
- 6. Masyarakat Kota Denpasar yang masih nyaman membuang limbah domestik rumah tangga melalui *Septic Tank* dan Sungai.
- 7. Lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Terpusat Skala Permukiman (Komunal).

Solusi:

- 1. Berkoodinasi dengan pihak Perumda Air Minum Tirta Sewaka darma untuk pembangunan Reservoar di beberapa titik rawan air bersih di Kota Denpasar sebagai tampungan cadangan air.
- 2. Mengoptimalkan pasokan air baku melalui kerjasama Regional SARBAGITA untuk Denpasar Barat melalui suplai dari IPA Penet di Kabupaten Badung dan Denpasar Timur melalui suplai air minum dari IPA Petanu di Kabupaten Gianyar.
- 3. Mengoptimalkan Dana DAK dari Kementrian dalam program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 4. Berkoordinasi dengan pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali untuk Pembangunan Instalasi Pipa Induk DSDP di wilayah wilayah yang belum terpasang di Kota Denpasar



- 5. Koordinasi dengan Bappeda Kota Denpasar untuk menganggarkan pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah di Kota Denpasar
- 6. Sosialisasi Kepada Masyarakat terhadap pentingnya pengolahan limbah domestic rumah tangga melalui IPAL DomestikTerpusat Skala Kota (DSDP) dan IPAL DomestikTerpusat Skala Permukiman (Komunal) untuk kesehatan dan kelestarian lingkungan.
- 7. Mengupayakan lahan-lahan yang tidak lazim untuk Pembangunan IPAL Domestik Skala Permukiman (Komunal) seperti di bantaran sungai.

4.3.7 Program/Kegiatan

Pelaksanaan pada Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum memiliki program kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kota Denpasar tahun 2021 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	t Realisasi	A1	okasi Anggaran		Dukungan Personil		Keterangan
No					APBD (Rp)	APBN (Rp)	Lainnya		Permasalahan Dan Solusi	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	52,90%	222.113.724	3.873.334.800		Dinas PUPR Kota Denpasar Balai Prasarana Permukim an Wilayah Bali Perumda Air Minum Tirta Sewaka Darma	Permasalahan: 1. Keterbatasan sumber air baku yang potensial, karena Kota Denpasar memanfaatkan air baku hanya dari Sungai Ayung 2. Dana APBD yang terbatas dalam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Budaya Masyarakat Kota Denpasar yang masih nyaman menggunakan sumur bor dan sumur dangkal tidak terlindungi untuk penyediaan air bersih di rumah tangga Solusi: 1) Berkoodinasi dengan pihak Perumda Air MinumTirta Sewakadarma untuk pembangunan Reservoar	Sulit mencapai Target 100 % Air Minum Aman melalui jaringan pipa air minum terlindungi
									dibeberapa titik rawan air bersih di Kota Denpasar sebagai tampungan	
									cadangan air. 2)Mengoptimalkan pasokan	
									air baku melalui kerjasama	
									Regional SARBAGITA untuk	
									Denpasar Barat melalui	
									suplai dari IPA Penet di	
									Kabupaten Badung dan	



							TO ALAH !
2	Penyediaan	Jumlah	100%	8,61%	84.312.250	1.693.939.897	Denpasar Timur melalui suplai air minum dari IPA Petanu di Kabupaten Gianyar. 3) Mengoptimalkan Dana DAK dari Kementrian dalam program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 1. Dinas Permasalahan: Sulit
	Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	8,61%	84.312.230	1.093.939.897	PUPR Kota Denpasar 2. Balai Prasarana Permukima n Wilayah Bali 3. Dinas PUPR Kim Provinsi Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bal



		belumterpasang di Kota
		Denpasar
		2) Koordinasi dengan Bappeda
		Kota Denpasar untuk
		menganggarkan
		pelaksanaan Program
		Pengelolaan dan
		Pengembangan Sistem Air
		limbah di Kota Denpasar
		3) Sosialisasi Kepada
		Masyarakat terhadap
		pentingnya pengolahan
		limbah domestic rumah
		tangga melalui IPAL
		Domestik Terpusat Skala
		Kota (DSDP) dan IPAL
		Domestik Terpusat Skala
		Permukiman (Komunal)
		untuk kesehatan dan
		kelestarian lingkungan.
		4)Mengupayakan lahan-lahan
		yang tidak lazim untuk
		Pembangunan IPAL
		Domestik Skala
		Permukiman (Komunal)
		seperti di bantaran sungai



4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berikut jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:

- 1. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- 2. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

4.4.2 Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Perumahan Rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari: Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan jenua pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dengan indkator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Adapun target capaian kinerja yang ingin dicapai adalah 100 persen.

4.4.3 Realisasi

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat realisasi beberapa kegiatan yang ditargetkan Kota



Denpasar pada tahun 2021 tidak bisa dilaksanakan karena situasi pandemi *Covid-19* di Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya rasionalisasi (refocusing) anggaran pada Tahun 2021.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Denpasar pada tahun 2021 tidak bisa mengalokasikan anggaran disetiap indikator kegiatan, karena situasi pandemi *Covid-19* di Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya rasionalisasi (refocusing) anggaran pada Tahun 2021.

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebanyak 17 orang.

4.4.6 Permasalahan Dan Solusi

Pada tahun 2021, kegiatan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota dan Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 100% oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar karena tidak terjadinya Bencana Alam di Kota Denpasar.

Solusi yang diberikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar pada tahun berikutnya untuk kegiatan tersebut akan tetap merancang anggaran untuk setiap tahun.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kota Denpasar tahun 2021 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan	Permasalahan	Keterangan
	Dasar	Pencapaian			APBD	APBN	Lainnya	Personil	Dan Solusi	
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	JumlahWarga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100 %	31.750.000	-	-	17 orang	-	Anggaran APBD Prov Bali
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenarelokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100 %					Tidak ada kegiatan program pemerintah yang merelokasi masyaraakat	



4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berikut jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

- 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2. Pelayanan informasi rawan bencana
- 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut juga merupakan landasan hukum yang menjiwai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dalam Pasal 255 disebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Untuk itu, masing-masing Daerah membuat landasan hukum baik berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indikator Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Ketenteraman,



Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yaitu: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dengan realisasi capaian 100%.

4.5.3 Realisasi

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat semua capaian realisasi kegiatan yang ditargetkan Kota Denpasar pada tahun 2021 sebesar 100%.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Denpasar pada tahun 2021 ada satu indikator kegiatan yang tidak menganggarkan adalah pada indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar pada Tahun 2021 didukung sebanyak 119 Personil. Sedangkan pelaksanaan pada Standar Pelayanan Minimal Pemeliharaan Ketertiban Umum. Ketentraman Masvarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 di dukung oleh 253 Personil pada setiap kegiatan.

4.5.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan



Masyarakat, sebagai berikut:

- 1. Belum tersedianya data daerah rawan bencana yang terbaru
- 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana
- 3. Kompetensi sumber daya manusia dalam penanganan bencana belum optimal, sarana dan prasarana yang belum memadai
- 4. Kompetensi sumber daya manusia dalam penanganan bencana belum optimal, sarana dan prasarana yang belum memadai.

Solusi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan layanan informasi daerah rawan bencana
- 2. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan/bimtek terkait penanggulangan bencana bagi aparatur.
- 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan/bimtek terkait penanggulangan bencana bagi aparatur, meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.



Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar tahun 2021 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

	Jenis	Indikator			Alokasi .	Anggara	n	Dukungan	Permasalahan Dan Solusi	
No	Pelayanan Dasar	Pencapaian	Target	Realisasi	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Lainnya	Personil		Keterangan
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	1.130.001.600			119 Personil (Satuan Polisi Pamong Praja)		Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	44.147.875			Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Permasalahan: belum tersedianya data daerah rawan bencana yang terbaru Solusi: meningkatkan layanan informasi daerah rawan bencana	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	100%	100%	2.822.636.844			Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Permasalahan: masih rendahnya kesadaran masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana	



4	Pelayanan penyelamata n dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	4.733.015.600	253 Personil Badan Penganggulang an Bencana Daerah Kota Denpasar	Solusi: meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Permasalahan: kompetensi sumber daya manusia dalam penanganan bencana belum optimal, sarana dan prasarana yang belum memadai Solusi: meningkatkan pendidikan dan pelatihan/bimtek terkait penanggulangan bencana bagi	
5	Pelayanan Penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%		253 Personil Badan Penganggulang an Bencana Daerah Kota Denpasar	aparatur. Permasalahan: kompetensi sumber daya manusia dalam penanganan bencana belum optimal, sarana dan prasarana yang belum memadai	



			Solusi: meningkatkan pendidikan dan pelatihan/bimtek terkait penanggulangan bencana bagi aparatur, meningkatkan sarana dan prasarana	
			penanggulangan bencana.	



4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berikut jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:

- 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- 2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

4.6.2 Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.

Pemenuhan taraf kesejahtraan masyarakat perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahtraan sosial yang diinginkan. Pembangunan kesejahtraan sosial sasarannya adalah:

- 1. Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah kesejahtraan sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, perilaku menyimpang dan cacat akibat bencana.
- 2. Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahtraan sosial masyarakat.
- 3. Nilai dasar kesejahtraan sosial dan kepranataan sosial.



Target indikator pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada kegiatan ahun 2021 diantaranya yaitu: Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dan Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebesar 100%.

4.6.3 Realisasi

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial realisasi beberapa kegiatan yang ditargetkan Kota Denpasar pada tahun 2021 terealisasi sesuai target yang direncanakan.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial di Kota Denpasar pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran di indikator kegiatan, karena situasi pandemi *Covid-19* di Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya rasionalisasi (refocusing) anggaran pada Tahun 2021 pada pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan kegiatan dan Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.

4.6.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan pada Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial memiliki jumlah sebanyak 69 personil, dimana pada penerapannya memerlukan dukungan dari pihak unsur masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

4.6.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial adalah :

1. Tidak ada jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang dilaporkan ke Dinas Sosial.



2. Tidak memiliki anggaran pada APBD dan APBN terkait penanganan perlindungan & jaminan sosial tanggap bencana.

Solusi yang dihadapi dalam Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial karena adanya wabah pandemi *Covid-19* di Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya rasionalisasi (refocusing) anggaran pada Tahun 2021. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan sosialisasi dan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis yang perlunya rehabilitasi dan penanganan khusus oleh penyandang disabilitas di Dinas Sosial untuk mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

4.6.7 Program/Kegiatan

Pelaksanaan pada Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial memiliki program kegiatan diantaranya:

 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kota Denpasar tahun 2021 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

	Jenis	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Aloka	si Anggara	n	Dukungan Personil	Permasalahan Dan Solusi	Keterangan
No	Pelayanan Dasar				APBD (Rp)	APBN (Rp)	Lainnya			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	100%	100%	57,055,350			23 Personil Dinas Sosial Kota Denpasar		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	panti Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%					Tidak ada jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang dilaporkan ke Dinas Sosial.	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	168,000,000			23 Personil Dinas Sosial Kota Denpasar		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100%	100%	5,070,000			23 Personil Dinas Sosial Kota Denpasar		



		dasar tuna sosial diluar panti						
5	Perlindunga n dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%			Dinas Sosial tidak memiliki anggaran pada APBD dan APBN terkait penanganan perlindungan & jaminan sosial tanggap bencana.	



BAB V PENUTUP

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka setiap tahun Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah. LPPD pada dasarnya merupakan Laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (desentralisasi), maupun Tugas Pembantuan, serta Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Denpasar selama tahun 2021 capaian kinerjanya ada yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil. Namun demikian harus disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan ditengah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam aspek Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, Regulasi Anggaran. Meskipun demikian, maupun dengan kekurangan tersebut Pemerintah Kota Denpasar mampu menunjukkan hasil dengan memperoleh kinerjanya yaitu penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, Perangkat Daerah Kota Denpasar serta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Denpasar.

Demikian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Denpasar ini disusun untuk memenuhi pertanggung jawaban Pemerintah



Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. Dengan harapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Denpasar ini, dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas monitoring dan menjadi referensi sekaligus bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun yang akan datang.

Denpasar, 21 Maret 2022

WALIKOTA DENPASAR,

Justi ngurah jaya negara, s.e.